

- SUDARMONO, S.STP., M.SI., PH.D. -

Pembangunan Modal Sosial



**BUKU LITERATUR
IPDN TAHUN 2021**



Sudarmono, S.STP., M.Si., Ph.D.

Pembangunan Modal Sosial

RTUJUH MEDIA PRINTING - Bandung

**PEMBANGUNAN MODAL SOSIAL
COPYRIGHT® Sudarmono, S.STP., M.Si., Ph.D. 2021**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

All Rights Reserved

Cetakan I, 2021

Penulis : Sudarmono, S.STP., M.Si., Ph.D.

Editor : Prof. Dr. Fernandes Simangunsong, S.STP., S.AP., M.Si.

Tata Letak : Muh. Ryan Rahmatul Hidayah

Desain Sampul : Muh. Rivandy Setiawan

Diterbitkan oleh : Penerbit Rtujuh Media Printing
Redaksi : Bumi Panyawangan Real Estate Jl. Garcinia 1, No. 24, Cimekar, Cileunyi
Kabupaten bandung, 40623

Email : r7mediaprinting@gmail.com

ISBN : 978-623-88204 – 1 – 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang memperbanyak Sebagian atau seluruhnya isi buku ini tanpa izin dari penerbit

Dicetak oleh Rtujuh Media Printing

Isi di luar tanggung jawab percetakan

**BUKU LITERATUR
TAHUN 2021**



**PEMBANGUNAN
MODAL SOSIAL**

Penulis : **SUDARMONO, S.STP., M.Si., Ph.D.**
Prodi / Fakultas : **Pembangunan Ekonomi dan
Pemberdayaan Masyarakat
Fakultas Politik Pemerintahan**

INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur yang tidak terhingga kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segenap perkenan, rahmat dan hidayah-Nya sehingga buku literature yang berjudul Pembangunan Modal Sosial ini dapat diselesaikan dengan baik. Dalam kesempatan ini, ijin penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap civitas akademika IPDN, khususnya para rekan sejawat pada Fakultas Politik Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Ide dan gagasan yang dikemukakan dalam buku ini terdiri dari dua topic pembahasan utama. Yang pertama, pembahasan lebih banyak difokuskan kepada aspek teoretis yang diharapkan mampu memberikan pondasi pemahaman bagi para pembaca. Teori-teori klasik dalam wacana modal sosial masih didominasi oleh pemikiran James Coleman, Robert Putnam, Ronald Burt dan Nan Lin serta beberapa nama besar lainnya yang telah mengembangkan teori modal sosial dalam konfigurasi disiplin keilmuan yang lebih bervariasi. Diantaranya adalah Francis Fukuyama dan Hauberer. Dalam konteks Indonesia, pemikiran tentang modal sosial banyak dikemukakan oleh Djamiluddin Ancok, Edi Suharto serta para indonesianis yang berkontribusi besar pada pembentukan diskursus modal sosial dalam konteks Indonesia.

Setelah banyak membincangkan aspek teoretis, buku ini kemudian dilengkapi dengan beberapa studi kasus pembangunan modal sosial pada entitas masyarakat tradisional di Indonesia. Justifikasi pemilihan tipe masyarakat tersebut lebih banyak didorong oleh faktor kohesivitas sosial yang masih tinggi, sebagai syarat mutlak yang harus dihadirkan dalam wacana pembangunan modal sosial. Alasan berikutnya adalah adanya penyesuaian dengan karakteristik wilayah Indonesia yang masih dominan, yaitu sebagai negara agraris (pertanian) dan sebagai negara maritim

(sektor perikanan). Selain itu, perkembangan wacana sosial masyarakat di Indonesia juga mulai mengetengahkan isu-isu gender dalam pembangunan. Oleh sebab itu, peran modal sosial dalam pemberdayaan perempuan juga diangkat dalam pembahasan buku ini.

Dari ketiga entitas sosial tersebut, diharapkan pemikiran mengenai pembangunan sosial data dibangun dengan bagi dan diterima sebagai kerangka pikir bagi Praja IPDN dalam memotret isu sosial kemasyarakatan di lapangan nantinya.

Sebagai dosen yang masih berada pada peringkat awal (*early-career academician*), buku ini tentunya masih memiliki banyak sekali kelemahan. Kelemahan tersebut bisa berarti secara konten dan substansi yang masih tidak mendalam. Selain itu, format teknis penulisan juga mungkin menjadi satu tantangan tersendiri bagi penulis dalam menghadirkan karya akademik yang berkualitas. Oleh sebab itu, penulis masih membutuhkan masukan, kritik dan saran perbaikan bagi melahirkan karya ilmiah yang lebih berkualitas di masa yang akan datang.

Semoga karya ini dapat memberi manfaat bagi pembaca, khususnya bagi satuan praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Jatinangor, 06 September 2021

Penulis,
Sudarmono

DAFTAR ISI

	Hal.
Kata pengantar	i
Daftar isi	iii
BAB 1. Pendahuluan: konsep modal sosial dalam pembangunan	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Mengapa kita memerlukan modal sosial?	4
1.3 Transfromasi modal sosial, dari hubungan sosial yang sederhana menjadi entitas yang sistemik dan kompleks	8
1.4 Kesimpulan	12
BAB 2. Konsep-konsep fundamental modal sosial	13
2.1 Pendahuluan	13
2.2 Konsep modal sosial menurut Bourdieu	15
2.2.1 Umum	15
2.2.2 Modal ekonomi	17
2.2.3 Modal budaya	17
2.2.4 Modal sosial	18
2.3 Konsep modal sosial Coleman	19
2.3.1 Umum	19
2.3.2 Jenis modal sosial	23
2.4 Diskusi konsep	26
2.5 Kesimpulan: dasar-dasar teori modal sosial	26
BAB 3 Konsep-konsep lanjutan dari modal sosial	28
3.1 Konsep modal sosial Robert D. Putnam	28
3.1.1 Umum	28
3.1.2 Elemen modal sosial	29

3.1.3	Karakteristik utama dari modal sosial menurut Putnam	31
3.1.4	Modal sosial menjembatani vs. mengikat (<i>Bridging vs. bonding social capital</i>)	34
3.1.5	Kritik terhadap Konsep Putnam	35
3.2	Konsep modal sosial Ronald S. Burt: Pendekatan jaringan terhadap modal sosial	37
3.2.1	Gambaran umum konsep modal sosial Ronald Burt	37
3.2.2	Lubang struktural (<i>structural holes</i>)	40
3.2.3	Kritik terhadap konsep Burt	41
3.2.4	Kesimpulan	43
3.3	Konsep modal sosial Nan Lin	43
3.4	Konsep modal sosial Francis Fukuyama	48
3.5	Kesimpulan	51
BAB 4	Modal sosial dan pembangunan pertanian: Pembentukan jejaring sosial dalam masyarakat pertanian	56
4.1	Pendahuluan	56
4.2	Modal sosial dalam komunitas petani	65
4.3	Faktor-faktor yang menentukan modal sosial Kelompok Tani	67
4.3.1	Kepercayaan menjadi wujud nyata modal sosial.	67
4.3.2	Jaringan sosial Menciptakan Jaringan Sosial dalam Pembentukan modal sosial	68
4.3.3	Tanggung jawab sosial	70
4.3.4	Norma sosial dan adat istiadat	72
4.3.5	Unsur kerjasama	73
4.4	Pemanfaatan modal sosial dalam pertanian berkelanjutan: Bentuk modal sosial petani	73
4.4.1	Modal sosial berbentuk nilai, kultur dan persepsi	74

4.4.2	Modal sosial berbentuk institusi	75
4.5	Kesimpulan	77
BAB 5	Modal sosial dan pemberdayaan masyarakat pesisir	79
5.1	Latar belakang	79
5.2	Konsep modal sosial dalam konteks masyarakat pesisir	84
5.3	Pengaruh pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir terhadap modal sosial	86
5.4	Pengaruh modal sosial terhadap kesejahteraan	87
5.5	Kesimpulan	94
BAB 6	Modal sosial dan pemberdayaan perempuan	95
6.1	Latar belakang	95
6.2	Pengembangan modal sosial untuk pemberdayaan perempuan	96
6.2.1	Membangun Kerjasama dalam kelompok	96
6.2.2	Intensitas komunikasi dan informasi	100
6.2.3	Menjaga kohesi sosial dan inklusi kelompok	103
6.3	Kesimpulan	105
BAB 7	Pembangunan modal sosial menuju masyarakat yang lebih berdaya	107
7.1	Latar belakang	107
7.2	Kedudukan jaringan kerjasama dalam pemberdayaan masyarakat	109
7.3	Kedudukan dan urgensi modal sosial dalam tatanan kehidupan bermasyarakat	109
7.4	Kesimpulan	113
BAB 8	Pembangunan Modal Sosial Berkarakter Kepamongprajaan	115
8.1	Pengertian Pamong Praja	115
8.2	Penting menguasai jaringan sosial bagi Pamong Praja	116

8.3 Penting menguasai nilai-nilai sosial bagi Pamong Praja	119
8.4 Peranan Pamong Praja dalam Pembangunan, Kemasyarakatan, Pemerintahan, dan Ketatanegaraan	120
8.5 Modal sosial dan Kepamongprajaan sebagai simbiosis	122
8.6 Penutup	124
Daftar Pustaka	125
Biodata Penulis	135

BAB 1

PENDAHULUAN: KONSEP MODAL SOSIAL DALAM PEMBANGUNAN

1.1 Latar Belakang

Bab satu ini menguraikan latar belakang pentingnya memahami konsep modal sosial dalam melihat pembangunan sebagai sebuah proses yang berorientasi kepada penciptaan kondisi masyarakat yang beradab secara sosial, sejahtera secara ekonomi dan melihat alam sekitar sebagai bagian dari kehidupan yang harus dijaga kelestariannya.

Konsepsi masyarakat yang memiliki tatanan sosial yang baik kini dirasakan sangat penting. Harus diakui bahwa pola hubungan sosial yang terbentuk cenderung bergerak kearah terbentuknya masyarakat yang sangat individualis. Azas kolektifitas dalam kehidupan sehari-hari kini mulai tereduksi secara massif sebagai akibat kemunculan masyarakat yang cenderung hedonis yang mementingkan dirinya ataupun kelompok sendiri. Pola-pola yang kapitalis menjadi jejaring yang terbentuk dan menghubungkan setiap entitas sosial dalam masyarakat yang tumbuh secara sporadic dan heterogen. Akibatnya, sulitnya menemukan sikap saling percaya yang seutuhnya dari hati. Sikap saling percaya akan terbentuk seiring sejalan dengan seberapa besar kepentingan suatu kelompok terhadap kelompok lain. Selain itu, sikap yang relative individualis juga dipicu oleh sulitnya menemukan kesamaan dalam suatu masyarakat yang tumbuh secara alami. Fakta yang kita hadapi saat ini adalah bahwa pemukiman penduduk terbentuk tidak secara alami. Mereka bermunculan dalam kurun waktu yang hampir bersamaan. Jika kita menarik ruang waktu ke beberapa dekade yang lalu, suatu kelompok masyarakat terbentuk sebagai alami, saling kenal mengenal dalam satu rumpun keluarga ketetanggaan, sikap saling berempati satu sama lainnya.

Selain memahami konteks sosial suatu masyarakat, dinamika ekonomi masyarakat dalam kaitannya dengan pengembangan modal sosial juga sangat menarik untuk di pelajari lebih lanjut. Pada masyarakat yang bergerak di sector ekonomi agraris seperti Indonesia, sangat mudah menemukan suatu masyarakat dimana hubungan ekonomi yang dilatar belakangi oleh hubungan sosial. Harus diakui bahwa ekonomi berskala mikro pada masyarakat tradisional Indonesia didorong oleh jejaring sosial yang telah tumbuh dalam masyarakat sebelum mereka mengenal hubungan ekonomi yang relative kapitalis. Jejaring sosial ini telah tumbuh secara alami dan bekerja sebagai ‘penyelamat’ di kala kesulitan ekonomi menghadang. Dalam konteks ini, Francis Fukuyama, seorang ekonom politik, pernah berhujah bahwa dengan memanfaatkan modal sosial, seseorang dapat meningkatkan efisiensi dalam kehidupan sehari-harinya.

Satu hal yang paling menarik dan masih banyak ditemui di masyarakat tradisional di Indonesia, yaitu masih adanya kebiasaan untuk ‘mengutang’ di warung. Dengan didasari sikap saling percaya, seorang tetangga dapat ‘minjem’ dulu di warung, dan dapat dilunasi kemudian hari. Bahkan lebih dari sekedar hubungan utang piutang, mereka mewujudkan sikap saling percaya yang sangat kental dengan adanya fleksibilitas membayar utang. Utang kapan saja bisa dilunasi. Selain itu, utang di warung tidak pernah dikenakan bunga. Semuanya berjalan atas dasar saling percaya.

Pemandangan seperti ini kemungkinan sulit kita temui di masyarakat yang tidak saling kenal, sebagaimana yang banyak ditemukan di kota-kota besar, atau bahkan di luar negeri. Semua pola berjalan secara linear: ada uang ada barang. Sistem jual beli yang terbangun relatifnya juga disertai dengan adanya pengeluaran-pengeluaran tambahan, misalnya pajak atau *service fee*.

Modal sosial dapat memberikan dampak efisiensi secara ekonomi. Namun, terdapat pula suatu keadaan dimana modal sosial dapat terbentuk dalam suatu simbiosis yang parasitime atau terdapat salah satu pihak yang dirugikan.

Hampir setiap masyarakat nelayan tradisional di Indonesia menerapkan sistem patron-klien yang eksploitatif. Biasanya, para nelayan tradisional dan kelompok pemodal menjadi sebuah hubungan timbal balik serta berbasis pada argumentasi ‘saling membutuhkan’. Berbagai studi telah mengungkapkan bahwa kemiskinan yang sulit diatasi pada masyarakat nelayan tradisional adalah salah satunya karena mereka terlibat pada hubungan yang tidak sehat. Meskipun demikian, beberapa cendekiawan juga mengungkapkan hal yang berkebalikan. Mereka menilai bahwa hubungan tersebut adalah solusi atas lambatnya sistem jaminan sosial yang dikelola oleh pemerintah. Institusi sosial yang terbentuk di masyarakat tradisional memungkinkan terjadinya penguatan jaringan sosial yang mengindikasikan kuatnya modal sosial di masyarakat tersebut.

Selain dimensi sosial dan ekonomi, kedudukan modal sosial sebagai sebuah potensi jaringan sosial juga dapat ditemukan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Sejak periode Orde Baru, pemerintah Indonesia telah memberikan penghargaan Kalpataru bagi individu-individu di negara ini yang secara sukarela mendedikasikan sebagian (atau bahkan seluruh) hidupnya untuk memperbaiki kawasan yang telah rusak, kawasan yang berpotensi menyebabkan kerusakan yang lebih besar. Sikap seperti ini merupakan inisiatif pribadi yang kemudian menjadi inspirasi bagi lahirnya perilaku-perilaku seperti ini secara komunal. Mereka menjadi inspirasi bagi orang-orang yang awalnya menilai langkah seperti ini sebagai sesuatu yang hanya membuang energi. Sikap yang konsisten seperti pada individu di atas menunjukkan bahwa melahirkan sebuah aksi nyata memerlukan keteladanan guna menumbuhkan kepercayaan kepada orang lain.

Dalam hal kebencanaan, aktivitas penanganan bencana juga dapat menjadi cerminan tentang bagaimana modal sosial dapat menjadi instrument efektif dalam *me-recovery* dampak dari bencana. Dengan kondisi geografi yang terbilang cukup rawan bencana, bangsa Indonesia harus memiliki system deteksi dini kebencanaan berbasis teknologi. Sistem ini akan sangat efektif

dalam mendistribusikan informasi mengenai kemungkinan terjadinya bencana alam berdasarkan fenomena-fenomena iklim. Tentunya, ramalan cuaca adalah sesuatu yang disusun berdasarkan pembacaan gejala-gejala alam secara ilmiah. Hal tidak berkaitan dengan unsur-unsur mitos yang berkembang di masyarakat. Dengan hadirnya teknologi informasi tersebut tidak serta merta akan berjalan tanpa adanya gerakan sosial kolektif dari masyarakat. Potensi modal sosial berupa jaringan sosial semacam inilah yang diperlukan dalam penanganan dampak bencana.

Selain itu, respon yang cepat juga ditunjukkan oleh sekelompok masyarakat yang bekerja secara kolektif membentuk unit-unit kerja sosial dalam menangani dampak bencana. Dalam perkembangannya, individu-individu ini dipertemukan oleh kesamaan sifat yang ingin membantu meringankan penderitaan orang yang terdampak bencana. Sebaik dari mereka juga mengelola kelompok-kelompok sosial tersebut, baik secara kelembagaan formal maupun secara insidental.

Dengan menggunakan pendekatan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), kerangka pikir mengenai pengaruh modal sosial dan peranannya dalam pembangunan akan diuraikan secara lebih terinci.

1.2. Mengapa kita memerlukan modal sosial?

Setelah mendapatkan gambaran umum mengenai peranan modal sosial dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, kita menjadi memahami bahwa karakteristik sosial bangsa Indonesia tidak terlepas dari kuatnya modal sosial yang telah terbentuk secara alami. Modal sosial mereka yang tumbuh dan berkembang dengan sangat baik tidak terlepas dari kedudukan keluarga sebagai 'institusi pendidikan' yang sangat efektif dalam menanamkan sikap sosial dalam menyikapi keadaan di sekelilingnya.

Budi pekerti, sopan santun dan tata karma adalah serangkaian tata norma yang dikenalkan oleh orang tua atau anggota keluarga di rumah. Di mulai dari hal yang paling kecil: bagaimana menunjukkan ekspresi tersenyum di kala masih bayi.

Senyum menjadi bahasa non-verbal yang paling sederhana dan paling mudah dimengerti tentang kemurahan hati. Anak-anak dididik untuk menampilkan ekspresi tersebut, agar mereka merasakan bahwa dengan menunjukkan empati dan kemurahan hati (meskipun lewat senyum sederhana), sesungguhnya kita telah mengirimkan sinyal-sinyal saling menghargai dan saling menanamkan kepercayaan, yang kemudian hari diketahui sebagai prasyarat utama modal sosial.

Pada usia sekolah dasar, anak-anak diajarkan untuk bersosialisasi dengan rekan-rekannya. Sebagian besar di antara mereka bermain secara berkelompok, membentuk jaringan-jaringan kecil sesama mereka. Selain itu, mereka dikenalkan dengan metode 'belajar kelompok'. Dengan pola ini, disadari ataupun tidak disadari, mereka akan terlatih untuk dapat menyelesaikan suatu permasalahan secara kolektif. Mampu menarik sebuah kesimpulan setelah didahului dengan rembuk bersama. Dengan pola ini pulalah, mereka belajar menjadi seorang pemimpin yang baik dan mampu mendengarkan aspirasi dari anggota kelompoknya. Sungguh suatu pola penanaman modal sosial yang sangat baik.

Seiring berjalannya waktu, pembelajaran modal sosial kemudian bergeser ke level komunitas. Dalam hal ini, komunitas dipahami sebagai masyarakat sekitar rumah, rekan-rekan serta guru-guru di sekolah, ataupun keluarga jauh (*extended family*) serta kerabat (*relatives*).

Sistem kekerabatan yang terdapat di masyarakat tradisional Indonesia dapat digolong sebagai system kekerabatan yang kohesif. Sistem ini dapat bekerja dengan sangat efektif dalam mengatasi beberapa persoalan di masyarakat, tanpa perlu melalui proses peradilan atau proses hukum formal lainnya. Tidak jarang ditemukan adanya kasus-kasus konflik horizontal di masyarakat yang dapat diselesaikan secara adat. Di masyarakat di Sulawesi Selatan dikenal suatu tradisi *Tudang Sipulung*. Secara harfiah, tudang sipulung diterjemahkan menjadi 'duduk bersama'. Kegiatan ini adalah suatu kegiatan musyawarah yang

mendudukkan kepala kampung, tokoh masyarakat serta elemen-elemen sosial yang ada di masyarakat. Dalam pengalaman penulis, *Tudang Sipulung* menjadi ritual tradisional yang diformalkan sebagai suatu tahapan penjatingan aspirasi masyarakat di Kab. Pinrang. Para ketua adat, kepala kampung, termasuk unsur aparat Tripika akan duduk dalam satu forum bersama untuk membahas jadwal panen atau jadwal pemanfaatan air irigasi untuk usaha pertanian dan peternakan.

Potret serupa juga dapat ditemukan di pedalaman Papua. Sebagaimana yang kerap disaksikan di media massa, konflik horizontal di tanah Papua masih sering terjadi hingga saat ini. Konflik tersebut mungkin saja melibatkan beberapa kelompok masyarakat tradisional, namun bisa juga melibatkan oknum masyarakat yang ditungangi kepentingan politik identitas melawan pemerintah. Dalam hal ini, konflik biasanya diselesaikan melalui sebuah pesta adat yang dikenal sebagai tradisi 'Bakar Batu'. Sesuai namanya, tradisi Bakar Batu ini dilakukan dengan mengumpulkan bebatuan besar yang digunakan sebagai tungku untuk membakar babi atau dedaunan sebagai sayuran. Hasil pemanggangan dari tungku batu ini akan dikonsumsi sebagai makanan bersama pihak-pihak berkonflik, sekaligus menyimbolkan berakhir perang atau perseteruan dua kelompok masyarakat.

Aksi semacam ini dilakukan dengan dasar saling memaafkan atas kesalahan masing-masing, untuk selanjutnya dapat saling menerima dan hidup rukun berdampingan di dalam masyarakat.

Dari dua contoh kasus di atas, kita dalam merasakan pentingnya modal sosial dalam menata masyarakat. Stabilitas dan tata kelola masyarakat secara tradisional masih menjadi harapan bagi sebagian masyarakat Indonesia, terutama dengan latar belakang kehidupan yang masih tradisional. Penyelesaian konflik mungkin saja dilakukan melalui jalur hukum. Akan tetapi hal ini mungkin menjadi sesuatu yang menguras energi dan pikiran serta

memerlukan pendanaan yang tidak kecil. Jika demikian, mengapa tidak memanfaatkan potensi modal sosial yang ada.

Tentu saja, tidak semua persoalan hukum di tengah-tengah masyarakat dapat dihadapi secara sederhana, sebagaimana diuraikan di atas. Kondisi masyarakat yang sudah semakin terpolarisasi menyebabkan hadirnya berbagai nilai-nilai sosial yang berbeda-beda dalam satu kawasan ruang (*space*). Mereka memiliki tafsiran yang bermacam-macam dalam melihat suatu masalah. Dalam hal ini, kedudukan modal sosial mungkin tidak efektif dalam menyelesaikan suatu masalah. Bagaimanapun, diperlukan pendekatan yang lebih tegas untuk menghadirkan penyelesaian konflik secara tegas dan berkekuatan hukum tetap.

Dengan menggunakan paradigma pembangunan berkelanjutan, kita mengharapkan lahirnya suatu pembangunan yang mendukung setiap aktivitas ekonomi masyarakat, semakin berkurangnya kesenjangan sosial, penataan lingkungan yang lebih baik dan berkelanjutan serta hadirnya kelembagaan pemerintahan yang mampu memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat. Mustahil menciptakan masyarakat sejahtera, dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang stabil tanpa adanya jaminan keamanan dari pemerintah. Begitupun sebaliknya, mustahil menciptakan keamanan apabila kondisi ekonomi tidak stabil, kesenjangan sosial menjadi sangat melebar serta kondisi lingkungan yang rusak dan tercemar.

Modal sosial memainkan perannya yang sangat vital. Tata kelola pembangunan yang berkelanjutan adalah harapan ideal bagi setiap masyarakat. Modal sosial menjadi jembatan yang sangat efektif dalam menghubungkan sub-sub system yang tumbuh dalam masyarakat. Ia adalah instrument yang membaurkan masyarakat yang heterogen, menjadi sebuah entitas yang memiliki persepsi dan pemahaman yang relative homogen. Dengan demikian, proses-proses pembangunan yang dimulai dari tahapan perencanaan hingga pada tahap pengawasan dapat diterima oleh seluruh komponen masyarakat. Mungkin saja hal ini terkesan agak klise, akan tetapi dengan adanya persepsi yang sama mengenai

pembangunan, setiap masyarakat diharapkan dapat menerima hasil pembangunan dan memiliki *sense of belonging* terhadap pembangunan tersebut.

1.3. Transformasi Modal sosial, dari hubungan sosial yang sederhana menjadi entitas yang sistemik dan kompleks

Adalah Lyda Judson Hanifan (1916) yang pertama kali memperkenalkan istilah modal sosial untuk menggambarkan pusat masyarakat sekolah di pedesaan yang menggunakan norma-norma sebagai pengikatnya. Ketika itu, modal sosial belum digambarkan sebagai sebuah struktur yang kompleks dan berkaitan dengan system sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Pedesaan masih lekat dengan ciri masyarakat yang homogen, mudah dipahami pranata-pranata sosial di dalamnya serta relatifnya masih berkarakter patriarki yang kuat. Patriarki inilah yang menjadi sumbu utama yang membentuk norma-norma dalam masyarakat sehingga tatanan sosial dapat berjalan.

Di dalam artikelnya yang berjudul 'The rural school community center (1916) Hanifan menceritakan mengenai kondisi sebuah pedesaan yang mengalami perubahan yang menunjukkan hubungan sosial yang resiprokatif. Setiap bentuk pengeluaran individu atau masyarakat harus mendapatkan imbal balik yang sepadan. Kenyataan yang harus dihadapi adalah bahwa tidak semua kebutuhan dapat dipertukarkan, seperti pola barter. Untuk memenuhi kebutuhannya yang lainnya, individu-individu ini menghubungi keluarganya. Seiring berkembangnya kebutuhan individu, jaringan berbasis hubungan keluarga ini pun menghadapi persoalan yang serupa, yaitu keterbatasan pemenuhan keinginan individu-individu yang berada dalam satu rumpun keluarga. Akhirnya, jejaring ini berkembang lebih luas dengan melibatkan tetangga dan tidak lagi melihat hubungan kekerabatan. Mereka disatukan oleh kebutuhan dan keinginan untuk menciptakan lingkungan yang lebih nyaman. Jika ia dapat melakukan kontak dengan tetangganya, maka akan terjadi akumulasi modal sosial, yang dapat segera memenuhi kebutuhan sosialnya serta memiliki

potensi sosial yang cukup untuk perbaikan substansial kondisi kehidupan secara keseluruhan masyarakat. Komunitas secara keseluruhan akan diuntungkan oleh kerja sama dari semua bagiannya. Individu akan menemukan dalam perkumpulannya keuntungan dari simpati, dan kohesi dengan tetangganya.

Pertama, harus ada akumulasi modal sosial masyarakat. Penumpukan semacam itu dapat dilakukan dengan sosialisasi, piknik, dan berbagai pertemuan komunitas lainnya. Ketika orang-orang dari komunitas tertentu telah mengenal satu sama lain dan telah membentuk kebiasaan datang pada acara-acara hiburan, hubungan sosial dan kesenangan, yaitu, ketika modal sosial yang cukup telah dikumpulkan, maka dengan kepemimpinan yang terampil, modal sosial ini dapat dengan mudah diperoleh. Pada akhirnya, akumulasi modal sosial ini akan bermuara pada peningkatan kualitas layanan umum dan kualitas hubungan sosial dari komunitas yang lebih kohesif (Hanifan, 1916).

Tulisan dari Hanifan ini akhirnya menjadi inspirasi awal yang meletakkan pondasi yang esensial dalam pengembangan kajian modal sosial di tahun-tahun berikutnya. Hal yang serupa juga pernah dikemukakan oleh Jane Jacobs (*The Death and Life of Great American Cities*), sebagaimana dikutip oleh Fukuyama (2005). Di dalam tulisannya, Jacobs menggambarkan dinamika sosial yang terjadi di kawasan permukiman padat Amerika yang memiliki ikatan norma yang lebih kuat ketimbang perumahan yang baru dibangun belakangan. Potret sosial semacam ini kini dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari saat ini. Ketika kita memasuki suatu kompleks perumahan yang baru didirikan oleh kelompok real estate, para konsumen perumahan tersebut tidak memiliki satu kesamaan perasaan. Mereka tidak dibentuk oleh sebuah jaringan yang tumbuh dalam kurun waktu yang lama, melainkan terbentuk secara tiba-tiba.

Selain berkaitan dengan hubungan sosial, jaringan sosial semacam ini juga memberikan manfaat yang sangat besar dalam berbagai kegiatan pembangunan di Indonesia (PNPM Kementerian PU-PR). Modal sosial juga menciptakan ruang-ruang interaksi

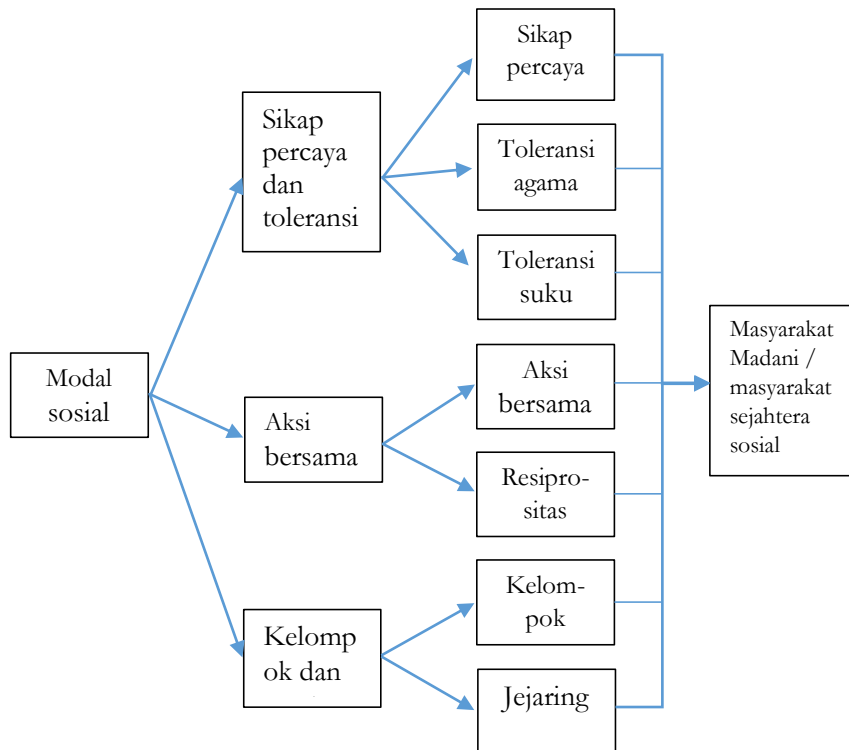
yang lebih demokratis. Proses demokratisasi menjadi lebih terbuka dan lebih hidup. Salah satunya untuk menunjang demokratisasi, dimana masyarakat menjadi mudah mengorganisir diri, membangun jaringan kerjasama dan membentuk kelompok-kelompok pendukung.

Gerakan-gerakan tersebut mustahil berhasil jika tidak memanfaatkan jaringan sosial yang sudah ada kecuali melalui pendekatan-pendekatan yang menyimpangi nilai-nilai sosial seperti money politics. Artinya, jika demokrasi bisa dijalankan di atas jaringan sosial yang ada maka pembangunan dan penanggulangan kemiskinan termasuk PNPM Mandiri Perkotaanpun niscaya dapat berjalan memanfaatkan jaringan sosial yang mengakar di masyarakat sebagaimana telah berlangsung selama ini sejak tahun 1999.

Dari uraian di atas, dapat ditarik suatu asumsi sementara bahwa:

- (1) modal sosial yang kuat berasal dari sebuah proses yang panjang;
- (2) modal sosial melibatkan jejaring-jejaring sosial yang bekerja secara kasat mata untuk memenuhi kebutuhan kolektif amupun kebutuhan individual;
- (3) modal sosial dapat tumbuh dari sebuah hubungan sosial sederhana menjadi sebuah jejaring yang kompleks;

Kompleksitas jejaring sosial dapat kita lihat pada diagram 1 berikut ini.



Sumber: BPS, 2009

Diagram 1: Kompleksitas komponen modal sosial

Diagram 1 di atas menunjukkan bahwa modal sosial tercermin dari adanya 1). Sikap percaya dan toleransi; 2). Aksi bersama dan 3). Kelompok dan jejaring. Tidak dipungkiri bahwa adanya kesamaan ras, kepercayaan dan kesamaan genealogi merupakan sesuatu yang melekat (*embedded*) secara alami dan mencerminkan sebuah identitas. Di Malaysia, kesamaan ras dalam kehidupan sehari-hari adalah suatu variable besar. Kita akan sangat mudah menemukan orang-orang dari etnis Tionghoa yang berjalan secara berkelompok, dimana didalamnya tidak ditemukan etnis melayu atau etnis India. Mereka cenderung sangat percaya kepada sesama etnisnya dibanding memberikan kepercayaan kepada etnis melayu atau pun etnis India. Dalam konteks yang lebih luas, hal ini tentu saja tidak baik dan dapat menyimpan potensi konflik horizontal

apabila tidak dikelola dengan baik. Dengan dilatarbelakangi oleh kesamaan etnis dan agama, sekelompok orang akan lebih mudah membaur satu sama lainnya.

Modal sosial juga bisa tumbuh dan terinspirasi oleh kolektivitas gerakan bersama. Aksi bersama dalam konteks ini lebih diartikan sebagai interaksi timbal balik, sebagaimana yang kita saksikan antara penjual dan pembeli di pasar tradisional. Penjual dan pembeli dipertemukan oleh keinginan memenuhi kebutuhan. Penjual ingin mendapatkan uang sebagai hasil menjual, sementara pembeli ingin memenuhi kebutuhannya yang disiapkan oleh penjual. Secara akumulatif, interaksi mereka akan beralih dengan hubungan yang saling mengenal dan saling dekat.

Akan tetapi, di dalam perkembangannya, aksi bersama seperti ini memasuki babak baru. Dengan maraknya model transaksi e-commerce, para cendekiawan yang memfokuskan perhatiannya ada isu modal sosial ditantang untuk menformulasikan ulang mengenai artikulasi hubungan sosial dalam masa *social distancing* seperti saat ini.

1.4 Kesimpulan

Pemahaman mengenai asal usul lahirnya pemikiran mengenai modal sosial adalah sesuatu yang harus diketahui dengan baik, sehingga setiap orang yang mendalami kajian modal sosial dapat menyimpulkan bahwa modal sosial mengalami sebuah proses yang lama, berlangsung secara alami dan memiliki kompleksitas jaringan sosial yang terus mengamali konfigurasi seiring perkembangan interaksi sosial terkini.

BAB 2

KONSEP-KONSEP FUNDAMENTAL MODAL SOSIAL

2.1 Pendahuluan

Pemikiran mengenai konstruksi konseptual dari modal sosial telah berkembang dengan pesat sejak pertama kali dirumuskan oleh Hanifan pada tahun 1916, meskipun pada kenyataan praktek-praktek menerapkan modal sosial dalam kehidupan sehari-hari telah berlangsung lama. Sejak peradaban manusia telah mengenai tata krama dan etika pergaulan serta norma agama, sesungguhnya manusia telah mempraktekkan apa yang kemudian dirumuskan oleh para ilmuwan bidang sosial dan humaniora yang menekuni kajian tentang modal sosial. Pada Bab Satu, telah diuraikan secara sederhana konsep sehari-hari tentang modal sosial. Guna mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam, maka pada bab dua ini diuraikan beberapa hal yang sifatnya fundamental yang mendudukkan isu modal sosial dalam kerangka pikir yang lebih teoretis. Dari pembacaan terhadap teori modal sosial, diharapkan didapatkan kerangka teori dan kerangka konsep mengenai modal sosial.

Istilah modal sosial mengacu pada kapasitas individu dalam memperoleh materi atau barang simbolis berdasarkan hubungan sosial dan keanggotaan kelompoknya atau dalam kapasitas sejumlah orang untuk mendapatkan manfaat dari tindakan kolektif berdasarkan partisipasi sosial yang mereka lakukan, kepercayaan pada lembaga, atau komitmen untuk menetapkan cara melakukan sesuatu. Kapasitas yang pertama disebut "modal sosial relasional" dan yang terakhir disebut "modal sosial kelembagaan" (Krishna 2000). Elemen umum yang mendasari kedua jenis modal sosial ini adalah keterikatan sosial. Tindakan individu dan kolektif sama-sama dimungkinkan dan dibatasi oleh sumber daya yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku di dalam dan di antara tingkatan struktur sosial.

Seperti konsep pelengkap dari "modal manusia" (pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang diperoleh orang melalui pelatihan dan pengalaman), konsep modal sosial berasal dari analogi antara modal fisik dan keuangan. Modal secara umum mengacu pada aset terbatas yang tersedia untuk mencapai kepuasan dan keinginan di masa depan. Aset modal terakumulasi menjadi saham. Dengan pemanfaatan secara produktif, mereka menghasilkan arus manfaat bagi pemegang aset dan mitra pertukarannya. Aset modal dapat dikatakan sebagai sesuatu yang "dapat dipertukarkan", "dapat dialihkan" (dapat dibawa dari satu tempat atau situasi ke situasi lain), dan "dapat dipindahtangankan" (dapat dialihkan dalam hal kepemilikan). Karena modal sosial hanya sedikit dapat dipertukarkan, dapat dialihkan secara ringan, dan tidak dapat dicabut, beberapa ekonom menolak analogi teori kapital. Betapapun luasnya analogi tersebut, konsep modal sosial menangkap sesuatu yang oleh sebagian besar sosiolog dianggap sebagai sebuah kebenaran — bahwa sumber daya yang tertanam dalam struktur sosial memfasilitasi tindakan individu dan tindakan kolektif, dan menghasilkan aliran manfaat bagi orang, kelompok, dan komunitas.

Bourdieu dan Coleman adalah tokoh pendiri dari teori modal sosial karena mereka memperkenalkan istilah modal sosial secara sistematis untuk pertama kalinya. Meskipun mereka melakukannya hampir bersamaan, mereka memperkenalkan istilah tersebut secara independen satu sama lain, walaupun pada dasarnya, wacana tentang Modal Sosial sudah dikenalkan oleh Hanifan, sebagaimana di bahas pada bab sebelumnya. Hanya saja, hamper semua pakar ilmu sosial yang menekuni teori Modal Sosial lebih banyak merujuk kepada Bourdieu dan Coleman. Di samping itu, pandangan dari Putnam semakin menyempurnakan diskursus mengenai teori modal sosial saat ini. Dalam hal ini, kami bertujuan untuk membahas istilah modal sosial dari akarnya, dan dengan demikian bab ini memperkenalkan konsep Bourdieu dan kemudian konsep Coleman. Kami membahas kedua konsep secara kritis dan

menarik kesimpulan tentang fitur mana yang penting untuk teori modal sosial.

2.2 Konsep Modal Sosial menurut Bourdieu

2.2.1 Umum

Bourdieu mengembangkan konsep modal sosial dimana konsep ini sekaligus menjadi pengalaman sehari-hari dari Bourdieu. Jenis modal ini sangat terkait dengan berbagai bidang kemasyarakatan yang pada gilirannya melekat sebagai bagian dari kehidupan sosial para pelaku (Schwingel 1995). Hal ini menunjukkan bahwa konsep modal sosial tidak dapat berdiri dengan sendiri.

Dalam mendefinisikan modal atau kapital, Bourdieu (1983) mengacu pada istilah ekonomi kapital (lihat Marx 1995). Modal adalah akumulasi tenaga kerja yang terwujud dalam bentuk material atau kombinasi beberapa material yang terkumpul. Pengumpulan ini sendiri tidak berlangsung singkat. Ia terus tumbuh oleh karena modal jenis ini menghasilkan keuntungan, termasuk ketika sedang direproduksi.

Terdapat tiga jenis modal dasar yang melingkupi kehidupan sehari-hari masyarakat. Ketiganya adalah:

- a. ekonomi,
- b. budaya, dan
- c. sosial.

Modal ini dapat diubah satu sama lain dengan menggunakan transformasi tenaga kerja. Barang dan jasa mungkin saja harus diperoleh dengan modal ekonomi, manakala yang lainnya dapat diperoleh dengan menggunakan hubungan sosial atau komitmen sosial tertentu (modal sosial). Jenis modal ini sangat penting karena masyarakat terdiri dari kelompok-kelompok yang berbeda dan memiliki strata ekonomi, budaya dan sosial yang berbeda-beda pula (misalnya, di level intelektualitas di atas, akademisi mungkin memiliki modal budaya yang tinggi karena pendidikannya, dan pada saat yang bersamaan ia memiliki modal

ekonomi yang kecil, sementara pengusaha lebih fokus kepada modal ekonomi daripada budaya).

Di samping itu, struktur distribusi berbagai jenis modal akan berjalan sesuai dengan struktur yang inheren dalam kehidupan sosial sehari-hari masyarakat. Dalam bidang sosial, berbagai jenis modal muncul dalam jumlah yang beragam dan memiliki nilai yang berbeda. Modal yang berkembang lebih pesat akan bergantung kepada penerapannya masing-masing, dan juga bergantung kepada biaya transformasi yang timbul dalam proses konversi dari satu modal ke modal lain (Bourdieu 1983: 183-185, 195-197). Misalnya, dalam bidang ekonomi, uang sebagai bentuk modal ekonomi memiliki efektivitas tertinggi - dapat ditukar dengan barang apa pun - sementara modal pendidikan / budaya tidak dapat ditukar dengan barang apa pun di bidang ekonomi dengan mudah.

Dalam bidang sosial, Kelompok masyarakat ini bertujuan untuk mereproduksi diri mereka sendiri (misalnya, pengusaha ingin mereproduksi kekayaan mereka dan akademisi ingin memastikan aktualisasi mereka dalam dunia pengetahuan terkini). Meskipun demikian, hal ini bukanlah sesuatu yang mudah dilaksanakan. Peluang satu kelompok dalam memenuhi keinginannya bergantung pada kemampuan atau modal ekonomi, budaya, dan sosial mereka. Inilah sebabnya mengapa kelompok tersebut mengembangkan strategi untuk memperoleh barang tertentu secara material dan simbolis. Substansi dari strategi semacam ini bergantung pada jumlah modal (*capital*) yang dimiliki suatu kelompok, khususnya pada volume dan struktur kapital yang harus diproduksi (Bourdieu 1984: 207, 210). Tetapi reproduksi sebagaimana dimaksud di atas hanyalah salah satu kemungkinan kecenderungan perkembangan masyarakat. Aktor individu tertentu juga dapat menunjukkan sikap yang resisten terhadap kecenderungan ini dengan cara diri dari kelompok mayoritas. Namun, kemungkinan terjadinya hal ini sangat kecil (Burchardt 2003: 508; Sobel 2002: 139).

2.1.2 Modal Ekonomi

Dalam pemahaman sehari-hari yang sangat sederhana, modal senantiasa diartikan secara ekonomi. Modal senantiasa berkaitan dengan kegiatan usaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Modal dimaknai sebagai bagian yang sangat fundamental kehidupan ekonomi masyarakat. Senada dengan hal tersebut, Modal ekonomi diartikan secara lebih luas namun tetap berkaitan dengan ekonomi. Modal dapat diubah menjadi uang dengan segera dan langsung. Selain itu, modal ekonomi juga dapat berwujud dalam bentuk yang lain, misalnya asset suatu perusahaan atau suatu bentuk hak milik yang dilembagakan (Bourdieu 1983: 185).

2.1.3 Modal Budaya

Selain modal ekonomi, Bourdieu (1983) juga menempatkan modal budaya sebagai modal dasar yang tumbuh dan dimiliki oleh suatu masyarakat. Modal jenis ini sangat bergantung kepada keadaan suatu wilayah, baik itu didorong oleh latar belakang geografis, latar belakang sejarah maupun analisis yang bersifat antropologis lainnya. Hal ini memungkinkan modal budaya suatu daerah atau negara akan berbeda dengan modal budaya yang berkembang di daerah lainnya.

Meskipun dikatakan bahwa modal budaya di suatu tempat berbeda dengan modal budaya di tempat lain, namun sesungguhnya kedua hal ini dapat digabungkan. Penggabungan dan akumulasi modal budaya membutuhkan proses sosialisasi yang tidak singkat serta waktu untuk mempelajari kesesuaian masing-masing yang tidak sebentar. Bourdieu sendiri memberikan tafsiran mengenai modal budaya dan hubungannya dengan modal ekonomi dengan konteks yang sedikit lebih rumit. Menurut Bourdieu (1983: 186-187), waktu yang diperlukan untuk memperoleh modal budaya merupakan hubungan antara modal ekonomi dan budaya. Ia menyimpulkan bahwa:

“pendidikan akan meningkatkan biaya ekonomi secara langsung (untuk biaya sekolah atau bahan pelajaran seperti

buku) dan secara tidak langsung (masa pendidikan yang lebih lama dikaitkan dengan masuknya ke pasar tenaga kerja nanti dan dengan demikian, sebagai titik awal untuk menghasilkan uang”

Namun demikian, situasi yang paradoksial juga sering terjadi ketika menghubungkan antara tingkat pendidikan yang tinggi dengan peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Akses yang lebih tinggi ke pendidikan menyebabkan lebih banyak orang yang memperoleh gelar tertentu daripada yang dibutuhkan di pasar tenaga kerja. Akibatnya, tidak semua orang yang memiliki gelar ini dapat memperoleh pekerjaan. Kondisi sedemikian ini mengharuskan orang untuk memiliki modal sosial selain modal budaya, sehingga mereka mampu menjalin hubungan dengan calon pemberi kerja yang meningkatkan peluang mereka untuk dipekerjakan.

2.2.4 Modal Sosial

(Bourdieu 1986: 248-249; 1983: 190-191) merumuskan definisi modal sosial sebagaimana berikut:

Social capital is “the aggregate of the actual or potential resources which are linked to possession of a durable network of more or less institutionalized relationships of mutual acquaintance and recognition - or in other words, to membership in a group - which provides each of its members with the backing of the collectivity-owned capital, a 'credential' which entitles them to credit, in the various senses of the word”

(Bourdieu 1986: 248-249; 1983: 190-191).

Secara harfiah, definisi Modal sosial tersebut diartikan sebagai “sekumpulan dari sumber daya aktual atau potensial yang terkait dengan kepemilikan jaringan yang terbentuk dalam kurun waktu yang cukup lama terhadap suatu hubungan yang kurang lebih dilembagakan untuk saling mengenal dan mengakui - atau dengan kata lain, keanggotaan dalam suatu kelompok - yang menyediakan dukungan kolektivitas untuk

masing-masing anggotanya, sebuah 'kepercayaan' yang memberi mereka hak untuk memiliki, dalam berbagai arti kata". (Bourdieu 1986: 248-249; 1983: 190-191).

Dengan demikian, modal sosial merupakan suatu modal yang berbasis kepada hubungan yang memberikan dukungan berguna pada saat dibutuhkan. Hubungan yang stabil menciptakan kehormatan dan reputasi di antara para anggotanya dan, dengan demikian, paling efektif untuk membangun dan memelihara kepercayaan (Bourdieu 1984: 204). Hubungan di antara anggota kelompok ditopang oleh pertukaran materi dan / atau simbolis (misalnya hadiah atau saling menyapa saat bertemu di jalan). Pertukaran ini memperkuat hubungan yang ada dan dapat digunakan untuk menjamin atau melembagakannya secara sosial.

Salah satu pelebagaan modal sosial yang mungkin adalah adopsi nama untuk menunjukkan keanggotaan dalam kelompok khusus, seperti yang dilakukan pada saat pernikahan oleh salah satu pasangan pengantin untuk menampilkan milik keluarga yang dimasukinya. Hal yang demikian ini sangat lazim ditemukan di Eropa dan Amerika. Tindakan lembaga (misalnya upacara pernikahan) digunakan untuk membentuk kelompok (misalnya untuk memperluas keluarga) dan untuk menginformasikan anggota yang berpartisipasi di dalamnya tentang komposisi kelompok (misalnya keluarga dan pasangan pengantin) (Bourdieu 1986: 249). Hubungan pertukaran semacam ini pada akhirnya menghubungkan antara aspek material dan aspek simbolis dari dunia sosial. Mereka perlu tetap terlihat untuk memulai dan memelihara hubungan (Bourdieu 1983: 191).

2.3 Konsep Modal Sosial Coleman

2.3.1 Umum

Di dalam mengembangkan konsep dan teorinya mengenai modal sosial, Coleman menanamkan konteks dan latar teori pilihan rasional (*rational choice theory*). Teori ini didasarkan oleh asumsi adanya saling ketergantungan yang menghubungkan sesama aktor di dalamnya suatu sistem sosial. Hal ini didasari oleh kenyataan

bahwa sumber daya yang tersedia dikendalikan oleh actor lain yang kemungkinan berada di luar dari system sosial mereka.

Coleman juga mengintegrasikan ide-ide Loury (1977, 1987) dan Granovetter (1985) dalam konsep modal sosialnya. Loury (1977, 1987) mendefinisikan modal sosial sebagai suatu hubungan sosial yang dihasilkan dari penggunaan sumber daya untuk memaksimalkan kemanfaatan (*utilities*) sebagai modal sosial. Hubungan ini merupakan representasi dari sumber daya individu yang saling terhubung. Menurutnya, modal sosial merupakan sumber daya yang ada dalam hubungan kekerabatan dan organisasi sosial yang layak. Ini mendukung, misalnya, perkembangan kognitif dan sosial seorang anak dan paling berguna untuk pembentukan modal manusia (Coleman 1995: 389). Granovetter (1985) menunjukkan bahwa melekatnya transaksi ekonomi dalam hubungan sosial sangat penting untuk menghasilkan kepercayaan, dalam menetapkan ekspektasi, dan dalam menciptakan dan menegakkan norma (Coleman 1995: 391; 1988: S97). Singkatnya, sumber daya struktur sosial ini bagi Coleman merupakan kekayaan modal bagi individu (Coleman 1995: 392; 1988: S98).

Coleman kemudian mendefinikan modal sosial sebagai suatu hal yang ditentukan oleh fungsinya. Hal tersebut mengindikasikan bahwa modal sosial bukanlah satu entitas yang berdiri sendiri, akan tetapi ia terdiri dari berbagai entitas berbeda yang memiliki dua karakteristik yang sama: Mereka semua terdiri dari beberapa aspek struktur sosial, dan mereka memfasilitasi tindakan tertentu dari individu yang berada di dalam struktur” (Coleman 1990: 302).

Hal ini menunjukkan bahwa modal sosial selalu merupakan elemen dalam struktur sosial yang mendukung tindakan aktor yang tergabung dalam struktur ini. Dalam pandangan Kriesi (2007:24), hal ini adalah sumber daya khusus.

Modal sosial, sebagaimana bentuk modal lainnya adalah bersifat produktif dan berfungsi untuk memfasilitasi pencapaian tujuan tertentu yang tidak mungkin terjadi jika tidak ada. Artinya,

modal sosial dalam bentuk khusus sangat berharga dalam memfasilitasi tindakan tertentu, tetapi mungkin saja dipahami berbeda atau bahkan berbahaya bagi orang lain (Coleman 1995: 392; 1988: S98).

Ciri khusus dari modal sosial adalah bahwa "tidak seperti bentuk modal lainnya, modal sosial melekat dalam struktur hubungan antara orang dan antar orang" (Coleman 1990: 302). Ia memiliki karakter sebagai barang publik (Coleman 1995: 409). Tidak seperti cara modal fisik dibuat dengan mengubah bahan menjadi alat yang memfasilitasi produksi, dan cara modal manusia dibuat dengan memodifikasi dan meningkatkan keterampilan dan kemampuan orang, modal sosial muncul melalui perubahan hubungan di antara orang-orang yang memfasilitasi tindakan. Itu berarti eksistensi modal sosial hanya dapat dirasakan dampaknya. Ketiga jenis modal ini (modal fisik, modal manusia dan modal sosial) memiliki fakta bahwa mereka memfasilitasi kegiatan produktif yang sama (Coleman 1995). Modal fisik dan modal manusia adalah barang pribadi. Mereka yang berinvestasi di dalamnya menuai keuntungan yang dihasilkan. Tetapi modal sosial tidak memiliki karakteristik ini; itu adalah barang publik. Dengan demikian, tidak hanya pelaku investasi yang memperoleh keuntungan dari modal sosial, tetapi juga pelaku lain yang menjadi bagian dari manfaat struktur sosial (Coleman 1995: 410; 1988: S116).

Struktur sosial memungkinkan terbentuknya norma-norma sosial. Norma tersebut akan menentukan tindakan mana yang dipandang tepat dan benar oleh sekelompok aktor yang dengan sengaja menetapkan atau mendukung suatu norma (Coleman 1995: 313). Sebagai contoh, Jika sekelompok pelaku menetapkan norma tidak merokok di restoran yang terletak di wilayah tempat tinggal kelompok tersebut, eksternalitas negatif yang membahayakan kesehatan orang lain berkurang. Dalam hal ini tidak hanya kelompok yang menetapkan norma tersebut yang diuntungkan darinya, tetapi juga para aktor lain yang tergabung dalam struktur

sosial yang lebih luas. Dari contoh kasus ini kita melihat lahirnya karakter kebaikan publik dari modal sosial sedang bekerja.

Meskipun modal sosial memiliki karakteristik barang publik ini, namun kenyataannya tidak semua orang memberikan kontribusi yang menguatkan eksistensi modal sosial di tengahnya mereka. Beberapa aktor membangun modal sosial (misalnya meminta bantuan dari aktor lain) sebagai tujuan sampingan, sambil tetap konsisten harapan pribadinya untuk memaksimalkan potensi mereka di dalam masyarakat. Interaksi dengan aktor lain dalam proses pencapaian tujuan menimbulkan kewajiban saling membantu (misalnya mengumumkan bantuan di masa mendatang). Untuk memelihara modal sosial, kewajiban yang timbul harus dipenuhi. Tetapi jika perilaku sebaliknya lebih menguntungkan bagi pelaku, tidak didapatkan suatu ketentuan yang sifatnya memaksa mereka untuk memenuhi kewajibannya. Jadi, setiap orang mungkin saja menggunakan keuntungan dari modal sosial yang telah terbangun, akan tetapi tidak serta-merta mereka berkontribusi cukup untuk memelihara jejaring tersebut. (Coleman 1995).

Orang-orang akan terhubung dalam konteks yang berbeda-beda di mana mereka dapat membangun modal sosial. Keuntungan dari hubungan yang kompleks tersebut menunjukkan bahwa sumber daya dari satu hubungan juga dapat digunakan dalam hubungan lain (Coleman 1988). Teman dari klub olahraga dapat membantu aktor untuk mencari pekerjaan, misalnya.

Jika dalam konsep modal sosial yang dikemukakan oleh Bourdieu diketahui adanya tiga jenis modal yang saling terkait, maka di dalam definisi konsep Coleman tentang modal sosial, diketengahkan beberapa faktor yang memengaruhi dinamika modal sosial secara keseluruhan, yaitu ketertutupan, stabilitas, dan ideologi.

Dalam konteks ini, ketertutupan diartikan seperti tidak adanya peluang bagi orang lain di luar struktur untuk dapat masuk ke struktur internal tertentu. Hal ini terjadi apabila hubungan antara semua aktor tertanam secara mendalam. Itu berarti aktor dengan

jaringan yang kohesif memiliki jumlah modal sosial yang lebih tinggi daripada aktor dengan jaringan yang renggang. Setiap jenis modal sosial juga bergantung pada stabilitas struktur sosial atau relasi. Gangguan dalam organisasi sosial atau hubungan sosial akan membawa modal sosial ke dalam situasi yang merenggang. Variabel ideologi juga dapat menjadi sesuatu yang menentukan kualitas hubungan sosial serta dapat membangkitkan modal sosial. Orang yang memiliki orientasi politik yang sama cenderung memiliki kesamaan dalam melihat suatu fenomena sosial.

Selanjutnya, modal sosial dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya, khususnya berkaitan dengan dimensi kesejahteraan. Dalam masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi, negara menyediakan jaminan sosial yang memadai apabila kondisi masyarakat berada dalam keadaan yang tumbuh ancaman sosial di dalamnya. Namun demikian, kondisi ini dapat menimbulkan modal sosial menjadi sedikit merenggang akibat ketergantungan dari orang-orang sekitar akan bergeser kepada ketergantungan kepada negara. Menurut Coleman, situasi yang demikian akan memberikan dampak negatif kepada modal sosial. Modal sosial kehilangan nilai dari waktu ke waktu seperti modal fisik atau manusia. Secara konkret, fragmen hubungan sosial, harapan dan kewajiban kehilangan kepentingan dan norma-norma berakhir (Coleman 1995: 414-417).

2.3.2 Jenis Modal Sosial

Coleman membedakan jenis-jenis modal sosial yang diuraikan di bagian berikut. Modal sosial tetap dalam relasi yang dilandasi oleh rasa saling percaya atau hubungan yang berbasis kepada kewenangan atau otoritas. Sikap saling percaya menciptakan jaringan yang kohesif dan organisasi sosial yang lebih adaptif terhadap keadaan. Jaringan ini dicirikan oleh potensi informasi dan norma yang efektif.

Hubungan Saling Percaya

Hubungan yang dilandasi oleh sikap saling percaya dapat muncul apabila terdapat interaksi timbal balik yang saling menguntungkan. Analogi sederhananya adalah “Jika aktor A melakukan sesuatu untuk aktor B dan mempercayai B untuk membalasnya di suatu hari nanti. Untuk jenis modal sosial ini, kepercayaan dari lingkungan sosial dan jumlah kewajiban yang belum dibayar menjadi sangat penting. Jumlah kewajiban yang belum ditebus di suatu hari nanti akan bergantung pada beberapa faktor, diantara kebutuhan akan bantuan tertentu, sumber bantuan dan tingkat kemakmuran dalam masyarakat. Jika seseorang tidak membutuhkan bantuan atau dapat memperoleh bantuan melalui saluran selain pribadi (mis. dukungan sosial yang dibiayai negara), kemungkinan dia tidak akan bergantung pada hubungan sosial.

Hubungan berbasis kewenangan atau otoritas

Hubungan ini diartikan sebagai terwujudnya pendelegasian urusan tertentu, dimana salah satu pihak berada lebih tinggi dari pihak lainnya. Hubungan ini dapat dianalogikan secara sederhana, yaitu pihak A mengalihkan suatu kewenangan untuk mengendalikan suatu pekerjaan kepada pihak B. Dalam konteks ini, pihak B akan memiliki kekuasaan dalam mengendalikan pekerjaan yang diterima dari pihak A.

Hubungan berbasis kebutuhan akan informasi tertentu (potensi informasi)

Potensi informasi diartikan sebagai adanya manfaat yang dapat diperoleh dari arus informasi yang beredar dalam suatu entitas sosial. Informasi ini akan menjadi petunjuk bagi pihak-pihak yang berada dalam jejaring sosial tersebut guna memaksimalkan setiap tindakan dan upaya dalam mencapai tujuan, baik tujuan personal maupun tujuan bersama. Dalam kondisi tertentu, kebutuhan akan informasi mungkin menimbulkan konsekuensi biaya. Maka, melalui jejaring ini, informasi dapat diperoleh

dengan cepat, mudah dan murah. (Coleman 1995: 402; 1988: S104).

Namun demikian, terdapat pula keadaan dimana informasi tersebut tidak serta merta didistribusikan dalam sebuah jaringan sosial. Seseorang mungkin menjadi sumber informasi bagi orang lain. Namun karena ia hanya berusaha memaksimalkan manfaat informasi itu untuk kepentingan sendiri, maka informasi tersebut tidak didistribusikan (Coleman 1988: S117).

Norma Efektif

Norma yang efektif dapat diartikan sebagai modal sosial yang kuat. Norma ini memfasilitasi atau menjustifikasi atas tindakan tertentu; namun juga menjadi pembatas atas tindakan tertentu lainnya yang dianggap tidak sesuai dengan norma yang dianut (Coleman 1995: 403; 1988: S104-105). Norma memerintahkan suatu pihak untuk mendukung perilaku tertentu untuk kepentingan kolektif dan mencegah pihak lainnya dalam bertindak untuk kepentingannya sendiri (Coleman 1988: S104).

Prasyarat munculnya norma adalah jaringan sosial yang tertutup atau hubungan di antara semua pelaku dalam suatu jaringan (misalnya, pelaku perokok di depan umum dihukum dengan pengecualian) (Coleman 1995: 413).

Organisasi Sosial yang Sesuai dengan konteks tertentu

Organisasi yang didirikan untuk mencapai tujuan tertentu juga dapat dimaksimalkan dalam mencapai tujuan yang lainnya. Organisasi yang bertujuan seperti itu adalah asosiasi sukarela yang memiliki tujuan bersama di lingkungannya. Dengan demikian, keuntungan organisasi tidak hanya berada di tangan para pemrakarsanya, tetapi juga untuk aktor yang tidak berpartisipasi (Coleman 1995: 406-407). Misalnya, asosiasi lingkungan yang mengumpulkan uang dan membangun taman bermain dapat membuatnya dapat diakses oleh semua anak di lingkungan tersebut terlepas dari apakah orang tua mereka adalah anggota asosiasi atau tidak. Dalam hal organisasi tertentu menghasilkan barang pribadi,

maka jejaring ini adalah sejenis modal sosial yang keuntungannya mengalir langsung ke investor.

2.4 Diskusi Konsep

Setelah mempresentasikan ide utama konsep Bourdieu dan Coleman, Häuberer (2011) menguraikan poin kritis dari konsep mereka dan memeriksa potensinya sebagai teori formal. Kedua konsep yang dibahas umumnya mendefinisikan modal sosial sebagai properti hubungan. Ini adalah sumber daya yang dapat digunakan dan diuntungkan oleh para pelaku (lihat juga Kriesi 2007: 24). Bourdieu menunjukkan bahwa modal sosial, jika diperlukan, dapat memberikan dukungan yang bermanfaat dan dapat digunakan untuk menghasilkan serta memelihara kepercayaan. Menurut Coleman, modal sosial merupakan beberapa aspek dari struktur sosial yang berpihak pada tindakan para pelaku. Ia menyoroti bahwa modal sosial yang tinggi terutama bermanfaat bagi perkembangan anak.

Baik itu Bourdieu maupun Coleman, kedua konsep mereka mengeksplorasi pada tingkat mikro (personal) dan tingkat meso (komunal atau masyarakat), namun mereka berfokus pada aspek yang berbeda. Konsep Bourdieu bertujuan pada manfaat yang diperoleh individu melalui hubungan. Artinya, modal sosial dipandang sebagai sumber daya individu (Haunschild 2004: 82; Panther 2002: 159; Braun 2001: 341). Kedudukan individu dalam masyarakat ditentukan oleh jumlah modal (ekonomi, budaya dan sosial) yang mereka miliki (Krätke 2001: 160).

2.5 Kesimpulan: Dasar-dasar Teori Modal Sosial

Konsep modal sosial yang dibahas dari Bourdieu dan Coleman sepakat dalam definisi modal sosial sebagai sumber daya yang tertanam dalam hubungan antar aktor, meskipun mereka dibangun dalam konteks yang berbeda. Inilah definisi modal sosial yang akan kita bahas selanjutnya. Ini berisi dua dimensi utama: jaringan sosial dan sumber daya.

Namun tidak ada konsep yang memberikan teori formal dan dapat dibuktikan seperti yang dibahas dalam pendahuluan. Kedua konsep yang disajikan tidak dapat diuji, karena *pertama*, istilah modal sosial tidak didefinisikan secara jelas dan, dengan demikian, dioperasionalkan secara ambigu dan *kedua*, konsep tersebut tidak mengandung teorema yang dapat diuji secara empiris. Dari sini dapat disimpulkan bahwa kedua konsep tersebut tidak mewakili semua teori modal sosial dan hanya dapat diambil sebagai titik awal untuk membangun teori semacam itu.

Diskusi tersebut menunjukkan adanya gap dari kedua konsep yang harus diisi untuk membangun teori modal sosial.

Menurut Häuberer (2011) Teori modal sosial harus memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Modal sosial bisa berupa barang individu atau publik; Oleh karena itu, modal sosial harus diteorikan pada tingkat mikro dan makro masyarakat.
2. Modal sosial diproduksi dalam struktur terbuka dan tertutup dan hubungan yang dilembagakan dan tidak dilembagakan secara setara. Lebih lanjut, hubungan tersebut memiliki karakteristik yang berbeda: mereka dapat didasarkan pada kepercayaan, otoritas, norma atau organisasi formal dan mengandung potensi informasi yang bersama-sama menjadi dasar untuk akses ke sumber daya yang tertanam. Sumber daya yang tertanam dalam struktur yang berbeda ini dapat menguntungkan tindakan yang berbeda.
3. Efek negatif modal sosial yang terabaikan melalui pengecualian harus dipertimbangkan.
4. Topik bagaimana modal sosial dapat digunakan untuk melawan ketidaksetaraan harus dimasukkan.

BAB 3

KONSEP-KONSEP LANJUTAN MODAL SOSIAL

Setelah mendefinisikan modal sosial dan mengemukakan aspek-aspek pentingnya, bab-bab selanjutnya akan membahas perkembangan lebih lanjut dari konsep modal sosial, yaitu konsep Putnam, Burt, Lin dan Fukuyama. Konsep-konsep tersebut diperkenalkan dan didiskusikan sesuai dengan kemampuannya untuk dijadikan sebagai teori modal sosial.

3.1 Konsep Modal Sosial Robert D. Putnam

Dalam sub bab ini, penulis memperkenalkan konsep modal sosial menurut Robert E. Putnam. Konsep ini dibahas secara kritis guna menunjukkan teorema yang dapat diuji yang terkandung dalam konsep tersebut. Kami menemukan operasionalisasi yang luas dari modal sosial dalam tulisan Putnam.

3.1.1 Umum

Putnam mengembangkan konsep modal sosialnya mengikuti Coleman. Ide utamanya adalah bahwa jejaring sosial mengandung nilai bagi individu. Seperti modal fisik dan manusia, kontak sosial memengaruhi produktivitas individu dan kelompok. Hubungan antar individu membentuk jaringan sosial, norma timbal balik dan kepercayaan (Putnam 2000: 18-19). Ciri-ciri kehidupan sosial inilah yang menjadi pondasi utama dari modal sosial. Mereka memberikan ruang yang lebih luas kepada pihak-pihak yang terlibat untuk bertindak bersama secara lebih efektif dalam mencapai tujuan bersama (Putnam 1996: 66; 1995: 664-665).

Modal sosial juga memiliki hubungan yang erat dengan partisipasi politik. Tetapi partisipasi politik tergantung pada hubungan dengan institusi politik, sementara modal sosial tergantung pada hubungan antar manusia (Putnam 1995: 665).

Menurut Putnam, kualitas masyarakat tertinggi dapat diidentifikasi melalui jaringan hubungan sosial timbal balik yang terjalin erat (Putnam 2000: 18-19). Disinilah letak esensi konsep modal sosial yang dikemukakan oleh Putnam.

Modal sosial mengandung aspek individu dan kolektif. Individu menghasilkan hubungan yang mendukung kepentingannya sendiri. Misalnya, banyak orang tidak mendapatkan pekerjaan yang layak karena rendahnya faktor kualitas modal manusianya, tetapi karena jaringan sosial yang terjalin dengan baik, kemungkinan dia akan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik (Putnam, Goss 2001: 20; Putnam 2000: 20). Di sisi lain, modal sosial menguntungkan bagi negara dan pasar (Putnam, Goss 2001: 19; Putnam 1993: 181). Penelitian Putnam menunjukkan bahwa modal sosial dapat memberikan kontribusi positif kepada terciptanya stabilitas, efektivitas pelayanan publik dari pemerintah serta pembangunan ekonomi (Putnam 1993: 183).

3.1.2 Elemen Modal Sosial

Menurut Putnam, modal sosial akan terus terbangun apabila kepercayaan di dalam hubungan sosial dapat terus bertahan dengan baik. Kepercayaan itu sendiri dihasilkan oleh jaringan yang melibatkan orang-orang di dalamnya.

Kepercayaan

Kepercayaan adalah elemen utama yang memperluas terbentuknya jaringan sosial dalam kehidupan masyarakat (Putnam 2000: 20-21; 1993a: 13). Semakin tinggi tingkat rasa saling percaya dalam suatu komunitas, semakin tinggi pula kemungkinan terbentuknya kerjasama yang baik. Kerjasama itu sendiri akan menumbuhkan kepercayaan. Meskipun begitu, kepercayaan yang diperlukan untuk mendukung kerjasama tidaklah buta. Kepercayaan juga berisi prediksi tentang perilaku pihak-pihak di dalamnya.

Kepercayaan sosial dalam lingkungan modern yang kompleks dapat tumbuh dari dua sumber yang terikat erat: jaringan keterlibatan sipil dan norma timbal balik (Putnam 1993: 171).

Jaringan Keterlibatan Sipil

Kita dapat menelusuri gagasan jaringan keterlibatan sipil kembali ke Alexis de Tocqueville (1835/40). Dia memperkenalkan konsep masyarakat sipil (yang dalam istilah Putnam disebutkan dengan istilah “jaringan keterlibatan sipil”) yang terdiri dari beberapa kelompok dan asosiasi. Artinya, kelompok masyarakat sipil berfungsi sebagai perantara masyarakat. Harapan terpenting tentang masyarakat sipil adalah memastikan sendi-sendi semokrasia dalam sebuah negara dapat bekerja dengan baik. Dengan begitu, asosiasi tersebut akan menjadi ruang pembelajaran demokrasi; mereka mengembangkan jejaring sosial, solidaritas dan partisipasi di antara warga Mereka bekerja memperjuangkan kepentingan bersama.

Jaringan sosial dalam masyarakat dapat terbentuk sebagai jaringan formal atau jaringan informal. Pada awalnya, jejaring ini terbentuk secara formal melalui hubungan kerja yang diatur sedemikian rupa, namun pada akhirnya melebur menjadi sebuah hubungan simpati timbal balik (misalnya persahabatan). Selain aspek ini, jaringan dapat disusun secara horizontal atau vertikal. Jaringan horizontal menyatukan orang-orang dengan status dan kekuasaan yang sama, dan jaringan vertikal bergabung dengan individu yang berbeda dan berada dalam hubungan hierarki dan ketergantungan yang asimetris (Putnam 1993: 173). Jaringan horizontal memfasilitasi komunikasi dan meningkatkan distribusi informasi tentang kepercayaan individu. Mereka memungkinkan mediasi dan peningkatan reputasi (Putnam 1993: 174). Reputasi itu sendiri penting untuk kepercayaan dalam masyarakat yang kompleks (Putnam 2000: 21; 1993a: 13). Sementara itu, jaringan vertikal tidak mampu mempertahankan kepercayaan dan kerjasama sosial. Arus informasi vertikal umumnya kurang dapat diandalkan daripada arus horizontal, karena bawahan menahan

informasi sebagai perlindungan dari eksploitasi. Sanksi yang mendukung norma timbal balik terhadap perilaku egois jarang dijatuhkan pada orang-orang pada posisi yang lebih tinggi dalam hierarki, dan jika dikenakan, sanksi tersebut hampir tidak pernah diterapkan. Hubungan patron-klien, misalnya, mengandung pertukaran interpersonal dan kewajiban timbal balik, tetapi pertukaran tersebut secara vertikal dan kewajiban tersebut asimetris (Putnam 1993: 174).

Norma Timbal Balik (resiprositas)

Di dalam mengembangkan konsep norma timbal balik ini, Putnam mengacu pada konsep norma Coleman yang menyamakan antara norma sosial dengan pengalihan tindakan yang mengontrol hak dari satu pihak terhadap pihak lainnya.

Norma yang menciptakan kepercayaan sosial biasanya akan memberikan dampak berupa pengurangan biaya transaksi dan semakin memudahkan kerjasama di antara mereka. Karakteristik terpenting dari norma-norma ini adalah adanya hubungan timbal balik yang berpotensi memberikan keuntungan bagi kedua pihak, baik itu dengan jumlah yang sama besarnya maupun dalam keadaan dimana salah satu pihak mendapat bagian yang sedikit lebih banyak daripada pihak lainnya. Meskipun demikian, hubungan timbal balik seperti ini umumnya menunjukkan pertukaran barang dengan nilai yang sama. Dalam kasus timbal balik umum, ketidakseimbangan hubungan pertukaran yang berkelanjutan terjadi setiap saat (Putnam 1993: 172). Timbal balik yang umumnya terjadi dapat digeneralisasi berarti bahwa orang akan saling membantu tanpa mengharapkan balasan segera. Norma timbal balik yang digeneralisasikan mengarah pada perilaku untuk saling percaya percaya.

3.1.3 Karakteristik utama dari Modal Sosial menurut Putnam

Di dalam mengembangkan konsepnya tentang modal sosial, Putnam banyak memberikan gambaran mengenai pengaruh atau dampak modal sosial, yang kemudian ia sebutkan sebagai dimensi

‘eksternalitas’ dari modal sosial. Dalam hal ini, penulis menafsirkan definisi ‘eksternalitas’ sebagai pengaruh yang ditimbulkan oleh modal sosial terhadap lingkungan di sekelilingnya.

Putnam menjelaskan bahwa modal sosial mungkin memiliki manfaat eksternal bagi seluruh komunitas di sekitarnya. Seseorang yang memiliki jaringan sosial yang tidak luas akan mendapatkan keuntungan dari beberapa pihak yang sudah terhubung erat. Contoh kasusnya adalah sebagai berikut. Suatu komunitas alumni SMA memiliki kebiasaan berkumpul dan minum kopi bareng di sebuah kedai kopi, tidak jauh dari sekolah mereka dahulu. Selepas menempuh pendidikan SMA, mereka kemudian melanjutkan pendidikan yang berbeda-beda dan akhirnya bekerja di berbagai jenis pekerjaan yang berbeda. Oleh karena disatukan oleh almamater SMA, mereka menganggap bahwa hubungan emosional yang terbangun semasa sekolah tidak dapat hilang begitu saja. Hal ini mendorong mereka untuk menjadikan kebiasaan ngopi pagi sebagai cara melepas kepenatan di lingkungan kerja. Seiring berjalannya waktu, kebiasaan ini pun menjadi peluang keuntungan bagi beberapa orang, yang sebenarnya tidak berhubungan dengan jaringan alumni SMA. Yang pertama adalah pemilik kedai kopi. Mereka mendapatkan pelanggan fanatik yang telah menentukan jadwal minum kopi mereka. Pemilik kedai tidak perlu mengeluarkan biaya promosi untuk menggaet pelanggan. Kedua adalah, tukang parkir di sekitar kedai. Para pelanggan kedai kopi tersebut seringkali memberikan tip lebih kepada petugas parkir yang telah membantu memarkirkan kendaraan beberapa pelanggan kedai kopi tersebut. Sikap santun dan budi baik tukang parkir ini telah menciptakan suasana yang nyaman sebelum orang tersebut menikmati hidangan kopi dari pemilik kedai.

Dengan demikian, modal sosial adalah milik pribadi dan publik. Eksternalitas positif muncul, karena adanya hubungan timbal balik berlaku dalam jaringan sosial yang padat membantu

terbentuknya norma timbal balik yang intens (Putnam, Goss 2001: 21; Putnam 2000: 20-21).

Karakteristik eksternalitas juga dapat ditemukan pada masyarakat yang memiliki hubungan sosial yang rapat. Biasanya, masyarakat seperti ini memiliki tingkat kejahatan masyarakat lebih rendah, karena orang-orang di dalam lingkungan tersebut umumnya saling mengenal. Kerapatan hubungan sosial yang tinggi mendominasi. Dalam struktur ini, perilaku kriminal dapat dijatuhkan sanksi secara efektif, karena setiap orang mengenal setiap orang secara pribadi.

Meskipun demikian, kita juga harus mempertimbangkan fakta bahwa eksternalitas modal sosial tidak selalu positif. Eksternalitas modal sosial juga dapat memberikan dampak yang negative yaitu adanya penolakan atau pengecualian terhadap orang-orang baru yang berada di luar jaringan yang sudah terbangun lebih dahulu (Putnam 2000: 21)

Modal sosial seringkali merupakan produk sampingan dari aktivitas sosial lainnya yang dilakukan oleh para pelaku untuk mencapai tujuan individu. Artinya, para pelaku berinvestasi hanya sebanyak yang diperlukan dalam produksi modal sosial untuk mencapai tujuan individu mereka. Modal sosial biasanya terdiri dari hubungan, norma, dan kepercayaan yang dibawa dari satu situasi sosial ke situasi lain (Putnam 1993: 170; 1993a: 14; lihat juga: Coleman 1995: 410-411; 1988: S116- 117).

Karena sebagian besar bentuk modal sosial adalah entitas moral yang dinamis, maka suplai atau kontribusi setiap anggota terhadap jejaring sosial mereka juga berfluktuasi. Suplai mereka akan meningkat apabila intensitas pemanfaatan hubungan sosial juga meningkat. Semakin banyak orang yang saling percaya, semakin meningkat rasa saling percaya, dan sebaliknya akan menurun apabila interaksi di dalam jaringan juga berkurang (Putnam 1993: 169-170). Persediaan modal sosial bersifat mandiri dan kumulatif. Ketika modal sosial tingkat tinggi berlaku, keseimbangan sosial baru dengan tingkat kerja sama, kepercayaan, timbal balik, keterlibatan sipil dan kesehatan kolektif yang tinggi

muncul. Karakteristik ini menentukan komunitas sipil. Ketidakhadiran mereka menyebabkan penurunan modal sosial (Putnam 1993: 177).

Karakteristik modal sosial berikutnya adalah bahwa modal sosial dapat diatur secara formal maupun secara informal. Yang pertama adalah, misalnya, perkumpulan orang tua dan contoh yang terakhir adalah pertemuan rutin di pub. Dalam kedua kasus tersebut, jaringan muncul di mana hubungan timbal balik terbentuk. Manfaat pribadi dan publik dapat muncul dari hubungan ini (Putnam, Goss 2001: 25; Putnam 2000: 22).

Hubungan modal sosial dapat terjalin rapat, berulang dan intensif seperti misalnya hubungan dengan kolega di tempat kerja atau anggota keluarga, episodik, anonim, seperti hubungan dengan kenalan biasa (Putnam, Goss 2001: 26; Putnam 2000: 22). Hubungan yang kuat menonjolkan frekuensi kontak yang tinggi dan eksklusivitas. Ikatan yang kuat berlaku, jika teman dari satu orang juga berteman. Ikatan yang lemah tetap ada dalam hubungan biasa di mana orang tidak memiliki teman bersama.

3.1.4 Modal Sosial Menjembatani vs. Mengikat (*Bridging vs. Bonding Social Capital*)

Di dalam mengembangkan gagasan tentang modal sosial yang melihat ke dalam jaringan maupun ke luar jaringan, Putnam membedakan antara modal sosial yang menjembatani dan modal sosial yang mengikat.

Modal sosial yang menjembatani akan menyatukan orang-orang yang sangat berbeda dan modal sosial yang mengikat akan menghubungkan orang-orang yang memiliki kesamaan (Putnam, Goss 2001: 28-29).

Modal sosial yang menjembatani lebih nampak ketika modal sosial berperan dalam menjembatani orang-orang dari kelas sosial yang berbeda, sedangkan modal sosial yang mengikat dapat ditemukan, misalnya dalam organisasi persaudaraan atau organisasi agama. Hal itu diarahkan ke dalam kelompok dan

mengarah pada identitas eksklusif dan cenderung memperkuat kelompok yang homogen.

Modal sosial yang menjembatani dapat digunakan untuk menghubungkan antara manfaat yang didapatkan dari luar lingkungan dan untuk menjamin arus informasi tetap terjaga, sementara modal sosial yang mengikat dapat membantu memobilisasi timbal balik dan solidaritas.

Modal sosial yang menjembatani menciptakan beragam identitas dan timbal balik, sedangkan modal sosial yang mengikat memperkuat dirinya sendiri. Ini bukan hanya mengarah pada kesetiaan yang kuat di dalam grup, tetapi juga ke antagonisme yang kuat di luar grup. Modal sosial yang mengikat tampaknya menyebabkan eksternalitas negatif. Tetapi dalam keadaan tertentu, kedua bentuk modal sosial memiliki efek positif yang kuat (Putnam 2000: 23).

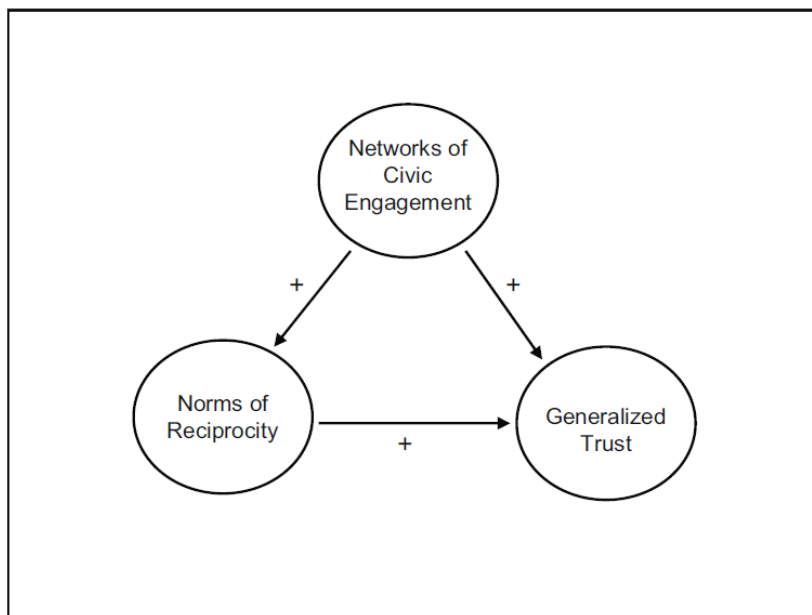
Banyak kelompok mengecualikan orang-orang dari lingkungan sosial tertentu dan termasuk orang lain. Artinya, sebagian besar grup menampilkan karakteristik ikatan dan penghubung pada saat yang sama dan dapat diklasifikasikan sebagai menjembatani atau mengikat dan bukan sebagai salah satu dari keduanya. Gereja Afrika-Amerika, misalnya, mengikat orang-orang dari ras dan agama yang sama, tetapi menjembatani batas kelas (Putnam, Goss 2001: 29; Putnam 2000: 23).

3.1.5 Kritik terhadap Konsep Putnam

Meskipun dipandang sebagai ilmuwan yang berkontribusi sangat besar terhadap perkembangan wacana modal sosial, Putnam tidak luput dari beberapa kritik. Definisi konsep yang dia kemukakan dipandang memiliki sedikit banyak kelemahan oleh beberapa ilmuwan setelah konsep Putnam telah ramai dibincangkan. Secara umum, Putnam mendefinisikan modal sosial sebagai jejaring sosial yang menjadikan kolaborasi antar individu menjadi lebih efektif. Modal sosial adalah sumber daya bagi individu maupun masyarakat. Kepercayaan dan norma timbal balik, dua aspek modal sosial, muncul dari jaringan. Ringkasnya,

konsep Putnam menyatakan bahwa keberadaan modal sosial memungkinkan para pelaku bertindak lebih efektif untuk mencapai tujuan bersama. Modal sosial penting untuk stabilitas politik, efektivitas, dan pembangunan ekonomi.

Meskipun tidak diuraikan secara eksplisit, konsep Putnam menawarkan teorema yang dapat diuji dengan asumsi jaringan kohesif keterlibatan sipil meningkatkan tingkat kepercayaan umum serta penerimaan norma timbal balik. Selanjutnya, norma timbal balik diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepercayaan umum. Hubungan kausal, seperti yang diasumsikan oleh Putnam, ditampilkan pada gambar 2.



Gambar 2: Hubungan Kausal dari Elemen Konsep Modal Sosial Putnam

Bagi penulis, Putnam cenderung mengabaikan aspek kekuasaan dan konflik. Hal ini juga turut dikemukakan oleh Hauberer (2011). Dalam konteks ini, Putnam sepertinya melihat hubungan kekuasaan sebagai suatu yang normative dan positif.

Artinya, kekuasaan akan berjalan secara linear. Namun faktanya, kekuasaan akan terus membentuk konfigurasi baru, mengikut kepada kutub magnet kekuasaan yang bergerak bebas dan tidak linear. Meskipun demikian, Putnam menolak kritik ini dan menganggap modal sosial menjadi pelengkap politik egaliter (Schuller et al. 2000: 10).

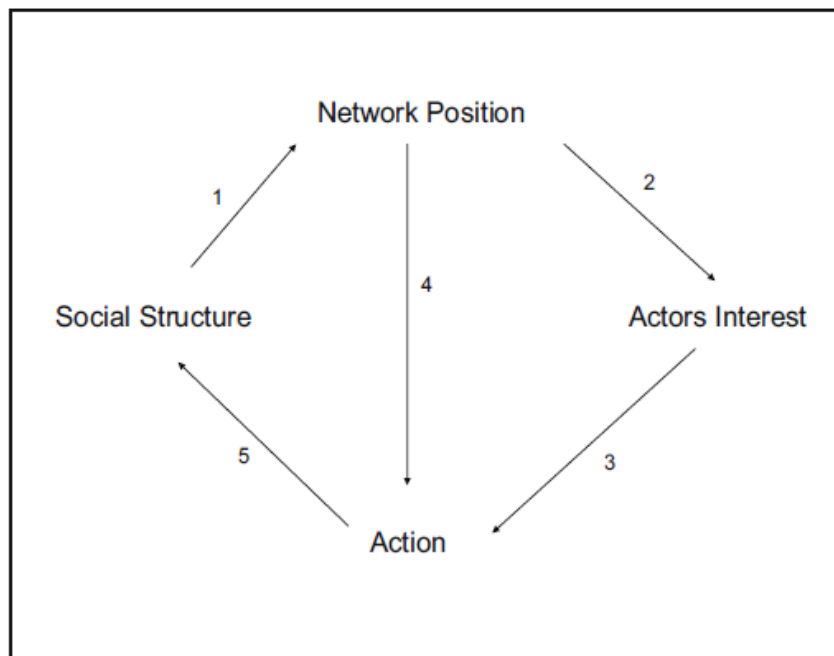
3.2 Konsep Modal Sosial Ronald S. Burt: Pendekatan Jaringan terhadap Modal Sosial

Dalam pembahasan sebelumnya, telah disimpulkan bahwa aspek struktur sosial memiliki pengaruh yang sangat kuat untuk menggambarkan teori umum mengenai modal sosial. Untuk mengenalkan pembaca dengan cara berpikir Burt, penulis memperkenalkan dasar-dasar konsepnya: konstruksi dari teori tindakan dan konsep umum dari jaringan. Jaringan dalam konteks ini adalah jaringan sosial. Kemudian kami akan memperkenalkan konsep structural lubang (*structural holes*) yang mencerminkan modal sosial. Terakhir, kita akan menyimpulkan bagaimana konsep Burt berkontribusi dengan teori umum modal sosial.

3.2.1 Gambaran Umum konsep Modal Sosial Ronald Burt

Burt menanamkan konsepnya modal sosial dalam teori tindakan structural, sebagaimana hal ini juga dilakukan oleh Coleman. Teori ini membuat asumsi tentang seorang aktor yang melakukan aksi sosial. Aktornya dapat berupa unit perseorangan ataupun unit kelompok yang terus bergerak untuk tujuan individu guna memaksimalkan kegunaan mereka. Aktor memiliki sumber daya khusus yang dapat digunakan untuk menentukan mekanisme kerangka kerja, sehingga tujuan dapat dicapai. Kepentingan aktor ditentukan oleh struktur sosial sekitarnya yang berasal dari mekanisme pembagian peran dalam lingkungannya. Dengan demikian, tindakan sosial akan melibatkan beberapa komponen, diantaranya aktor sebagai sumber tindakan; sumber daya dan motivasi. Di antara komponen-komponen ini, muncul hubungan

sebab akibat ditampilkan pada gambar berikut ini. Posisi seorang aktor dalam struktur sosial menentukan perhitungannya (1) dan, oleh karena itu, memodelkan minat aktor (2). Keduanya, kepentingan aktor (3) dan posisi (4), menentukan tindakan sosial itu sendiri memodifikasi struktur sosial (5) (Ruiz 1998: 21).



Note: see Burt 1982: 3

Catatan: lihat Burt 1982: 3

Aktor dicirikan oleh kepemilikan finansial, sumber daya manusia dan modal sosial mereka yang dihasilkan dari posisi mereka dalam struktur sosial. Jenis modal ini adalah sumber daya yang dimiliki para pelaku untuk memaksimalkan utilitas mereka. Modal dapat berupa kemampuan finansial yang dimiliki oleh pelaku, sedangkan modal manusia adalah kombinasi dari identitas alamiah, seperti pesona, kesehatan, atau kecerdasan dan keterampilan yang telah diperoleh dalam pendidikan formal. Berbeda dengan bentuk lain dari modal, modal sosial adalah

substansi dari hubungan diantara dua atau lebih aktor. Menurut Burt, jaringan dapat dilihat di berbagai tingkatan - jaringan individu (jaringan personal), jaringan subkelompok, dan subkelompok yang berbeda-beda dan terhubung sebagai membentuk sebuah sistem terstruktur. Tingkat agregasi ini ditandai melalui dimensi relasional dan dimensi posisi. Berbagai jenis jaringan disajikan pada tabel 2.

Tabel 2: Konsep Struktur Jaringan

	Actor	Multiple actors as a network subgroup	Multiple actors/ sub-groups as a structured system
Relational	Ego-network as extensive, dense and/or multiplex	Primary group as a network clique: a set of actors connected by cohesive relations	System structure as dense and/or transitive
Positional	Occupant of a network position as central and/or prestigious	Status/role – set as a network position: a set of structural equivalent actors	System structure as a stratification of status/role-sets

Note: see Burt 1982: 30

Mengenai dimensi relasional suatu jaringan atau beberapa jaringan, Burt menjelaskan suatu kompleksitas hubungan antar-jaringan yang saling mempengaruhi, baik itu dalam konteks individu maupun sebagai subbagian dari sebuah kelompok. Hubungan dalam jaringan semacam itu dapat dijelaskan menurut tingkatan dan daya jangkauannya, intensitas hubungannya serta kompleksitas urusan antar pihak yang terkait (Burt 1982: 31-32).

Suatu jaringan menjadi padat, jika semua aktor di dalamnya terhubung dengan intensitas hubungan yang tinggi. Kompleksitas urusan dapat menjadi indikator yang menunjukkan sejauh mana aktor tersebut memiliki jenis hubungan yang berbeda dengan aktor tertentu (Burt 1982: 30-32). Hal ini dapat

dicontohkan melalui hubungan pertemanan antara dua individu yang juga merupakan kolega kerja.

3.2.2 Lubang Struktural (*Structural holes*)

Bagian berikut ini akan menjelaskan lebih jauh tentang jaringan, sehingga menjadi sesuatu yang penting untuk memperkenalkan terminologi jaringan. Hal ini disebabkan oleh asumsi bahwa posisi seorang aktor dalam jaringan akan menentukannya besarnya akses ke modal sosial. Dalam hal bahwa masyarakat sebagai sebuah pasar yang memediasi pertukaran segala bentuk barang dan ide, nampak jelas bahwa setiap actor akan sangat membutuhkan informasi untuk dapat mewujudkan pertukaran yang optimal. Jika informasi di pasar tidak lengkap, aktor akan menggunakan struktur jaringan mereka untuk mengumpulkan informasi yang sesuai (Burt 2001b: 31-33, 2001a: 202-204). Dengan demikian, kualitas jaringan akan menentukan kesuksesan di pasar. Umumnya, jaringan bisa tertutup atau terbuka. Penutupan jaringan dapat dilakukan apabila hubungan yang sifatnya kohesif dapat menghubungkan setiap orang secara efektif di dalam jaringan tersebut. Begitupun sebaliknya, jaringan akan terbuka apabila beberapa anggota dalam jaringan tadi memiliki hubungan yang erat dengan seorang actor dari jaringan lain.

Dalam situasi yang terbilang kondusif, manfaat informasi menjadi sesuatu yang sangat diperlukan pada jaringan yang terhubung kemana-mana (terdiversifikasi). Adalah yang tertinggi dan jaringan yang terdiversifikasi. Tidak hanya ukurannya yang menjadi penting, tetapi juga jumlah kontakannya yang tidak berulang (masing-masing actor menciptakan kontakannya sendiri-sendiri dan tidak berulang) (Burt 1992: 16). Menurut Burt, hubungan tersebut akan menjadi mubazir apabila terdapat dua actor yang mengarah kepada satu orang yang sama. , jika mengarah ke orang yang sama dan, oleh karena itu, ke orang yang sama informasi (Burt 1992: 17). Menurut Burt, jika terjadi kontak yang bersifat non-redundance (dua kontak yang tidak mengarah kepada satu objek

yang sama), maka disitulah terbentuk sesuatu yang kemudian dikenalkan oleh Burt dengan istilah lubang struktural (structural holes). Menurut Burt (1992:18), lubang struktural adalah hubungan nonredundansi antara dua kontak dimana masing-masing aktor akan saling mengisi kekurangan (lubang) mereka.

Indikator lubang struktural adalah hubungan yang erat dan kesetaraan struktural (Burt 1992: 18). Seperti yang dijelaskan sebelumnya, kontak akan menjadi sangat kohesif apabila dikaitkan oleh hubungan yang kuat. Misalnya, ada hubungan tertutup seperti ayah dan anak laki-laki atau di antara saudara kandung serta di antara teman dekat. Kekuatan hubungan dapat diukur dengan menggunakan dua pengukuran independen: kontak frekuensi dan kedekatan emosional (Burt 1992: 18). Eratnya kontak menunjukkan kedalaman lubang struktural atau lebih tepatnya seberapa mudah lubang struktural tersebut bisa diuraikan. Selanjutnya, kesetaraan struktural diberikan, jika dua aktor berasosiasi dengan kontak yang sama dan hubungan mereka mengarah pada sumber informasi yang sama (Burt 1992: 18-19).

3.2.3 Kritik terhadap Konsep Burt

Sesuai dengan perkembangan definisi konseptual dari modal sosial saat ini, Burt juga mengartikan modal sosial sebagai entitas yang tersisa dalam hubungan atau jejaring sosial seorang aktor dapat digunakan untuk mengumpulkan "informasi" terhadap sumber daya tertentu. Burt secara khusus menekankan posisi aktor dalam jaringan; aktor perlu untuk terus membuka lubang struktural guna mengumpulkan sebanyak-banyaknya manfaat. Namun demikian, Burt menghadapi beberapa kritik mengenai konsep yang ia kembangkan menjadi kerangka teoretis dari modal sosial.

Pertama, Burt tidak menawarkan teori modal sosial yang diformalkan. Di dalam berbagai literature mengenai modal sosial, tidak ditemukan adanya aksioma yang jelas (real) serta teorema yang konkret. Meskipun Burt tidak merumuskan teorema secara lebih konkret, kita dapat memperoleh gambaran tersebut dari

konsepnya: Dengan merentangkan lubang structural, aktor akan memperoleh keuntungan dengan mendapatkan akses informasi yang lebih awal untuk seterusnya didistribusikan ke dalam jaringan sang aktor. Sehingga, peran broker informasi dalam sebuah organisasi dapat dilihat menjadi sangat penting bagi kelangsungan organisasi.

Kedua, modal sosial selalu diasosiasikan sebagai sebuah struktur jaringan sosial yang kompleks. Namun, Burt sepertinya tidak melihat lemahnya dimensi integritas setiap actor, yang mana justru akan melemahkan jaringan sosial tersebut apabila actor memanfaatkan lubang structural untuk kepentingan dirinya sendiri. Memang harus diakui bahwa Burt tidak membatasi masuknya hubungan formal dan informal di dalam sebuah struktur jaringan sosial. Akan tetapi, Burt mestinya menguraikan segala kemungkinan mengenai terbentuknya jaringan-jaringan baru di luar dari jaringan yang sudah ada.

Ketiga, sebagaimana juga telah tercermin pada kritik kedua, Burt tidak membangun sebuah perspektif yang melihat jaringan / struktur sosial dari sisi luar (ekternal). Terdapat kondisi-kondisi tertentu dimana jaringan sosial menjadi melemah. Dengan semakin melemahnya jaringan sosial, actor-aktor akan membangun jejaring yang baru di luar. Peran broker yang tidak memiliki integritas akan mendorong terjadinya eksploitasi relasi, bukan malah membangkitkan kerja sama.

Keempat, sebagai akibat dari preferensinya untuk struktur terbuka, Burt tidak merujuk terhadap efek negatif dari modal sosial. Seperti dibahas sebelumnya, struktur terbuka mungkin tidak hanya menguntungkan broker tetapi mengarah pada eksploitasi dari orang lain. Dalam hal ini, struktur akan menjadi semakin rawan karena kurangnya kontrol bersama. Efek yang demikian ini tidak diperhitungkan oleh Burt.

3.2.4 Kesimpulan

Burt mengkonseptualisasikan modal sosial sebagai posisi perantara dalam jangkauan jaringan lubang struktural atau kontak yang tidak saling redundan. Dengan menggunakan definisi ini, Burt sepertinya mengabaikan faktor hubungan tertutup di dalam konsepnya. Karenanya, konsep Burt tidak sepenuhnya bergantung pada pengujian empiris. Namun, seluruh pembahasan menunjukkan bahwa tidak hanya hubungan kohesif yang dianggap sebagai sesuatu yang penting, tetapi juga hubungannya dengan ukuran dan jangkauan / keragaman jaringan juga menjadi sesuatu yang sangat penting (lihat studi Higgins 2001; Reagans et al. 2004; Totterdell dkk 2004; lihat juga Burt 1992: 16). Oleh karena itu, pembahasan ini juga dapat digunakan untuk menyempurnakan beberapa konsep-konsep modal sosial terdahulu:

1. Modal sosial adalah aset struktural jaringan yang bersifat pribadi dan barang publik. Hal tersebut muncul melalui hubungan individu atau kolektif dan meluas ke aspek sosial budaya seperti kepercayaan dan norma yang digeneralisasikan timbal balik yang berfungsi sebagai prasyarat dan keluaran modal sosial.
2. Modal sosial akan terus diproduksi dengan baik, terbuka (menjembatani) dan tertutup serta mengikat struktur-struktur yang terbentuk.
3. Dampak negatif yang terabaikan dari modal sosial melalui pengucilan dan eksploitasi harus dipertimbangkan.
4. Topik bagaimana modal sosial dapat digunakan untuk melawan ketidaksetaraan harus dimasukkan.

3.3 Konsep modal sosial Nan Lin

Nan Lin menguraikan konsep modal sosial sebagai jejaring structural yang kompleks dan terbentuk di dalam system sosial yang lebih luas. Gagasan utama Nan Lin dipengaruhi oleh teori klasik modal sosial yang dikemukakan oleh Karl Marx. Nan Lin melihat bahwa kelompok kapitalis (borjuis) menghasilkan nilai yang lebih banyak dengan memanfaatkan buruh (proletar). Mereka

memanfaatkan kelompok buruh sebagai komoditas untuk mempertahankan keberlangsungan kehidupan kelompok borjuis. Dalam konteks yang sedemikian ini, buruh berkedudukan sebagai faktor produksi yang sangat penting.

Dengan berdasar kepada pandangan teori klasik tentang modal ini, maka lahirlah pemikiran tentang *human capital* (Hauberer, 2011). Human Capital dimiliki oleh actor dan dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan. Untuk menciptakan produktivitas yang tinggi, maka diperlukan adanya pendidikan yang melengkapi pengetahuan dan keterampilan dari modal manusia (*human capital*). Sementara itu, actor akan berkedudukan sebagai kelompok investor yang memanfaatkan sumber daya manusia untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik di pasaran.

Namun demikian, struktur sosial yang terbentuk bukanlah sebuah struktur yang kaku dan tertutup. Seiring perjalanan waktu, struktur sosial akan menjadi sebuah ruang yang sangat terbuka dimana terdapat kemungkinan untuk terjadinya mobilitas sosial secara vertikal (misalnya adanya kelompok dari kelas buruh yang menjadi bagian dari kelompok kapitalis). Modal tidak lagi berkaitan dengan proses produksi dan pertukaran saja. Pengembangan sumber daya manusia juga dipandang sebagai alternatif dalam menghasilkan nilai-nilai ekonomi.

Sesuai dengan konsep utama dari teori modal sosial, Nan Lin (2001) juga turut berkontribusi dalam wacana teori modal sosial. Ia mendefinisikan modal sosial sebagai ‘investasi dalam hubungan sosial dengan pengembalian yang diharapkan melalui mekanisme pasar’. Bagi Nan Lin menjelaskan bahwa untuk menghasilkan keuntungan, individu harus terlibat dalam interaksi sosial dan seterusnya akan membentuk jejaring. Jejaring yang akan terbentuk mampu mereproduksi manfaat bagi individu yang terlibat. Dalam hal ini, hubungan sosial serta jejaring tersebut harus mentransmisikan informasi-informasi pasar yang akan membuka peluang bagi didapatkannya keuntungan. Meskipun demikian, mekanisme pasar seringkali tidak terjadi dengan sempurna,

sehingga kedudukan informasi tersebut sangat penting bagi terbukanya peluang untuk mengakses ikatan-ikatan sosial tertentu, sumber-sumber ekonomi baru, lokasi-lokasi strategis dan bahkan hirarki-hirarki sosial yang lebih tinggi.

Seterusnya, Nan Lin juga turut membangun sebuah teori dalam wacana modal sosial. Titik awal pemikirannya adalah berasal dari asumsi bahwa setiap individu memiliki sumber daya pribadi dan sumber daya sosial (jejaring pribadi). Sumber daya pribadi dalam konteks ini adalah pendidikan, pengetahuan atau kekayaan yang sepenuhnya dimiliki oleh individu. Ia dapat memanfaatkannya dengan melibatkan individu lain ke dalam sebuah hubungan sosial, yang dalam istilah Nan Lin disebut sebagai 'kontrak sosial'. Sumber daya sosial dapat diperoleh melalui koneksi sosial sebagai sebuah modal sosial. Sehingga, reproduksi sumber daya pribadi akan terjadi melalui pengembangan hubungan sosial yang memungkinkan dia memperoleh kekayaan yang lebih banyak, pengetahuan terbaru serta reputasi dan kekuasaan.

Sumber daya tersebut dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan actor atau individu, sehingga status sosial akan terus meningkatkan pencapaian hirarki yang lebih tinggi dan akan berimplikasi kepada semakin menguatnya jejaring kepada lingkungan sosial actor yang terlibat. Dengan demikian, Lin merumuskan bahwa 'semakin tinggi hirarki sosial seseorang, maka semakin besar pula konsentrasi sumber daya yang dikuasainya. Perintah dan otoritasnya juga semakin menguat dan kedudukan sedemikian ini hanya dikuasai oleh sejumlah kecil aktor'.

Dalam hal penguasaan terhadap sumber daya, Nan Lin membedakan modal sosial sebagai sumber daya diistilahkan dengan 'ikatan kuat' dan 'ikatan lemah'. Secara sederhana, perbedaan kedua konsep ini digambarkan sebagai berikut:

1. Modal sosial dengan ikatan kuat digambarkan sebagai ikatan sosial yang mengikuti prinsip 'homofili'. Ikatan yang sedemikian ini hanya akan mengikat individu yang memiliki kemiripan yang kuat dengan dirinya. Ikatan ini

menyatukan individu dan membentuk kelompok yang memiliki sumber daya yang relative serupa. Sehingga, kelompok yang terbentuk akan memiliki identitas yang kuat.

2. Modal sosial dalam ikatan lemah digambarkan sebagai ikatan yang menyatukan orang-orang dari berbagai latar belakang sosial dan budaya yang berbeda-beda. Ikatan yang sedemikian ini dianggap lebih baik dalam melayani tujuan-tujuan instrumental (pendekatan massa), sehingga akan selalu ditemukan variasi-variasi baru dan menjadi pengetahuan-pengetahuan baru. Dengan demikian, hal ini akan menjadi sumber daya-sumber daya yang baru.

Dari pemaparan ini, sangat jelas bahwa pesan yang ingin dikemukakan oleh Nan Lin adalah bahwa modal sosial merupakan modal yang sepenuhnya bersumber dari hubungan sosial. Modal sosial adalah sumber daya yang tertanam dalam struktur sosial yang diakses dan dimobilisasi melalui tindakan pusposif yang secara sengaja dilakukan oleh salah satu actor yang terlibat dalam pembentukan struktur dan hubungan sosial tersebut. Definisi ini mencakup tidak aspek fundamental dalam modal sosial, yaitu:

1. Sumber daya yang terdapat dalam rangkaian struktur sosial;
2. Adanya kemungkinan dalam mengakses sumber daya tersebut; dan
3. Pemanfaatan dan mobilisasi sumber daya oleh individu yang terlibat.

Dalam hal ini, Lin mengasumsikan bahwa modal sosial memfasilitasi tindakan untuk tujuan individual. Untuk mengidentifikasi dan mengukur pengaruh tersebut, Lin mengemukakan tujuj proposisi, yaitu:

1. Keberhasilan dalam tidakan berkaitan positif dengan modal sosial.
2. Semakin baik posisi asalnya, maka semakin besar pula kemungkinan pelaku akan mengakses dan menggunakan modal sosial yang lebih baik.

3. Semakin kuat ikatan, semakin besar kemungkinan modal sosial dapat diakses serta akan berdampak positif kepada kemungkinan keberhasilan tindakan.
4. Semakin lemah ikatan, ego individu akan semakin kuat sehingga akan lebih baik untuk tataran tindakan instrumental guna mendapatkan variasi baru dalam kelompok sosial.
5. Orang-orang terdekat adalah penghubung yang efektif dalam mengakses sumber daya, khususnya pada ikatan yang lemah.
6. Kekuatan dalam mengakses sumber daya pada ikatan modal sosial yang lemah akan bergantung kepada kemampuan menggali sumber daya yang dimiliki oleh penghubung.
7. Struktur hirarki terbentuk akan menjadi pembatas bagi akses actor yang berada di struktur sosial terbawah, ataupun struktur sosial paling tinggi.

Modal sosial adalah sumber daya yang tertanam dalam hubungan sosial, sehingga ia dapat menjadi asset structural yang memerlukan kepercayaan dan norma-norma sebagai syarat utama terbentuknya modal sosial, baik itu secara individual maupun secara komunal. Modal sosial juga dapat diproduksi (dan direproduksi) secara terbuka maupun secara tertutup dalam struktur formal maupun struktur informal. Meskipun demikian, kekuatan akses juga menentukan. Biasanya hal tersebut dipengaruhi oleh penguasaan asset ekonomi dan teknologi. Selain itu, asset individual juga dapat memberikan pengaruh, misalnya akses yang didasari oleh sentimen gender, etnis maupun status sosial.

Pada akhirnya, Nan Lin menyatakan bahwa terdapat suatu mekanisme sentral yang mengartikulasi alur sumber daya dan sangat dipengaruhi oleh:

1. Informasi
2. Pengaruh perantara

3. Konfirmasi atas kepercayaan (*trust*), dan
4. Komitmen yang kuat.

3.4 Konsep Modal Sosial Francis Fukuyama

Dalam pandangan Francis Fukuyama, modal sosial diartikan sebagai hubungan sosial yang berkembang dan berhubungan kuat dengan norma-norma informal. Norma-norma yang dimaksudkan dalam konteks ini adalah modal sosial yang berkisar pada hubungan timbak balik (*norm of reciprocity*) di antara dua kolega. Lebih dari hubungan tersebut, norma timbak balik juga berpenetrasi sampai kepada doktrin yang lebih kompleks, seperti agama dan ideologi atau paham pemikiran. Selanjutnya, norma tersebut akan diwujudkan dalam hubungan manusia (*human relationship*) yang lebih real dan lebih factual.

Dwiningrum (2014) menafsirkan pandangan Francis Fukuyama, yaitu bahwa modal sosial merupakan salah satu modal yang sangat penting bagi berfungsinya efisiensi ekonomi modern dan merupakan persyaratan bagi demokrasi liberal ekonomi. Modal sosial menilai bahwa komponen masyarakat modern itu harus menghormati lembaga-lembaga formal, aturan-aturan hukum dan rasionalitas. Membangun modal sosial dapat dipandang sebagai sebuah tugas dalam reformasi ekonomi generasi kedua, tetapi tidak seperti kebijakan-kebijakan ekonomi atau bahkan lembaga-lembaga ekonomu, modal sosial itu tidak dengan mudah dapat diciptakan atau dibentuk melalui kebijakan public. Modal sosial itu harus mengarah kepada kerjasama di dalam kelompok-kelompok dan oleh karena itu berhubungan dengan kebijakan-kebijakan tradisional seperti kejujuran menjaga komitmen mengerjakan tugas secara konsisten (*ajeg*), hubungan timbal balik, dan lain sebagainya.

Fukuyama (1995:10) berpandangan bahwa modal sosial merupakan kemampuan orang-orang bekerja bersama-sama untuk tujuan-tujuan umum di dalam kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi. Modal sosial dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan seperangkat nilai-nilai atau norma-norma informal

tertentu yang saling digunakan di antara anggota-anggota kelompok yang memungkinkan lahirnya kerjasama di antara mereka.

Fukuyama memberikan sedikit revisi mengenai konsep modal sosial itu. Menurut Fukuyama, modal sosial diartikan secara sederhana sebagai hadirnya seperangkat nilai-nilai atau norma-norma informal yang saling digunakan pada sesama anggota kelompok dan memungkinkan mereka terjaring dalam sebuah kerjasama di antara mereka. Selanjutnya, ia juga mengemukakan bahwa modal sosial adalah serangkaian norma informal yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas kerjasama di dalam suatu hubungan antar individu maupun kelompok yang berjejaring.

Dwiningrum (2014) selanjutnya menjelaskan bahwa dunia pendidikan merupakan wadah yang sangat efektif dalam mengembangkan modal sosial. Ia melihat bahwa lembaga-lembaga pendidikan tidak hanya mentransmisikan modal sosial pada level pendidikan dasar maupun menengah, tetapi juga pada level pendidikan tinggi dan pendidikan profesi. Dokter-dokter tidak hanya belajar tentang ilmu kedokteran tetapi juga mereka belajar tentang etika kedokteran dan sumpah jabatan dokter. Dengan berakar pada pemikiran sedemikian ini, beberapa lembaga pendidikan tinggi profesi mengukuhkan persaudaraan mereka dalam sebuah kesatuan korps (*esprit de corps*). IPDN merupakan contoh sangat nyata dimana kesatuan koprs menjadi instrument penting yang mendukung profesionalisme kerja para lulusannya di lapangan. *Esprit de corps* mengikat rasa dan pikiran mereka sebagai sebuah kesatuan utuh yang terus bekerja membentuk jaringan yang sangat kuat.

Fukuyama (1999) merumuskan modal sosial sebagai instrument yang menunjukkan rangkaian norma informal, dimana rangkaian tersebut diperkuat oleh adanya beberapa nilai (*values*). Secara sederhana, keempat nilai tersebut diuraikan sebagai berikut:

Nilai	Gambaran
Universalitas	Nilai tentang apresiasi terhadap kedudukan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang mengabaikan faktor-faktor agama, ras dan perbedaan yang bersifat fundamental
Benevolence	Nilai tentang upaya membantu orang dalam meningkatkan kesejahteraan atau taraf hidup manusia sebagai makhluk ekonomi
Tradition	Nilai yang mengandung penghargaan atas perbedaan tradisi dan budaya tradisional yang mungkin berbeda antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya
Conformity	Nilai yang berkaitan dengan upaya untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan orang lain, termasuk di dalamnya hal-hal yang mengancam keselamatan jiwa, hal-hal yang dapat merusak keharmonisan dalam pergaulan serta upaya untuk senantiasa menjaga stabilitas lingkungan sosial.

(sumber: diolah dari Ancok 2003)

Dengan mencermati uraian dan pandangan Franis Fukuyama di atas, jelas hal tersebut menunjukkan pandangan Fukuyama yang melihat kehadiran nilai-nilai sosial dalam kehidupan bermasyarakat adalah instrument penting dalam menyusun rangkaian modal sosial. Modal sosial ini akan terus dipengaruhi oleh kuat lemahnya nilai-nilai yang terbentuk di dalam kelompok masyarakat tersebut.

3.5 Kesimpulan

Tidak ada yang tahu siapa yang pertama kali menggunakan istilah modal sosial dengan cara yang didefinisikan di atas. Robert D. Putnam mencalonkan L. Judson Hanifan berdasarkan esai pendidik Progresif tahun 1916 tentang pusat komunitas. “Individu tidak berdaya secara sosial, jika dibiarkan sendiri,” Hanifan (1916) mengamati orang miskin pedesaan di West Virginia. “Jika dia berhubungan dengan tetangganya serta dengan tetangga lainnya, maka akan terjadi akumulasi modal sosial, yang dapat segera memenuhi kebutuhan sosialnya. Mereka kemungkinan memiliki potensi sosial yang cukup untuk perbaikan substansial kondisi kehidupan masyarakat secara keseluruhan.

Dua ahli teori sosial kontemporer yang mengembangkan potensi teoretis konsep tersebut adalah Pierre Bourdieu dan James S. Coleman. Bourdieu mengembangkan konsep tersebut secara independen, sementara Coleman menggunakan istilah ekonom dan analisis kebijakan Glenn Loury untuk menunjukkan semua karakteristik keluarga, kelas, dan lingkungan yang memengaruhi investasi aktor dalam modal manusia. Bourdieu dan Wacquant (1992) mendefinisikan modal sosial sebagai sumber daya aktual atau potensial yang berperan dalam "bidang sosial" —yaitu, dalam lingkup "saling mengenal dan mengakui" (hal. 1991). Bagi Bourdieu, masyarakat modern adalah kumpulan dari bidang-bidang yang relatif otonom — misalnya, bidang agama, bidang linguistik, bidang ekonomi, masing-masing dengan logika strategis dan bentuk modalnya sendiri — modal agama, modal linguistik, modal ekonomi, dan begitu seterusnya. Dari jumlah tersebut, yang paling penting, salah satu yang mengerahkan kekuatan terbesar di bidang lain, adalah ekonomi. Memiliki modal sosial yang terbatas pada bidang hubungan sosial langsung, Bourdieu mengabdikan upaya penelitiannya yang luar biasa untuk mempelajari bentuk-bentuk modal lain, khususnya modal budaya.

Coleman (1988) mendapatkan konsep modal sosial dari premis teori pilihan rasional. Berawal dari tempat asumsi para

pelaku yang memaksimalkan utilitas, actor-aktor yang melahirkan sumber daya, masing-masing mengendalikan aset dengan nilai yang berbeda kepada orang lain, Coleman mendirikan bangunan teoretis yang mengesankan yang meluas ke kelompok perusahaan yang saling bergantung (kelompok korporasi). Premis ini mengharuskannya untuk melihat modal sosial sebagai fenomena yang muncul dan tidak disengaja, yang terutama ditemukan dalam struktur sosial yang memiliki sifat yang tertutup. Pemantauan dan pemberian sanksi yang efektif terhadap perilaku tertutup akan membangun kepercayaan antarpribadi, menghasilkan otoritas yang diperlukan untuk tindakan kolektif, dan memungkinkan aktor untuk mengumpulkan sumber daya mereka untuk proyek-proyek baru atau upaya-upaya baru lainnya.

Dua ahli teori modal sosial lainnya yang bekerja dalam kerangka pilihan rasional adalah Nan Lin dan Ronald S. Burt. Keduanya menekankan investasi kesadaran diri para aktor dalam tatanan struktural sosial yang menghasilkan aliran keuntungan yang tinggi bagi diri mereka sendiri dan orang lain. Penelitian Lin berpusat pada cara modal sosial memfasilitasi pencapaian status. Dalam *Social Capital* (2001), dia membuat 12 postulat dan proposisi untuk mengintegrasikan literatur di bidang ini. Burt berkonsentrasi pada konfigurasi jaringan yang memberikan otonomi struktural pada node yang berlokasi strategis, memungkinkan penghuni posisi tersebut untuk menyebarkan informasi dan mengontrol aliran sumber daya. Burt (2002) secara teoritis memperoleh empat mekanisme (penularan, keunggulan, penutupan, dan perantara) yang secara berbeda mempengaruhi modal sosial para pelaku yang terletak di titik-titik yang berbeda. Dengan mengintegrasikan konsep modal sosial ke dalam teorinya tentang lubang struktural, Burt mengajukan proposisi bahwa modal sosial yang tinggi bertambah ke posisi yang menjangkau lubang struktural (didefinisikan sebagai ikatan lemah yang berada di antara jaringan sosial atau sub jaringan sosial).

Berbeda dengan penggunaan istilah di atas, yang berkonsentrasi pada pemberdayaan tindakan strategis atau

instrumental seseorang, ilmuwan politik Robert D. Putnam mengarahkan penelitian modal sosial ke arah kelembagaan, bahkan ke arah komunitarian. Dalam *Making Democracy Work* (1993), ia dan koleganya meneliti efektifitas 20 pemerintah daerah baru yang didirikan di Italia pada tahun 1970. Beberapa dari pemerintahan baru ini dianggap gagal total, sementara yang lain berhasil membuat program partisipatif dan mendorong pembangunan ekonomi. Setelah mengendalikan ideologi politik, penerimaan pajak, dan kondisi lainnya, Putnam menetapkan bahwa prediktor terbaik dari kinerja pemerintah adalah tradisi lokal yang kuat dari keterlibatan sipil, yang diukur dengan sejumlah indikator modal sosial, seperti keanggotaan dalam asosiasi sukarela dan pemilih. Partisipasi dalam pemilu. Dalam *Bowling Alone* (2000), Putnam menerapkan analisis yang sama pada komunitas dan negara bagian Amerika. Dia menemukan bahwa, secara keseluruhan, modal sosial telah menurun secara signifikan sejak tahun 1960. Akan tetapi, negara bagian dan daerah yang mempertahankan tingkat modal sosial yang relatif lebih tinggi lebih cenderung mengalami lingkungan yang lebih aman dan produktif, nilai ujian siswa yang lebih baik, tingkat penghindaran pajak yang lebih rendah, dan tingkat toleransi antarkelompok yang lebih tinggi.

Seperti dalam karya Putnam, studi empiris yang menggunakan konsep modal sosial biasanya melibatkan variabel dependen kinerja atau hasil, indikator modal sosial di tingkat relasional atau kelembagaan (atau keduanya), dan berbagai kontrol. Orang yang diuntungkan oleh modal sosial yang lebih tinggi menemukan pekerjaan yang lebih baik dengan lebih mudah, mengorganisir tuntutan secara lebih efektif, dan mempengaruhi opini publik secara lebih tegas. Mekanisme modal sosial relasional mencakup (1) akses ke informasi, organisasi, atau pejabat publik; (2) pemberlakuan norma-norma yang efektif; (3) pencairan kewajiban interpersonal yang masih ada ("slip kredit"); dan (4) berada dalam posisi untuk memahami kepentingan atau persepsi

yang bertentangan dan dengan demikian solusi perantara dapat diterima oleh berbagai pihak.

Dalam komunitas di mana terdapat tingkat kepercayaan yang lebih tinggi, kerja sama yang erat, dan partisipasi yang lebih tinggi berlaku, variabel hasil yang umum dapat mencakup efektivitas kelembagaan dan adaptasi yang lebih mulus terhadap perubahan kondisi makroekonomi. Mekanisme modal sosial kelembagaan meliputi (1) keterkaitan vertikal antar tingkat struktur sosial; (2) hubungan horizontal (jembatan) antara jaringan sosial setempat; dan (3) dukungan dari lembaga luar dalam merancang solusi jumlah positif untuk masalah aksi kolektif.

Selama tahun 1990-an, penjelasan tentang modal sosial berkembang di bidang ekonomi pembangunan, pengembangan masyarakat, kriminologi, kesejahteraan sosial, dan perbaikan kemiskinan. Banyak dari bidang ini juga melihat kegagalan program yang berpusat pada pasar dan berpusat pada pemerintah untuk memecahkan masalah sosial yang mendesak. Bagi banyak peneliti yang berorientasi kebijakan, modal sosial mewakili perspektif yang membebaskan.

Meskipun konsep modal sosial tampaknya penting bagi sosiologi teoretis dan terapan, namun konsep ini tidak kekurangan kritik. Banyak ekonom menolak analogi teori modal dan meragukan apakah modal sosial dapat menjadi salah satu faktor produksi yang penting. Para ahli metodologi khawatir bahwa terlalu banyak mekanisme yang berbeda yang mendasari efek konsep tersebut, bahwa terlalu banyak indikator yang beragam mengukurnya, dan bahwa efeknya didistribusikan ke terlalu banyak tingkat organisasi sosial.

Mereka menganggap konsep modal sosial sebagai analitis tidak tepat. Beberapa ahli teori pada prinsipnya menolak perbedaan antara modal sosial dan modal budaya. Mereka bersikeras pada konstruksi konseptual bersama atau pada prioritas epistemologis modal budaya. Para ahli teori cenderung ke arah pilihan rasional atau penjelasan jaringan meratapi perluasan konsep tersebut ke dalam ranah makro modal sosial institusional.

Para ahli teori kritis menganggap penggandaan analogi dengan modal sebagai gejala subordinasi intelektual ilmu-ilmu sosial terhadap ideologi borjuis.

Para ahli teori sosial telah lama memahami bahwa sumber daya yang tertanam dalam struktur sosial dapat memberdayakan para aktor (baik individu maupun kolektif) untuk memahami dan mencapai proyek mereka. Dalam modal sosial, mereka menemukan konsep yang lebih berfokus.

BAB 4

MODAL SOSIAL DAN PEMBANGUNAN PERTANIAN: PEMBENTUKAN JEJARING SOSIAL DALAM MASYARAKAT PERTANIAN

4.1 Pendahuluan

Sektor pertanian memberikan kontribusi secara signifikan pada pembangunan ekonomi Indonesia. Pada tahun 2011 misalnya, sektor pertanian berkontribusi sebesar 14,7 % kepada PDB dan menempati posisi kedua setelah sektor industri pengolahan. Pada tahun yang sama, diketahui pula bahwa sebanyak 39,33 persen (tahun 2011) masyarakat Indonesia bekerja pada sektor tersebut, baik pada pertanian pra-panen maupun pada pertanian pasca panen. Kedudukan yang sangat signifikan ini juga ditunjukkan melalui beberapa indikator, diantaranya adalah potensi sumber daya alam yang sangat melimpah, kontribusi sektor pertanian terhadap peningkatan pendapatan nasional yang fluktuatif (cenderung ke arah yang positif), jumlah penduduk yang masih mempertahankan mata pencahariannya sebagai petani atau mereka yang bergerak di sektor pertanian serta pentingnya kedudukan pertanian dalam menopang ketahanan pangan negara. (Saheb dan Zuber, 2013).

Kedudukan yang sangat penting sedemikian ini juga tidak terlepas dengan jejaring sosial ekonomi yang terbentuk sebagai unsur utama dalam pembentukan modal sosial di masyarakat pertanian. Modal sosial telah menjadi aset yang sangat penting dalam kelompok sosial masyarakat yang membentuk sebuah tatanan sosial yang kondusif dalam kurun waktu yang panjang. Kondisi ini masih dapat kita temukan pada masyarakat perdesaan yang kehidupannya masih sangat tradisional, norma serta adat istiadat masih kental serta mobilitas secara komunal dalam

mencapai tujuan bersama. Sebagian besar masyarakat perdesaan yang bekerja pada sektor pertanian akan sangat bergantung kepada jejaring sosial yang terbentuk dari aksi gotong-royong. Mereka juga berinteraksi dan berkelompok dalam sebuah wadah kelompok tani untuk mendapatkan berbagai informasi penting, terutama informasi harga pasar yang digunakan di sekitar jejaring mereka.

Dalam kurun waktu yang lebih lama, modal sosial membawa manfaat yang sangat penting bagi masyarakat pertanian, khususnya dalam membentengi tatanan sosial masyarakat yang peduli terhadap sesama, berupaya secara bersama-sama untuk mewujudkan perbaikan ekonomi keluarga serta saling tolong menolong terutama dalam kondisi pandemi seperti saat ini. Sepeerti halnya sektor-sektor lainnya yang terdampak akibat pandemic, sektor pertanian juga mendapatkan akibat buruk dari dengan mobilitas pasar hasil pertanian yang semakin terbatas pergerakannya. Salah satu akibat yang dirasakan adalah produksi pertanian menjadi terganggu karena terbatasnya kegiatan usaha tani, penjualan hasil petanian, rantai pasongan pupuk, kesehatan petani, tenaga kerja pertanian. Dalam kurun waktu yang lebih lama, pandemi sangat berpeluang untuk mengubah arah dan bentuk dari modal sosial yang sudah terbentuk di masyarakat. Aktivitas berkelompok dan bergotong royong serta dilakukan secara terbuka mungkin saja akan mengalami perubahan bentuk di mana masyarakat tidak lagi terbiasa dengan berkegiatan secara berkelompok di ruang terbuka. Interaksi dengan para penyuluh pertanian juga bisa saja berubah sebagai akibat pembatasan gerakan dalam bekerja. Hal ini dikhawatirkan akan terus melemahkan modal sosial yang sudah terbentuk. Pada akhirnya, pembangunan sektor pertanian akan mengalami perubahan ke arah yang kurang baik: kepedulian petani menjadi berkurang, jejaring sosial terbentuk lagi secara langsung, akan tetapi bisa saja dipengaruhi oleh pemanfaatan teknologi virtual; hanya memikirkan dirinya sendiri dan tidak mau berinteraksi serta enggan untuk membagi informasi dengan petani yang lainnya.

Sehingga, kelembagaan kelompok tani akan mengalami perubahan bentuk dan pola interaksi sosial di dalamnya.

Dengan melemahnya modal sosial di masyarakat pertanian maka akan merusak sektor pertanian mulai dari sektor hulu sampai hilir. Kerugian yang dialami sektor pertanian, khususnya petani adalah distribusi yang berada di luar kendali para petani. Data FAO (FAO, 2018) menunjukkan bahwa sekitar 93% dari pelaku di sektor pertanian di Indonesia adalah tergolong dalam kategori petani kecil (*smallholder farmers*). Sementara itu, data atlas ketahanan pangan (FSVA) pada 2018, diketahui bahwa potensi terjadinya kerawanan pangan di berbagai daerah kabupaten kota di Indonesia masih sangat besar. Dengan demikian, kondisi yang semakin buruk diprediksi akan terjadi pada periode Covid-19 dimana jumlah daerah dengan kondisi yang rawan pangan akan terus bertambah. Kondisi ini akan menjadi tantangan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah untuk memperbaiki distribusi pangan secara merata dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat di saat pandemi covid 19.

Pelemahan modal sosial diprediksi akan terjadi sebagai akibat pergerakan yang terbatas. Seharusnya petani bisa bekerja sama, berinteraksi sosial, gotong royong dan kegiatan kelembagaan atau kelompok. Akan tetapi, dengan kondisi seperti pandemi ini mereka tidak bisa bekerja secara leluasa. Pada akhirnya, produksi pertanian dan pangan di Indonesia semakin sulit untuk diperbaiki akibat modal sosial yang terbentuk juga mengalami penyempitan pergerakan tiap-tiap unsur yang menyusun modal sosial. Putnam (2000) menjelaskan bahwa bangsa yang memiliki modal sosial tinggi akan cenderung lebih efisien dan efektif menjalankan berbagai kebijakan untuk menyejahterakan dan memajukan kehidupan rakyatnya dan begitu juga sebaliknya. Masyarakat yang memiliki modal sosial tinggi akan membuka kemungkinan menyelesaikan persoalan dengan lebih mudah. Hal ini memungkinkan terjadi pada masyarakat yang terbiasa hidup dengan rasa saling mempercayai yang tinggi.

Uraian ini menunjukkan kepada kita bahwa modal sosial harus terus ditingkatkan. Pola interaksi sosial dalam masyarakat pertanian harus diperbaharui mengikuti pola interaksi sosial serta tatanan sosial yang baru yang terbentuk sebagai akibat pandemic Covid-19.

Selain konteks mikro (meliputi hubungan dalam kelompok tani), kita juga perlu memahami konteks pembangunan pertanian di Indonesia. Pada umumnya, pembangunan sektor pertanian berada pada persilangan ‘aspek produksi massal secara ekonomi’ dan ‘aspek penguatan institusi sosial yang masih tradisional’. Perspektif tersebut terbangun dalam tradisi teori modernisasi serta teori-teori turunannya. Teori-teori ini berasumsi bahwa negara-negara industrialis yang memiliki kekuatan ekonomi serta menghasilkan barang-barang industri dapat menukarkan hasil-hasil pertanian yang diproduksi oleh negara-negara berkembang akan menciptakan pemerataan dan kesejahteraan dunia (Ketaren, 2015). Namun fakta yang dapat diamati sehari-hari adalah bahwa harapan ini tidak terjadi. Malahan, negara berkembang harus mengeluarkan biaya yang lebih besar mengingat harga barang-barang industri ternyata lebih mahal bila dibandingkan dengan barang-barang pertanian. Hal demikian juga terjadi dengan penerapan teori modernisasi di negara-negara berkembang. Impian untuk menjadi negara industri dengan tahap-tahap prasyarat yang ditentukan ternyata tidak mampu diwujudkan dan hanya menjadi impian belaka (Ketaren, 2015).

Revolusi hijau pernah menjadi patron utama pembangunan pertanian di Indonesia. Konsep dasarnya adalah dengan mengenalkan modernisasi dan mekanisasi pertanian rakyat dengan mengacu kepada program intensifikasi pertanian tanaman pangan. Beberapa teknologi baru berhasil dikenalkan melalui program ini, sebagaimana telah dikenalkan pula di negara-negara Amerika Latin dan negara Asia lainnya (Tjondronegoro, 1998:282). Sebagai penjabarannya, beberapa kebijakan tindak lanjut disusun oleh pemerintah Indonesia. Beberapa program didesain sepenuhnya oleh “pengusung” revolusi hijau, yang akhirnya banyak mendapat

kritikan tajam dari ahli pertanian. Tidak dapat dipungkiri bahwa swasembada pangan yang pernah diraih oleh pemerintah Indonesia toda terlepas dari pemberlakuan Revolusi Hijau di Indonesia (1984). Hanya saja, kebijakan revolusi hijau juga telah menjadi boomerang bagi pembangunan pertanian, khususnya berkaitan dengan kualitas lingkungan yang banyak dirusak oleh penggunaan pupuk secara berlebihan sebagai upaya mencapai swasembada pangan (Hanani, 2003:32).

Setelah mengenal mekanisasi melalui revolusi hijau, berbagai pengetahuan masyarakat petani yang telah dipegang secara turun temurun dianggap tidak lagi relevan dengan kondisi pembangunan pertanian yang lebih modern. Etah disadari atau pun tidak disadari, perlahan-lahan revolusi hijau telah menghancurkan kearifan lokal masyarakat mengenai pertanian rakyat. Modernisasi yang dikenalkan oleh pengetahuan modern telah mengubah cara pandang masyarakat dan bahwa membongkar pengetahuan lokal masyarakat dan menganggap bahwa efisiensi jauh lebih penting dibanding mempertahankan pola lama. Perlakuan yang bijak terhadap alam cenderung dikesampingkan dan tidak lagi melihat kepada keseimbangan alam yang sepatutnya disadari oleh ilmu pengetahuan yang dianggap lebih modern. Namun faktanya, pembanguana pertanian menjadi tidak *sustainable*.

Gambaran yang nyata dari penetrasi pengetahuan modern adalah pada praktik pertanaman campuran, pengetahuan tentang lingkungan hidup yang lebih lestari serta penyesuaian antara komoditi dengan karakteristik alam dan karakteristik sosial masyarakat setempat. Sepatutnya, pendekatan kolaboratif adalah pola pendekatan yang dikedepankan oleh pengusung revolusi hijau. Dengan pendekatan kolaboratif, masyarakat tradisional tidak serta merta akan meninggalkan pola-pola mereka yang lebih adaptif dengan lingkungan yang mereka tempati. Teknologi-teknologi juga dapat dibentuk dengan pendekatan yang lebih ramah lingkungan, misalnya dengan mengenalkan pola-pola pertanian organik yang ramah lingkungan dan lebih mendukung pada keamanan pangan.

Pada dasarnya, pendekatan ethnografik dapat menjadi solusi dalam pengembangan pembangunan pertanian yang lebih kohesif dengan situasi dan kondisi masyarakat. Pendekatan ethnografik dalam konteks ini adalah lebih kepada melakukan penyesuaian antara teknologi modern dan pengetahuan lokal masyarakat serta potensi-potensi sosial yang sudah bertahan sejak lama. Pendekatan ini juga akan mengubah cara pandang tradisional masyarakat tersebut untuk secara perlahan-lahan mulai mengenai pola-pola modernisasi serta mekanisasi dalam pembangunan pertanian.

Salah satu komponen penting yang perlu ditelusuri lebih jauh adalah berkaitan dengan potensi sosial yang sudah bertahan dalam masyarakat. Dalam konteks ini, penulis berpandangan bahwa modal sosial dalam masyarakat pertanian adalah hal yang mutlak diperlukan dalam membangun pertanian rakyat. Mereka telah merekatkan diri mereka dalam norma sosial, jejaring sosial serta hubungan resiprositas yang berlangsung secara turun temurun.

Perjalanan panjang pembangunan pertanian di Indonesia hingga saat ini belum menunjukkan hasil yang maksimal. Pembangunan pertanian belum memberikan implikasi yang signifikan terhadap tingkat kesejahteraan petani, serta masih rendahnya kontribusi sektor ini pada pendapatan nasional. Kondisi ini tidak terlepas dari intensifikasi yang mendorong penggunaan pupuk secara berlebihan guna mengejar target produksi di masa lalu. Pada akhirnya, penurunan kemampuan lahan yang drastis serta ketatnya persaingan global menyebabkan sektor pertanian, lebih khusus kepada petani kini semakin terpuruk.

Pembangunan sektor pertanian memerlukan penanganan multistakholder dan tidak mungkin dapat berhasil apabila tidak diatur dengan seksama berbagai komponen yang mendukung pelaksanaannya. Tanah sebagai faktor produksi pokok pertanian memegang peranan penting dalam meningkatkan produksi sektor pertanian. Hal ini tidak hanya berkenaan dengan kualitas secara fisik, akan tetapi juga berkaitan dengan penguasaan asset-aset

strategis di Indonesia. Oleh karena penguasaan tanah di Indonesia terkesan tidak berpihak kepada pembangunan pertanian, maka kesejahteraan petani seolah-olah menjadi hal yang mustahil diwujudkan. Sektor pertanian terbukti tidak memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan petani sehingga harus dilakukan pembaharuan. Di sisi lain, mahalnya biaya operasional pertanian (pengolahan tanah, pembibitan pupuk dan penggunaan pestisida) semakin memperparah kehidupan petani.

Di dalam penelitiannya, Mubyarto (sebagaimana dikutip oleh Hanani, 2003; 34) mendapati kebijakan pembangunan pertanian di Ponorogo yang dilakukan dengan mengenalkan secara massif teknologi pertanian, termasuk penggunaan pupuk, pestisida, bibit unggul dan pengolahan tanah terbukti tidak memberikan implikasi yang nyata kepada petani, khususnya bagi petani yang memiliki lahan yang sempit. Akses kepada sumber-sumber yang menopang pengembangan pertanian cenderung didominasi oleh petani-petani yang memiliki luas lahan yang lebih besar. Hal ini tentunya mengindikasikan penguasaan capital yang lebih besar, termasuk pula penguasaan kepada akses pasar. Namun, secara ekonomis mereka (termasuk petani pemilik lahan yang luas) tidak mengalami perubahan meski tingkat akses mereka terhadap teknologi cukup tinggi. Bahkan, dalam beberapa keadaan ternyata perilaku petani dalam memandang teknologi bukan sebagai alat untuk meningkatkan produksi tetapi hanya menjadi simbol status. Kondisi ini semakin memperparah mental petani, belum lagi sumber daya yang hilang maupun rusak akibat kesalahan pengelolaan. Hasil yang sama juga diperlihatkan oleh Tjondronegoro (1998:287). Petani yang mampu mengadaptasi program ini adalah petani yang memiliki lahan luas sedang petani yang berlahan sempit tidak mampu bahkan menyewakan tanahnya dan menjadi buruh tani atau melakukan urbanisasi.

Temuan penting juga diketengahkan oleh Clifford Geertz. Melalui penelitiannya di Pulau Jawa (di sebuah kota yang idsamarkan dengan sebutan Kota Mojokuto), ia memberikan gambaran bahwa pembangunan pertanian yang dilakukan selama

ini tidak sedikit pun memberikan nilai tambah bagi petani. Pertanian telah mengalami involusi dan pembagian kemiskinan (*shared property*) yang tidak disadari. Kondisi tersebut dengan adanya mekanisme pertanian semakin menyingkirkan para buruh tani dari akses pembagian keuntungan. Jatah mereka mulai dari memanen padi hilang karena jenis padi yang ditanam tidak lagi memerlukan ani-ani (pemotong padi manual) namun dikerjakan dengan mesin perontok yang hanya perlu sedikit tenaga.

Lebih lanjut Ketaren (2015) menjelaskan secara terperinci hasil penemuan Geertz tadi, bahwa hadirnya *huler* di pedesaan juga menghilangkannya pekerjaan satu-satunya petani desa. Kebiasaan me-nutu (menumbuk padi) menjadi hilang dan digantikan dengan mesin yang tidak mungkin memakai tenaga mereka. Sedikit demi sedikit telah terjadi pergeseran di pedesaan dan semakin menambah jumlah tenaga kerja yang menganggur.

Menyikapi keadaan di atas, beberapa LSM kemudian secara berkelompok bergerak mendukung beberapa kelompok-kelompok masyarakat tani untuk menghidupkan kembali model pertanian yang lebih ramah lingkungan dan mampu meningkatkan kesejahteraan petani tanpa meninggalkan pengetahuan masyarakat desa yang telah mereka miliki. Saat ini sudah banyak kelompok-kelompok pergerakan sosial yang mengatasnamakan gerakannya sebagai upaya menghidupkan kembali pertanian berkelanjutan, atau pun pertanian organik. Sebagian dari mereka juga bergerak dengan menggunakan prinsip kewirausahaan sosial (*socio-preunership*) berbasis pertanian produksi. Sampai saat ini, muncul kelompok-kelompok tani yang mengusahakan penanaman jenis padi lokal, menggunakan pupuk alami (hijau) dan pengolahan tanah dengan menggunakan budaya leluhur. Walau pada mulanya kegiatan ini adalah sebagai bentuk perlawanan masyarakat terhadap program pemerintah di bidang pertanian (revolusi hijau), tetapi lama-kelamaan, karena hasil produksinya yang semakin meningkat dan mampu mensejahterakan petaninya mengakibatkan semakin banyak petani yang tertarik untuk melakukan pertanian dengan sistem ini. Saat ini, model pertanian yang dimaksud

dinamakan oleh masyarakat petani dengan nama sistem pertanian organik.

Hanya saja, pengelolaan system pertanian organik ini memerlukan intervensi pengetahuan yang lebih terbaru. Di sisi lain, lambatnya proses produksi mungkin saja menyebabkan timbulnya asumsi-asumsi yang membanding-banding produksi non-organik yang lebih cepat. Hal ini dikhawatirkan mengganggu mentalitas pelaku sektor pertanian organik yang baru saja memulai aktivitas mereka. Di samping itu, ketersediaan lahan juga mungkin menjadi persoalan. Meskipun sebagian telah mengenalkan *vertical gardening*, namun kondisi ini tidak *compatible* untuk dikembangkan di beberapa tempat.

Persoalan lainnya adalah berkaitan dengan pemeliharaan dan pemasaran hasil produksi pasca panen. Pertanian organik tidak dapat dilaksanakan di sekitar pertanian yang masih menggunakan konsep pertanian revolusi hijau¹ sebab hama penyakit dapat dengan mudah berpindah dan menyerang pertanian organik. Lahan pertanian yang hendak ditanami, juga tidak langsung dapat menghasilkan produksi yang baik sebab tanah yang digunakan masih sangat tinggi mengandung pestisida dan pupuk buatan dari program revolusi hijau, sehingga diperlukan waktu untuk menjadi tanah yang cocok untuk pertanian organik. Pada pemeliharaan pun masih menghadapi masalah karena banyaknya hama dan tidak tersedianya musuh alami dari hama tersebut. Terakhir, dari pemasaran. Masyarakat yang tertarik untuk mengkonsumsi beras

¹ Pada tahun 2019, penulis memiliki banyak interkasi dengan seorang petani yang berasal dari Jepang dan mendedikasikan dirinya untuk bekerja sebagai penggarap sebagian lahan pertanian milik IPDN. Keberadaan beliau tidak terlepas dari skema kerjasama antara IPDN dengan OISCA Japan terkait pelatihan pertanian bagi praja IPDN. Di beberapa pertemuan, ia selalu menyampaikan bahwa salah satu faktor yang paling menghambat aktifitas pertanian dia adalah karena adanya penggunaan pupuk secara berlebihan pada lahan yang ia garap pada saat ini. Sehingga, hal pertama yang dia lakukan akan dengan menetralsir kandungan pupuk yang telah diaplikasikan secara berlebihan pada lahan yang ia kelola. Dengan kondisi seperti ini, ia harus menggarap ulang tanah tersebut guna memastikan kandungan tanah tidak lagi banyak dipengaruhi oleh penggunaan pupuk secara berlebihan di masa lalu.

organik kebanyakan adalah masyarakat kelas menengah ke atas yang telah memahami tentang konsumsi makanan sehat.

4.2 Modal Sosial dalam Komunitas Petani

Modal (*capital*) mengalami perluasan makna. Modal tidak lagi tentang *how much money you possess*. Modal berkaitan dengan potensi (*visible and invisible*) yang dikuasai atau dijalankan. Dalam konteks tulisan ini, Modal sosial dapat dijelaskan sebagai produk relasi manusia satu sama lain (dalam hal ini masyarakat pertanian). Berbagai definisi dari para ahli yang telah diuraikan di bab pertama menunjukkan bahwa modal sosial merujuk pada jaringan, norma dan kepercayaan yang berpotensi pada produktivitas masyarakat. Modal sosial bersifat kumulatif dan bertambah dengan sendirinya (Suharto 2010:3). Putnam mendefinisikan modal sosial sebagai penampilan organisasi sosial seperti jaringan dan kepercayaan yang memfasilitasi adanya koordinasi dan kerjasama bagi keuntungan bersama. Sementara itu, Franci Fukuyama menguraikan definisinya tentang modal sosial sebagai suatu kemampuan yang timbul dari adanya kepercayaan dalam sebuah komunitas. Ini sejalan dengan pemahaman Bank Dunia (1999) atas modal sosial.

Lebih lanjut Edi Suharto menjelaskan bahwa parameter utama dari modal sosial adalah kepercayaan (*trust*), norma-norma (*norms*) dan jaringan-jaringan (*networks*). *Pertama* adalah *Kepercayaan* atau *Trust*. Hermawati dan Handari (2003) mengungkapkan bentuk-bentuk modal sosial yang berkembang di masyarakat sebagai : hubungan sosial, adat dan nilai budaya lokal, toleransi, kesediaan untuk mendengar, kejujuran, kearifan lokal dan pengetahuan lokal, jaringan sosial dan kepemimpinan sosial, kepercayaan, kebersamaan dan kesetiaan, tanggung jawab sosial, partisipasi masyarakat, dan kemandirian.

Uphoff (1986) memberikan terminologi dan konseptualisasi modal sosial yang sedikit berbeda dari pandangan Putnam dan Fukuyama. Uphoff mencoba melihat modal sosial dari dua bentuk: Struktural dan Kognitif. Bentuk struktural diantaranya

peran, aturan, prosedur, preseden sebagaimana jaringan yang akan menguntungkan bersama. Sementara bentuk kognitif dari modal sosial antara lain adalah Norma, nilai, perilaku, dan keyakinan yang akan menciptakan saling kebergantungan yang positif sehingga akan memberikan keuntungan bersama. Franke (2005) menyebutkan bahwa modal sosial dapat dilihat dari dua dimensi utama: struktural dan dinamika jaringan. Struktural meliputi ukuran, kepadatan, keberagaman, intensitas dan frekuensi jaringan. Dinamika jaringan meliputi hubungan, norma, aturan dan mobilisasi jaringan. Menurut Permentan No. 237 tahun 2007, Petani, adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha di bidang pertanian, wanatani, minatani, agropasture, penangkaran satwa dan tumbuhan, di dalam dan di sekitar hutan, yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang.

Masih dalam permentan, kelompok Tani didefinisikan sebagai kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumberdaya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.

Modal sosial yang terbentuk dalam sebuah komunitas adalah kolektifitas kemampuan individu yang menyatu membentuk kekuatan. Modal sosial adalah tindakan kumulatif dari berbagai aksi individu yang kemudian tergabung menjadi modal kolektif yang dapat dimanfaatkan seluruh anggota komunitas. Titik episentrum dari modal sosial ini adalah terbentuknya jaringan hubungan (relational network) yang akan menyediakan kepemilikan modal kolektif bagi para anggota organisasi (Permadi 2002:24). Malahan, menurut Leana (1999), modal sosial diidentifikasi sebagai atribut kolektif dari jumlah koneksi yang dimiliki individu dalam organisasi. Komponen utama modal sosial organisasi adalah asosiabilitas dan *trust*. Keduanya dipandang sebagai komponen penting bagi suatu organisasi untuk memperoleh keuntungan dari adanya modal sosial di dalamnya. Dalam konteks masyarakat tani, modal sosial dapat diartikan

sebagai akumulasi segala bentuk modal sosial yang dibawa oleh individu anggota ke dalam kelompok tani untuk kemudian dimanfaatkan secara kolektif dan memberikan benefit bagi kelompok tani tersebut.

4.3 Faktor-faktor yang menentukan Modal Sosial Kelompok Tani

Menurut Wuysang (2014), modal sosial pada intinya adalah serangkaian nilai dan norma yang merupakan wujud nyata dari suatu institusi yang bersifat dinamis. Bentuk nyata dari modal sosial kelompok tani diwujudkan menjadi *kepercayaan, jaringan sosial, tanggung jawab* dan *kerjasama*.

4.3.1. Kepercayaan menjadi wujud nyata modal sosial.

Fukuyama (2002) berpendapat bahwa unsur terpenting dalam modal sosial adalah kepercayaan yang merupakan perekat bagi langgengnya kerjasama dalam kelompok masyarakat. Dengan terbentuknya kepercayaan diantara anggota kelompok masyarakat, kerjasama antar anggota kelompok yang berjalan secara lebih efektif. Elemen modal sosial yang menjadi pusat kajian Fukuyama adalah kepercayaan.

Sebagai sebuah entitas sosial yang ditunjukkan melalui karakteristik hubungan sosial yang kohesif (erat), kepercayaan adalah modal utama yang harus ada di antara mereka. Mustahil mewujudkan kesepaduan dalam masyarakat apabila tidak ditemukan sikap saling percaya antara satu anggota kelompok tani dengan anggota kelompok tani lainnya. Kepercayaan (*trust*) merekatkan diantara anggota kelompok, sehingga dapat diasumsikan bahwa semakin tinggi kepercayaan, maka semakin erat juga hubungan di antara mereka. Begitupun sebaliknya, apabila kepercayaan berkurang di antara anggota kelompok, maka kadar keeratan hubungan sosial mereka juga akan berkurang.

Beberapa contoh yang dapat diketengahkan sebagai wujud nyata dari hadirnya kepercayaan di antara anggota kelompok. Penulis mengambil salah satu contoh berkaitan dengan kebiasaan

utang-piutang dalam masyarakat pertanian, khususnya di masa paceklik ataupun dalam kondisi yang tidak menentu (termasuk dalam situasi pandemic seperti saat ini).

Tidak dapat dipungkiri bahwa kemiskinan masih menjadi ciri khas masyarakat pertanian. Mereka seringkali diperhadapkan dengan kondisi keuangan keluarga yang sulit. Apabila salah satu anggota keluarga sedang sakit, maka disitulah para petani miskin sangat memerlukan dukungan keuangan. Sementara itu, fleksibilitas peminjaman uang pada lembaga formal (bank atau koperasi) juga bukan perkara yang mudah bagi mereka. Rata-rata mereka tidak memiliki asset yang *bankable* atau asset yang mudah dijadikan sebagai jaminan di bank.

Dalam kondisi sedemikian ini, satu-satunya cara bagi mereka adalah dengan meminjam uang pada kerabat, keluarga atau dari anggota kelompok sosial dimana dia melekat (kelompok tani atau kelompok sosial lainnya). Ketersediaan anggota kelompok lainnya untuk meminjamkan uang kepada petani tersebut akan ditentukan oleh tingkat kepercayaan anggota kelompok lainnya kepada yang bersangkutan. Semakin tinggi kepercayaan, maka semakin mudah dia diberikan pinjaman uang. Begitu pula sebaliknya, apabila terdapat pengalaman buruk dimasa lalu yang berkaitan dengan urusan uang, maka hal tersebut bisa saja melemahkan kepercayaan anggota kelompok lain, dan mengakibatkan tingkat kepercayaan juga menjadi rendah.

4.3.2. Jaringan Sosial Menciptakan Jaringan Sosial dalam Pembentukan Modal Sosial

Dalam pandangan penulis, jaringan sosial dapat diidentifikasi dan dibagi menurut arah jangkauan jaringan tersebut menjadi dua bentuk jaringan. Yang pertama adalah jaringan sosial internal. Jaringan sosial internal ini diartikan sebagai jaringan sosial yang menghubungkan antar sesama anggota dan berfungsi sebagai jaring pengaman sosial (*social safety net*) di antara sesama anggota. Jaringan pengaman sosial akan sangat berfungsi optimal di dalam situasi kedaruratan dan memerlukan tindakan penanganan

segera. Sebagai contoh, apabila terdapat anggota keluarga petani yang mendadak mengalami kecelakaan dan harus dilarikan ke rumah sakit. Biasanya, kepala keluarga (petani) menghubungi kerabat yang dianggap dapat membantu, khususnya dalam menyiapkan dukungan finansial². Jika pun tidak kepada keluarga atau kerabat, mereka akan meminjam kepada juragan mereka (khusus kepada petani yang menggarap sawah orang lain/ juragan). Biasanya keluarga korban akan menerima banyak tawaran bantuan dari para petani dimana keluarga korban telah membentuk jaringan sosial.

Di dalam banyak studi tentang sosial ekonomi pertanian, diketahui bahwa petani tradisional biasanya terikat pada suatu hubungan patron-klien. Studi-studi tersebut mengungkapkan bahwa kehadiran juragan, disadari ataupun tidak disadari, akan menghisap sumber daya yang dimiliki oleh petani buruh. Tenaga fisik para petani dianggap sebagai sumber daya yang sangat penting perannya. Namun demikian, dari perspektif lain juga diketahui bahwa kelompok juragan inilah yang mampu memberikan jaminan kepada buruhnya dalam waktu yang tidak lama. Sepatutnya, fungsi penyediaan jaminan kesehatan seperti ini disiapkan oleh pemerintah. Namun faktanya, kendala-kendala administrative yang tidak urgen sering diungkapkan sebagai tantangan besar pertama yang harus dihadapi oleh kelompok tanai apabila ingin mengakses layanan kesehatan yang disiapkan oleh pemerintah

Selain jaringan sosial internal, jaringan sosial eksternal juga perlu untuk diangkat sebagai tema diskusi. Jaringan eksternal dalam konteks ini adalah suatu hubungan simbiosis mutualisme antara para petani dengan pedagang, distributor serta pengecer kecil-kecilan. Fakta empirik menunjukkan bahwa fluktuasi harga pasar atas komoditas yang dihasilkan oleh petani lebih cenderung

² Perlu untuk menjadi catatan bahwa masyarakat pertanian umumnya tidak memiliki jaminan asuransi sosial. Mereka umumnya lebih bergantung kepada pertolongan keluarga atau kerabat. Sehingga, kedudukan jalinan pengaman sosial sangat penting di dalam situasi genting seperti ini

ditentukan oleh (1) mekanisme pasar, dan (2) kondisi distribusi barang di titik-titik distribusi. Mekanisme pasar yang melibatkan pemasaran hasil pertanian tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi kualitas komoditas, akan tetapi juga dipengaruhi isu-isu sentral yang beredar di kalangan distributor.

Guna mengatasi persoalan tersebut, satu-satunya jalan yang digunakan adalah dengan memperkuat jaringan sosial diantara komponen yang terlibat. Jejaring sosial ini akan bekerja untuk bisa saling mengamankan posisi bisnis masing-masing.

4.3.3. Tanggung Jawab Sosial

Di dalam prakteknya sehari-hari, kita masih bisa mendapati bagaimana wujud dari tanggung jawab sosial ini dimanifestasikan oleh sekelompok petani. Penulis mengambil contoh pada masyarakat tani di Pinrang, Sulawesi Selatan. Faktor utama yang mendukung berkembangnya sektor pertanian dan tanaman pangan, khususnya pada komoditas padi di kawasan ini adalah karena kondisi geografis. Di samping ketinggian permukaan tanah yang sangat cocok bagi tumbuhnya komoditas padi, Pinrang juga dialiri banyak sekali anakan sungai (baik irigasi sekunder maupun irigasi tersier) yang bersumber dari Sungai Saddang. Hal ini menyebabkan suplai air untuk irigasi pertanian tidak pernah berhenti sepanjang tahun dan dalam kondisi musim apapun. Dengan suplai air yang melimpah, maka para anggota kelompok tani akan mengatur tata kelola air irigasi untuk memastikan distribusi air dapat berjalan dengan lancar dan merata, termasuk bagi anggota kelompok tani yang petakan sawahnya terbelah jauh dari sumber air. Pada titik inilah penulis melihat kuatnya unsur kepercayaan yang terbentuk diantara mereka secara turun temurun. Bagi petani yang memiliki petakan sawah yang berdekatan dengan sumber air, ia harus memastikan bahwa aliran air dapat diteruskan kepada petakan sawah berikutnya. Petakan sawah berikutnya juga harus melakukan hal yang sama. Demikianlah proses ini berjalan seterusnya, sampai pada petakan sawah terakhir.

Di samping itu, terdapat pula aktivitas pertanian lainnya yang berjalan bersamaan dan memanfaatkan sumber air yang sama. Penulis mendapati banyaknya petani peternak bebek yang memanfaatkan sistem irigasi seperti ini. Untuk memelihara bebek, para peternak harus memastikan ketersediaan air yang cukup. Hal ini tidak terlepas dari karakteristik bebek yang harus selalu mendapat suplai air untuk pakan. Dalam kondisi ini, kepercayaan antara petani padi dan peternak bebek akan terbentuk. Mereka akan saling membantu menopang usaha masing-masing.

Namun demikian, kondisi yang demikian ini tidak juga selalu berjalan lancar. Penulis beberapa kali mendapati suatu keadaan dimana terjadi konflik antar petani pengguna air. Konflik mereka biasanya disebabkan oleh distribusi air yang tidak merata akibat komunikasi dan koordinasi yang tidak berjalan lancar di hulu sungai. Sering juga didapatkan keadaan di mana petani salah dalam menafsirkan kalender³ tanam yang telah disepakati bersama. Dalam situasi dimana terjadi konflik seperti ini, biasanya pihak kepala desa atau lurah akan melakukan mediasi secara kekeluargaan. Mediasi juga akan dibantu oleh tokoh-tokoh masyarakat, khususnya ketua kelompok tani.

Dari pengalaman ini, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab sosial berkaitan dengan peran-peran anggota kelompok yang tidak tertulis namun dipahami sebagai kewajiban sosial yang harus dijalankan sebagai bagian dari anggota masyarakat. Tanggung jawab ini terlihat dari adanya kewajiban untuk memastikan distribusi air secara merata ke seluruh areal persawahan. Sehingga, setiap anggota kelompok tani seolah-olah memberikan jaminan ketersediaan air bagi setiap anggota kelompok tani lainnya, termasuk peternak bebek yang juga

³ Kalender tanam adalah suatu istilah yang digunakan untuk memetakan penjadwalan penanaman padi serta pemanfaatan beberapa sumber daya setempat (misalnya irigasi, pendistribusian pupuk serta penentuan waktu menanam mengikut kondisi musim). Kalender tanam seperti ini harus disepakati melalui sebuah rapat bersama yang dikenal di daerah Sulawesi Selatan dengan istilah Tudang Sipulung.

tergolong sebagai kelompok tani. Tanggung jawab sosial juga telah membantu masyarakat untuk menyelesaikan konflik dan kesalahpahaman yang mungkin terjadi di antara mereka. Tentunya, azas kekeluargaan dan kegotongroyongan adalah pilar utamanya.

4.3.4. Norma Sosial dan adat istiadat

Konsep dari norma sosial dalam konteks ini adalah adanya kesamaan perspektif dan tata nilai yang dianut oleh setiap anggota kelompok sosial. Norma sosial ini merupakan ikatan semi-formal yang merekatkan mereka. Ia berkaitan erat dengan tata aturan hubungan antara anggota, yang menjadika suatu kelompok mungkin akan sangat berbeda dengan kelompok lain. Sebagai contoh yang sangat sederhana, norma sosial yang mengatur hubungan antara individu dalam kehidupan sosial para mahasiswa UNPAD atau IKOPIN akan terlihat sangat berbeda dengan norma sosial yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari para praja IPDN. Hubungan antar angkatan di UNPAD mungkin akan sangat cair dan tidak ditemukan sekat-sekat tertentu yang memisahkan sehingga kehidupan mereka terlihat sangat egaliter. Berbeda halnya dengan kehidupan praja IPDN, dimana norma sosial yang mengatur hubungan antar angkatan terlihat sangat jelas sekatnya, sehingga kehidupan mereka terlihat sangat hirarkis. Dalam hal seperti ini, tidak dapat dikatakan bahwa norma sosial dari masing-masing entitas tersebut lebih baik dari yang lainnya. Tidak ada justifikasi bahwa kebebasan dan egalitarianisme kehidupan mahasiswa lebih baik daripada kehidupan mahasiswa yang diikat oleh hirarki struktur: semua tergantung kepada penerimaan setiap anggota kelompok sosial terhadap norma tersebut. Apabila ia tidak setuju, maka ia akan meninggalkan kelompok itu dan bergabung dengan kelompok sosial lainnya.

Contoh lain yang dapat diketengahkan adalah bagaimana corak hubungan sosial dalam kelompok masyarakat asli di sebuah kawasan yang tumbuh dengan pesat. Dalam kasus ini, kita mengambil studi kasus pada masyarakat Betawi di kawasan perkotaan Jakarta yang tumbuh pesat. Umumnya, masyarakat asli

betawi yang masing memegang norma sosial yang diwariskan oleh keluarga mereka akan memiliki pandangan yang berbeda dengan kelompok sosial pendatang. Mereka akan berkumpul dengan sesama kerabat mereka dan senantiasa meneguhkan nilai-nilai yang mereka anggap sebagai pemersatu di antara mereka. Semakin kuat mereka menanamkan doktrin keluarga, maka semakin erat pula hubungan diantara mereka. Dengan demikian, semakin kuat pula dimensi 'saling percaya' untuk kemudian saling bekerja sama mewujudkan tujuan bersama: melestarikan budaya betawi di tengah arus pembangunan perkotaan.

Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa norma sosial ini juga pada akhirnya menentukan corak kerjasama yang akan menggerakkan kelompok tersebut untuk sebuah pencapaian kolektif.

4.3.5. Unsur Kerjasama

Harmonisasi hubungan sosial dalam masyarakat pertanian akan terwujud pada dimensi akhir dari unsur penduduk terbentuknya modal sosial; kerjasama. Kesepaduan di dalam kelompok sosial merupakan akumulasi dari kepercayaan yang mendalam, jaringan sosial yang kuat dan saling menopang, tanggung jawab sosial untuk saling membantu anggota kelompok lainnya serta keteguhan dalam memegang norma sosial di antara anggota kelompok. Dalam konteks ini, kerjasama dimaknai sebagai 1) usaha kolektif mencapai tujuan bersama (misalnya: menciptakan stabilitas sosial dalam beraktifitas sehari-hari); dan 2) usaha bersama dalam menyelesaikan masalah-masalah bersama yang diakibatkan oleh bencana alam maupun konflik-konflik horizontal.

4.4. Pemanfaatan Modal Sosial dalam Pertanian Berkelanjutan: Bentuk Modal Sosial Petani

Setelah memahami konsep-konsep berkenaan dengan dimensi utama yang membangun modal sosial bagi kalangan petani, lanjutnya pembahasan diteruskan kepada pemanfaatan

modal sosial dalam praktek-praktek pertanian berkelanjutan. Asumsi mengenai praktek pertanian berkelanjutan dalam konteks ini lebih didominasi oleh pembahasan mengenai pertanian organik. Aspek keberlanjutan dalam pertanian merupakan antithesis utama ketika sektor pertanian kita harus berhadapan dengan kenyataan kegagalan penerapan revolusi hijau di Indonesia yang menyebabkan banyaknya lahan pertanian yang mengalami kerusakan parah, khususnya berkaitan dengan pemanfaatan pupuk secara berlebihan untuk mengejar produksi pertanian melalui program intensifikasi pertanian. Tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan pertanian di masa lalu juga telah membawa bangsa ini ke gerbang swasembada pangan. Namun dibalik semua itu, setelah 2-3 dasawarsa, dampak dari intensifikasi ternyata menjadi ancaman baru, khususnya kepada kelestarian lingkungan dan areal pertanian.

4.4.1 Modal Sosial Berbentuk Nilai, Kultur dan Persepsi

Dalam penelitiannya, Ketaren (2015) menjelaskan secara lebih mendalam mengenai bentuk modal sosial petani di desa Bangunjiwo dimulai sejak tahapan pengolahan lahan.

Secara alamiah, masyarakat pertanian di suatu wilayah akan memiliki cara tersendiri dalam mengolah tanah pertanian, dan mungkin saja cara itu berbeda dengan cara pengolahan tanah pertanian di lokasi yang lain. Cara tersebut dipraktekkan secara mandiri dan berlangsung secara turun temurun. Pola-pola mereka akan terus dipraktekkan dengan sedikit perubahan dan modifikasi yang dipengaruhi oleh efisiensi dalam produksi, pengenalan alat-alat pertanian baru serta semakin meluasnya pengetahuan berkaitan dengan teknologi pertanian. Pola-pola seperti ini pada akhirnya akan menjadi pengetahuan yang dipertahankan terus menerus dan bermuara pada terbentuknya budaya pertanian di wilayah tersebut. Pengelolaan tanah ini menjadi sangat penting, mengingat tumbuh dan kembangnya tanaman sangat tergantung dari kualitas tanah dan kesuburan yang dimiliki oleh tanah tersebut.

Dalam hal pengolahan tanah pertanian, pengetahuan tentang faktor-faktor teknis pertanahan, unsur-unsur mineral yang terkandung serta pengaruh klimatik perlu untuk dipahami perkembangannya. Ketersediaan bahan-bahan organik tanah yang mencukupi merupakan hal yang sangat penting. Jika unsur hara yang ada di dalam tanah digantikan terutama oleh bahan-bahan kimia, dan petani tidak lagi menganggap pemberian pupuk organik tidak penting, maka tanah akan menjadi sangat kekurangan bahan organik dan unsur hara penyangga. Selain itu, tanah akan menjadi rentan terhadap kekeringan dan serangan hama. Dengan kata lain, produktivitas dan kestabilan sistem pertanian akan menurun.

Apabila petani mendapati kondisi lahan seperti ini, pemberian unsur hara serta teknik pengolahan lahan pada saat memulai pengolahan tanah sangat diperlukan bagi peningkatan produksi biomassa untuk kemudian dimanfaatkan sebagai pupuk. Dengan cara ini, modal kerja petani semakin meningkat dalam bentuk bahan organik tanah.

Penjelasan tentang modal sosial yang berbentuk nilai, kultur dan persepsi diartikan sebagai hadirnya suatu tata nilai yang diwariskan secara turun temurun dari para pendahulu mereka dan hal tersebut mempengaruhi persepsi dan sikap mereka dalam menyikapi kondisi lahan. Jika kita melihat lebih jauh, nilai, kultur dan persepsi ini akan sangat dimungkinkan berbeda dengan nilai, kultur dan persepsi yang dikembangkan oleh kawasan pertanian lainnya. Ini menunjukkan sebuah jejaring sosial yang tertutup dari pengaruh luar akibat kuatnya pegangan terhadap nilai, kultur dan persepsi yang mereka terima dari para pendahulunya.

4.4.2 Modal Sosial Berbentuk Institusi

Institusi sosial dalam masyarakat petani sangatlah beragam. Masyarakat petani mungkin saja dilekatkan pada institusi berskala nasional melalui asosiasi (HKTI), institusi berskala semi mikro (Gapoktan) atau bahkan sebagai bagian dari kelompok tani. Pada semua tingkatan, modal sosial akan membentuk jejaring yang

memungkinkan setiap komponen akan berperan menurut fungsinya masing-masing.

Studi Ketaren (2015) menunjukkan bahwa pembentukan kelompok tani dan keikutsertaan sebagai anggota kelompok tani di Desa Bangunjiwo telah disadari memberikan manfaat yang sangat besar bagi pemberdayaan petani. Para petani menganggap bahwa mereka akan sangat mudah dikendalikan oleh kepentingan kelompok kapitalis (pedagang pupuk, pembeli hasil pertanian, penyewa peralatan pertanian) apabila mereka bekerja secara sendiri-sendiri dan hanya memikirkan hasil pertaniannya sendiri. Oleh sebab itu, kehadiran kelompok tani yang kuat akan memberikan kepercayaan diri yang besar kepada mereka, khususnya bagi petani penggarap (buruh tani).

Pada awalnya, keikutsertaan mereka dalam kelompok tani hanyalah sebatas terdaftar sebagai anggota biasa. Kelompok-kelompok ini pun masih berskala kecil dimana setiap kelompok masih berdiri sendiri-sendiri. Padahal, kepentingan dan jenis kegiatan mereka adalah seragam. Atas dasar kesamaan ini, mereka kemudian berkumpul dan membentuk gabungan kelompok tani (gapoktan). Berdasarkan penelitian Ketaren (2015) di Bangunjiwo, gapoktan mereka dikenal dengan nama Gapoktan Saka Makmur.

Oleh karena hubungan sosial kemasyarakatan masyarakat desa masih didominasi oleh nilai-nilai tradisional dan nilai-nilai keislaman, maka setiap pertemuan kelompok yang dilakukan akan dimulai dengan ritual-ritual keislaman. Pertemuan kelompok dimulai dengan pembacaan Al-Fatihah lalu dilanjutkan dengan pembacaan tahtim dan tahlil beserta doanya (pengajian). Pembacaan ayat-ayat Alquran ini dimaksudkan untuk memberi kebaikan dan keberkahan pada pertemuan yang dilakukan. Setelah selesai, barulah pembicaraan yang berkenaan dengan perkembangan pertanian khususnya padi dilaksanakan.

Oleh karena beberapa peserta yang hadir adalah juga merupakan tokoh-tokoh masyarakat yang dituakan, terkadang kegiatan seperti ini juga turut membahas aktivitas sosial lainnya diluar dari konteks pertanian. Misalnya berkaitan dengan kedukaan

yang dialami oleh salah seorang anggota masyarakat. Biasanya, apabila terjadi kedukaan, anggota kelompok akan menarik dana sukarela. Selain itu, untuk menjaga stabilitas keuangan kelompok, setiap anggota akan ditarik iuran.

Dari kegiatan seperti ini dapat disimpulkan bahwa kelompok tani merupakan bentuk nyata modal sosial yang dilembagakan (*institutionalized*) dan menyatukan setiap anggota ke dalam sebuah jaringan sosial berdasarkan atas kepercayaan (*trust*) antara satu anggota dengan anggota lainnya.

4.5 Kesimpulan

Berbagai persoalan yang dihadapi petani saat ini harus diakui adalah merupakan sebuah ambisi di masa lalu yang hanya mengejar produksi tinggi tanpa memperhitungkan akibatnya di beberapa dekade berikutnya. Pertanian sistem organik adalah solusi yang dapat ditempuh oleh masyarakat tani. Pertanian jenis organik tentu saja tidak terlepas dari aspek kolektifitas dari kelompok masyarakat dengan segenap tatanan dan nilai-nilai sosial yang dianut oleh mereka. Oleh sebab itu, penulis berpandangan bahwa teknologi pertanian yang berkelanjutan saat ini adalah penggabungan antara teknologi pertanian organik dengan potensi sosial masyarakat, dimana komponen utama potensi sosial tersebut adalah unsur-unsur yang menyusun terbentuknya modal sosial: jaringan, kepercayaan antar sesama anggota masyarakat dan norma-norma sosial yang berkembang di dalam masyarakat tersebut.

Selain berbentuk sebagai suatu institusi, modal sosial juga dapat ditemukan dalam bentuk sebuah mekanisme hubungan antar anggota kelompok tani. Dalam konteks ini, mekanisme diartikan sebagai bentuk interaksi antar petani yang berwujud sebagai 1) tindakan saling berbalas/ timbal balik atau resiprositas dan 2) tindakan saling membantu sebagai bentuk solidaritas.

Secara teoretis, fenomena resiprositas seringkali dijelaskan dalam koridor teori pertukaran sosial (*social exchange*) dimana didalamnya terdapat unsur sumber daya yang dipertukarkan.

BAB 5

MODAL SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR

5.1 Latar Belakang

Sebagai negara yang dianugerahi 2/3 wilayahnya adalah lautan, Indonesia menyimpan kekayaan potensi kelautan dan pesisir. Sektor perikanan menjadi sektor yang paling menjanjikan dan diyakini dapat menopang ekonomi negara ini apabila dikelola secara efisien dan efektif. Potensi tersebut meliputi keanekaragaman hayati yang melimpa ruah, potensi sumber daya energi fosil yang tersebar di berbagai blok sumur minyak, potensi wilayah dimana wilayah laut Indonesia merupakan jalur transportasi utama maritime dunia serta potensi lingkungan yang menyimpan sumber-sumber potensial bagi kemaslahatan manusia di kawasan asia tenggara (Lasabuda 2013). Sesuai dengan tingkat kelestariannya, sumber daya laut dan pesisir di Indonesai dapat dikategorikan menjadi 1). Sumber daya alam yang dapat diperbaharui; dan 2) sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah misalnya potensi energi gelombang laut dalam yang saat ini dikembangkan dan mulai dilirik sebagai sumber energi baru yang mampu memutar turbin dari dalam laut. Sementara itu, sumber daya alam yang tidak terbarukan adalah sumber daya energy yang terdapat di sumur-sumur minyak; sumber daya perikanan dan sumber daya pesisir lainnya. Hanya saja, kita patut untuk menyadari bahwa sebagian besar penduduk Indonesia di wilayah pesisir adalah mereka yang emggantungkan hidupnya di sektor perikanan yang sepenuhnya bergantung kepada ketersediaan komoditas tersebut di laut.

Fakta lainnya yang cukup memilukan bagi Indonesai adalah bahwa mereka yang bekerja di sektor perikanan modern adalah

kelompok-kelompok pemodal dan menguasai beberapa sumber daya alam sektor perikanan. Bukan hanya itu, mereka juga tentunya menguasai jejaring sosial yang merangkai kompleksitas sektor perikanan, dari mulai perikanan tradisional sampai dengan perikanan berskala besar.

Sektor perikanan skala kecil merupakan penopang bagi masyarakat miskin yang jumlahnya pun sangat massif. Mereka berhadapan dengan kenyataan bahwa fishing ground yang mereka kuasai selama ini sebagian telah tercemar oleh limbah dari darat. Lemahnya akses terhadap proses pengambilan keputusan juga diyakini sebagai salah satu faktor yang mempersulit kedudukan mereka. Tidak ada cukup ruang untuk mereka menyuarakan bagaimana kerasnya kehidupan di laut. Praktek kompradorasi, praktek patronase dan illegal fishing adalah sejumlah persoalan yang mereka harus hadapi sendiri, tanpa pernah merasakan peran yang signifikan dari pemerintah dalam mengurangi dampak 'hubungan sosial dan hubungan produksi' yang seringkali tidak adil kepada mereka.

Mengingat kondisi yang terjadi seperti ini, pengelolaan wilayah pesisir secara terintegrasi adalah salah satu solusi penting dan terintegrasi serta diharapkan dapat mengakomodir berbagai kelompok kepentingan di sektor perikanan. Dalam perspektif yang lebih makro, pengelolaan pesisir dan sumber daya perairan secara berkelanjutan adalah harapan setiap elemen bangsa ini, mengingat sumber daya alam yang berada di darat telah banyak mengalami degradasi secara sangat signifikan. Hutan-hutan lindung mengamali deforestasi (baik oleh korporasi maupun kelompok masyarakat). Sumber minyak bumi dan gas juga mengalami penurunan volume lifting.

Oleh karena itu pengembangan sektor pesisir (termasuk sumber daya manusia yang mengelola wilayah pesisir secara tradisional) menjadi tumpuan harapan bagi kita semua. Meskipun pada kenyataannya kekayaan alam laut Indonesia juga mendapat 'ancaman' berupa pencurian ikan dari negara lain, akan tetapi optimisme tetap harus senantiasa ditumbuhkan. Regulasi yang

mengatur pengelolaan wilayah pesisir harus mengedepankan kesejahteraan para nelayan dan buruh nelayan.

Fakta empirik di berbagai kawasan pesisir dan pelabuhan perikanan nusantara menunjukkan bahwa apabila membandingkan nilai jual hasil laut yang sangat tinggi (termasuk untuk ekspor) maka seharusnya nelayanlah yang paling berpotensi sebagai entitas yang paling menikmati kekayaan lama tersebut. Akan tetapi, tidaklah sulit bagi kita untuk menemukan masyarakat miskin apabila kita berkunjung ke kawasan nelayan. Kemiskinan dan kemunduran terus terjadi dari tahun ke tahun. Mereka terus bertahan dengan pola ekonomi subsisten (suatu pola ekonomi yang hanya berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan tidak berharap pada penghasilan yang berlebih).

Fakta yang tidak kalah mengejutkannya adalah bahwa hampir semua nelayan kecil (termasuk buruh nelayan) terlibat dalam suatu jaringan sosial yang cenderung merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam sataus sosial yang sangat rendah. Pola patron klien yang mereka jadikan tumpuan hidup (bagi sebagian pakar) diyakini sebagai pola yang sangat merugikan, meskipun seringjuga menjadi penolong dalam situasi yang darurat.

Kemiskinan merupakan permasalahan klasik yang dapat dengan mudah kita temukan di masyarakat pesisir. Data BPS dari tahun ke tahun menunjukkan kondisi yang memang fluktuatif, bahwa jumlah masyarakat miskin di sektor perikanan mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Dengan kondisi demikian ini, kita patut bertanya mengenai efektifitas kebijakan pemerintah yang selama ini dijalankan untuk mengurangi kemiskinan.

Kusnadi (2006) menyatakan bahwa penyebab utama yang memicu terus tumbuhnya kemiskinan di kalangan nelayan adalah tidak adanya kebijakan strategis dan komprehensif yang membedah persoalan kemiskinan nelayan ini. Peratama, program pembangunan kawasan pesisir belum bersinergi secara optimal antara masyarakat nelayan dengan para pemangku kepentingan pembangunan. Kedua, inkonsistensi jumlah hasil produksi perikanan (hasil tangkapan), sehingga beberapa prediksi

perencanaan pembangunan sosial ekonomi mikro perikanan di desa-desa nelayan terganggu. Faktor dominan berikutnya adalah persoalan kondisi geografi yang terisolasi. Kondisi ini berkaitan dengan distribusi hasil tangkapan, barang dan jasa lainnya, serta distribusi SDM ke kawasan perikanan potensial. Kondisi ini diperparah dengan semakin tingginya fluktuasi perubahan iklim dan menjadikan kawasan pesisir sebagai salah satu kawasan yang paling rentan terhadap perubahan iklim.

Dari sisi klasifikasi kemiskinan, umumnya masyarakat nelayan berada dalam beberapa strata sosial, meskipun secara dominannya mereka tergolong sebagai kelompok masyarakat termiskin, baik dari segi jumlah masyarakat miskin maupun tingkat keparahan kemiskinan mereka. Meskipun pemerintah telah menerapkan berbagai bentuk program pemberdayaan masyarakat, akan tetapi partisipasi mereka terkadang bersifat kamufase atau semu (Saefuddin, dkk 2003). Hal tersebut ditandai dengan posisi sosial mereka yang tergantung kepada juragan, sementara kedudukan pemerintah setempat juga masih merujuk kepada juragan yang menguasai para nelayan kecil ini.¹ Dengan kondisi seperti ini, akan sangat mustahil mereka keluar dari rantai kemiskinan.

Kelompok nelayan kecil biasanya sangat bergantung kepada ikatan keluarga yang telah terjadi di antara mereka. Pada dasarnya, kelompok nelayan miskin memiliki pertautan darah secara biologis. Umumnya mereka tidak menikah dengan orang luar kampung. Dalam konteks ini, jejaring yang terbentuk menjadi sangat penting. Nilai yang mereka terapkan di tempat ini (yang mungkin saja berbeda dengan nilai sosial yang berlaku di tempat yang lain) akan menjadi perekat antar setiap individu. Dengan

¹ Perkataan 'menguasai' disini merujuk kepada penguasaan secara ekonomi yang dilakukan oleh kelompok pemodal yang juga biasanya merupakan tokoh masyarakat setempat. Penghormatan yang diberikan oleh masyarakat merupakan pengakuan atas kekuatan ekonomi yang dikuasai oleh kelas pemodal.

jalanan hubungan sosial yang cukup rapat, polarisasi sosial akan semakin kabur (Gunawan, 2005:386).

Dalam sebuah institusi sosial yang memiliki ikatan sosial yang rapat, modal sosial akan terbentuk, dan diikuti oleh semakin menguatnya tiap-tiap variabel penyusunnya. Sebagaimana telah dibahas pada beberapa bab sebelumnya, komponen modal sosial terdiri atas sikap saling percaya (trust), norma yang berfungsi mengatur setiap bagian komponen, termasuk masyarakatnya, dan jejaring kerja (networks) yang terus bergerak mewujudkan efisiensi. Rangkaian ini adalah prasyarat bagi mewujudkan tatanan masyarakat serta pemerintahan yang baik dan efektif (Kushandajani, 2008). Seterusnya, Kushandajani (2008) juga menyatakan bahwa pemerintahan di suatu wilayah akan menghadapi tantangan yang lebih berat apabila aparaturnya tidak menyadari mempertimbangkan aspek budaya setempat (dalam konteks modal sosial, diasumsikan sebagai norma).

Di dalam perkembangannya, modal sosial juga akan mengalami konfigurasi mengikut kepada karakteristik geografis di wilayah tersebut. Nilai yang berlaku di masyarakat perkotaan mungkin saja berbeda dengan nilai yang berlaku di masyarakat pedesaan. Demikian pula halnya di masyarakat pesisir. Mekera akan menerapkan suatu nilai yang mengatur tatanan sosial mereka dengan tetap mempertimbangkan faktor alam dan lingkungan sekitar. Sehingga, pendekatan pemberdayaannya mungkin saja akan sangat berbeda dan sangat spesifik dalam memahami suatu keadaan. Pemberdayaan semacam ini diharapkan dihasilkan melalui interaksi pendekatan top-down dan bottom up. Konsep top-down diartikan sebagai upaya pemerintah lokal dalam mengikuti panduan arah pembangunan nasional, sementara pendekatan bottom up diartikan sebagai langkah-langkah yang harus dijalankan untuk mengakomodir kondisi real yang terjadi di lapangan. Kondisi geografis yang sangat khas memaksa setiap pengambil kebijakan untuk ikut dan menyesuaikan diri dengan situasi yang tidak dapat mereka kendalikan melalui kebijakan jangka pendek.

Dengan demikian, konsep pemberdayaan yang implementasikan dalam masyarakat pesisir adalah penggabungan antar masing-masing indikator-indikator modal sosial yang melekat pada pendekatan yang dijalankan.

5.2. Konsep Sosial Modal Dalam Konteks Masyarakat Pesisir

Secara umum, kata ‘modal’ selalunya bertautan makna dengan konsep ekonom. Aktivitas berproduksi akan melibatkan investasi modal yang berangkir dengan didapatkannya keuntungan secara finansial. Modal dalam hal ini bisa berarti sumber daya manusia (tenaga kerja), bisa juga bermakna sebagai modal finansial (uang) serta modal sosial yang terbentuk dalam wujud jejaring pemasaran atas hasil produksi (Sakata, 2004). Mekanisme ekonomi yang terbangun adalah merupakan penggabungan antara teknologi, ketersediaan sumber daya alam dan manajemen finansial serta ditopang oleh pemahaman yang baik atas selera pasar (masyarakat). Di dalamnya, pelaku produksi harus memahami betul nilai, norma dan jaringan sosial yang sudah terbangun.

Dengan memahami jaringan sosial yang ada, maka akan didapatkan seberapa besar tingkat ketergantungan suatu komponen masyarakat terhadap komponen masyarakat lainnya. Kita dapat memahami, bahwa dengan melihat hubungan kerja yang dibangun dalam sebuah komunitas, maka akan didapatkan bentuk ketergantungan dari salah satu pihak terhadap pihak lainnya. Modal sosial merupakan konsep yang begitu signifikan pengaruhnya dalam memahami struktur sosial masyarakat seperti pada masyarakat pesisir yang sangat bergantung kepada jaringan sosial yang sudah ada dan mengikat mereka sejak lama.

Istilah ‘modal sosial’ (*social capital*) seringkali dirasakan memiliki kesamaan arti dan makna dengan ‘modal manusia’ (*human capital*). Keduanya memang terkesan memiliki makna yang sama, hanya saja, ruang lingkup konseptualnya berbeda.

Istilah ‘modal manusia’ dalam banyak hal merujuk kepada dimensi individu. Dimensi ini dapat ditelusuri melalui jenis

keahlian yang dikuasai, tingkat pengetahuan yang digeluti serta penguasaan kekayaan personal. Sementara, modal sosial merujuk kepada potensi kelompok yang terbentuk dari penggabungan potensi-potensi individual dan membentuk hubungan antara individu dalam kelompok tersebut. Selain konsep tersebut di atas, modal sosial juga seringkali digunakan untuk menggambarkan dinamika sosial dari aktivitas ekonomi. Sebagai contoh, modal sosial dapat digunakan untuk menurunkan biaya transaksi. Karena dengan adanya kepercayaan dalam bertransaksi, sekat-sekat sosial akan semakin berkurang (Fukuyama, 2000, dan Coleman, 2000).

Syakra² (2000) mengemukakan bahwa terdapat sepuluh unsur/ elemen yang menyusun terbentuknya modal sosial, sebagaimana berikut ini:

1. Kepercayaan, adalah suatu komitmen untuk memastikan kesamaan antara kata dan perbuatan. Mustahil untuk dapat membangun kerjasama yang baik apabila tidak dilandasi kepercayaan di anatar anggota kelompok sosial. Kepercayaan juga mendorong orang-orang untuk saling mengetahui dan memahami kondisi masing-masing, sehingga kerjasama berjalan secara seimbang tanpa ada kesan superioritas dan satu pihak terhadap pihak lainnya.
2. Solidaritas, sebagai suatu sikap untuk ikut menanggung konsekwensi suatu tindakan sebagai wujud kebersamaan dalam menghadapi masalah.
3. Toleransi, sebagai sikap menerima suatu keadaan yang mungkin saja berbeda dengan persepsi atau pandangan yang berbeda dengan cara pandang kita, sepanjang tidak bertentangan secara prinsip.
4. Tanggung jawab, adalah kesadaran untuk senantiasa memenuhi kewajiban yang diemban.

² Syakra, Rusdi. 2000. Anomi dan Modal Sosial: Memahami Krisis Multi Dimensional: Jakarta: Puslitbang Kemasyarakatan dan Budaya-LIPI

5. Kerjasama, sebagai cerminan kesatuan semua pihak untuk senantiasa berkontribusi demi kepentingan kelompok yang lebih besar.
6. Kebersamaan, sebagai wujud kesediaan untuk dapat terlibat dalam kegiatan berkaitan dengan kepentingan bersama.
7. Kemandirian adalah sikap dan perilaku yang mengutamakan kemampuan sendiri untuk memenuhi berbagai kebutuhan tanpa tergantung kepada atau mengharapkan bantuan orang lain.
8. Keterbukaan adalah kesediaan menyampaikan secara apa adanya segala hal yang orang lain yang berkepentingan menganggap bahwa mereka perlu mengetahuinya.
9. Keterusterangan adalah kesediaan untuk menyampaikan secara apa yang sesungguhnya yang dipikirkan atau dirasakan tanpa dihalangi oleh perasaan ewuh, pekewuh, sungkan atau takut.
10. Empati adalah kemampuan memahami apa yang dirasakan oleh orang lain atau kemampuan untuk menempatkan diri dalam situasi orang lain.

5.3 Pengaruh Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir terhadap Modal Sosial

Sebagai sebuah aset yang sangat berharga bagi keutuhan masyarakat sebagai kesatuan hubungan sosial, modal sosial memerlukan hasratnya sekelompok manusia yang memiliki sikap saling peduli, serta sebegini besar dari uraian yang telah dipaparkan di atas. Hadirnya SDM yang memiliki kepedulian yang tinggi akan menentukan seberapa kuat sebuah jejaring modal sosial yang terbentuk, sehingga masyarakat yang maju dan sejahtera tidak hanya karena kemampuan ekonominya, tetapi juga kekuatan jaringan sosialnya. Inayah (2012:44) menjelaskan bahwa modal sosial direkatkan melalui sumberdaya yang berasal dari interaksi dalam suatu komunitas. Ikatan tersebut diwujudkan dalam bentuk kepercayaan, resiprositas, norma-norma yang diterima secara bersama serta jejaring sosial, baik antar individu maupun institusi.

Modal sosial dalam ekonomi dapat meningkatkan kekuatan pelaku-pelaku yang ada selain itu dapat meningkatkan efisiensi di dalam perekonomian. Modal – modal sosial seperti nilai dan norma, jaringan, kepercayaan, timbal balik, informasi dan kelompok dalam suatu komunitas dapat menjadikan anggota di dalamnya lebih berdaya dalam memperoleh manfaat pemberdayaan.

Penelitian Andreas dan Savitri (2016) mendapati bahwa program pemberdayaan ekonomi di masyarakat pesisir memberikan pengaruh yang besar terhadap modal sosial yang tumbuh di dalam kehidupan masyarakat tersebut. Hal ini dapat diartikan bahwa program pemberdayaan tersebut semakin mendukung terbentuknya jejaring sosial dan kerjasama antar individu di dalam masyarakat tersebut. Di dalam penelitian lainnya, Abu Samah, dkk (2009) mendapati bahwa masyarakat akan menunjukkan partisipasi mereka sebagai wujud kepedulian terhadap persoalan yang dihadapi oleh masyarakat.

Dari penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa peran modal sosial memang tidak dapat dipungkiri akan membawahkan pengaruh yang sangat baik didalam menyukseskan program pemberdayaan, khususnya di masyarakat pesisir. Hanya saja, hal tersebut harus mendapatkan stimulasi atau ransangan dari pihak pemerintah, ataupun dari pihak organisasi non-pemerintah. Program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat dirasakan sangat membantu masyarakat untuk mengatasi persoalan sosial yang mereka hadapi, khususnya yang berkenaan dengan aspek ekonomi kerakyatan.

5.4 Pengaruh Modal Sosial terhadap Kesejahteraan

Modal sosial telah dipahami bersama, adalah merupakan suatu sumber daya utama yang dibentuk melalui hubungan antar individu pada sebuah kelompok masyarakat. Hubungan ini kemudian dimanifestasikan ke dalam jejaring kerjasama untuk memperkuat dan menopang setiap dimensi-dimensi lainnya dalam modal sosial itu sendiri.

Andreas dan Savitri (2016) mengemukakan bahwa modal sosial yang telah terbentuk dalam masyarakat di Rokan Hilir memberikan dampak positif secara signifikan terhadap meningkat taraf kesejahteraan masyarakat. Adanya kecenderungan untuk saling bertukar kebaikan (hubungan timbal balik) antara individu, ketaatan untuk mematuhi norma-norma sosial yang berlaku, jejaring sosial yang menghubungkan satu sama lain, kepercayaan terhadap sesame serta keinginan untuk selalu berpartisipasi dalam kegiatan kelompok, didapati bahwa masyarakat pesisir tersebut mampu memperbaiki derajat ekonomi mereka sendiri. Berikut ini adalah beberapa penjelasan berkaitan dengan dimensi-dimensi modal sosial yang bergerak secara dinamis dalam memahami fenomena dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di kawasan pesisir Meranti dan Rokan Hilir (Andreas dan Savitri, 2016).

a. Jaringan (Network)

Dimensi jaringan diyakini sebagai dimensi modal sosial yang memberikan dampak yang paling besar. Kekuatan jaringan sosial ini mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap corak kesejahteraan masyarakat pesisir: berasaskan kepada asas kekeluargaan dan kegotongroyongan. Hal ini disebabkan oleh hubungan sosial yang terbentuk sebagai akibat interaksi sosial yang menghubungkan antar individu baik di dalam maupun di luar kelompok masyarakat pesisir. Dalam konteks demikian, hubungan tersebut bersifat mutualis dan cenderung mereduksi sikap-sikap individualistik, sebagaimana yang saat ini dapat ditemukan dengan mudah di masyarakat pesisir saat ini. Apabila seseorang mengalami masalah, maka orang-orang lainnya yang berada dalam jaringan tersebut akan berupaya membantu untuk menyelesaikan masalah tadi. Pada akhirnya, pola ini membentuk kesatuan sosial yang kohesif (Gunawan, 2005:386).

Proses terbentuknya jaringan di antara masyarakat pesisir tadi berlangsung secara alami dan dalam kurun waktu yang lama. Jejaring ini menghubungkan individu/ kelompok di dalam masyarakat tersebut; dan juga antara individu Jaringan antara

kelompok masyarakat pesisir dan jaringan di luar kelompok masyarakat pesisir. Perlahan-lahan, interaksi ini akan membuka berbagai kesempatan dan peluang baru, terutama untuk membentuk jaringan yang jauh lebih luas. Apabila hal ini bisa dipertahankan lebih lama, maka produksi hasil tangkapan akan menjadi lebih meningkat.

Kehadiran tokoh masyarakat juga dirasakan sangat membantu warga untuk memfasilitasi terbukanya jejaring-jejaring baru yang relative tidak dapat terbuka dengan pola-pola biasa. Sebagai contoh, kehadiran tokoh masyarakat akan membuat komunikasi dengan penyedia komoditi di pasar menjadi lebih fleksibel dan tidak terkesan sebagai sebuah bisnis. Selain itu, apabila terjadi masalah yang kemungkinan memberi dampak yang lebih luas, maka kehadiran tokoh masyarakat bersama aparat pemerintah akan semakin meredam gejolak yang mungkin terjadi. Melalui fasilitasi tokoh masyarakat, suatu permasalahan dapat diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan/mufakat.

b. Kepercayaan (Trust)

Selain karena kuatnya jaringan kerjasama, kesejahteraan yang didapatkan oleh masyarakat pesisir, sebagaimana yang diuraikan oleh Andreas dan Savitri (2016), juga ditentukan oleh kepercayaan (*trust*) yang mengikat setiap anggota kelompok. Kepercayaan dalam hal ini meliputi kepercayaan yang merekatkan antar individu maupun antar komunitas. Hal ini tidak terlepas dari sikap kejujuran dan empati yang mereka tanamkan sejak lama. Selain itu, kejujuran ini seolah-olah telah menjadi norma yang melingkupi keseharian penduduk di lokasi penelitian Andreas dan Savitri (2016). Selain itu, sikap jujur ini juga diikuti dengan saling menghargai dan menghormati. Penghargaan biasanya mengikut kepada faktor usia, meskipun juga terkadang, penghargaan ini mengikut kepada status sosial yang diemban oleh seseorang. Sekalipun demikian, hal tersebut tidak mengurangi rasa hormat

seseorang kepada orang lain, tanpa memandang latar belakang sosial dan ekonomi.

Dalam kegiatan penangkapan ikan di laut, kerjasama dan sikap saling percaya juga nampak dengan sangat jelas. Aktivitas menangkap ikan identic dengan kondisi cuaca yang tidak menentu. Apabila tiba waktunya terjadi musim badai, para nelayan dituntut untuk dapat bekerja sama dan saling tolong menolong. Mereka akan mengabaikan faktor yang mungkin menyebabkan seseorang akan mengalami kecelakaan pada saat melaut. Bagi mereka, keselamatan adalah hal yang sangat mereka prioritaskan. Apabila terdapat suatu kondisi yang darurat, kerjasama antara para nelayan akan sangat nampak. Mereka akan meminjamkan peralatan mereka apabila ada yang mengalami kesulitan dalam kegiatan penangkapannya. Oleh karena sikap saling percaya ini begitu kuat, maka setiap peminjaman alat yang dilakukan kepada nelayan lainnya tidak pernah dikhawatirkan bahwa alat tersebut tidak akan kembali.

Lain halnya dengan sikap pinjam meminjam uang. Bagi sebagian nelayan, pinjam meminjam uang mungkin akan dikenakan bunga. Bagi sebagian lainnya, pinjam meminjam uang tidaklah dikenakan Bungan dan akan dikembalikan sesuai dengan jumlah yang dipinjam. Hubungan yang demikian inilah yang sangat membantu mereka dalam menghadapi masa-masa sulit, terutama apabila mereka tidak melakukan aktivitas melaut.

c. Timbal Balik (Reciprocity)

Dengan adanya jalinan kerjasama, pada dasarnya sikap dan hubungan timbal balik sudah terbentuk dengan sendirinya. Adanya keinginan dan kecenderungan untuk dapat saling bertukar nilai-nilai kebaikan menjadikan modal sosial akan sangat nampak sebagai modal utama yang membantu masyarakat nelayan mendapatkan kesejahteraannya. Harper dan Gillespie (1997) menjelaskan bahwa fenomena resiprositi antara anggota masyarakat adalah poal yang dibangun oleh masyarakat yang hidup dalam kondisi yang miskin, bertahan dengan mekanisme

subsisten dan mencari nafkah untuk kebutuhan sehari-hari mereka saja. Hubungan timbal balik ini dapat berbentuk pertukaran Tenaga kerja. Misalnya, apabila terdapat buruh nelayan yang tidak dapat ikut dalam kegiatan menangkap karena alasan sakit, maka seringkali kekosongan itu diisi oleh tenaga kerja lain. Hal ini penting untuk dipahami bahwa setiap aktifitas menangkap ikan, faktor ketersediaan tenaga manusia yang cukup akan menentukan efisiensi dan efektifitas kegiatan penangkapan.

d. Kelompok (Group)

Tinggi rendahnya derajat partisipasi suatu anggota kelompok juga menunjukkan derajat kuat atau lemahnya suatu hubungan yang direkatkan oleh modal sosial. Partisipasi tersebut dipengaruhi oleh jumlah anggota yang menjadi inisiator awal, dan diikuti oleh anggota lainnya; frekuensi kehadiran seseorang yang menjadi figure sentral dalam kelompok, mekanisme pengambilan keputusan yang bersifat inklusif dan menganggap bahwa setiap masukan dapat dipertimbangkan; kontribusi pendanaan serta kesediaan melibatkan anggota keluarga lainnya dalam kegiatan kelompok tersebut.

Apabila terdapat suatu keadaan dimana salah satu anggota kelompok mengalami masalah finansial, biasanya salah satu anggota kelompok (baik secara terbuka ataupun secara diam-diam) akan menyampaikan hal tersebut kepada salah satu anggota kelompok dan akan dibahas secara informal. Hal ini dimaksudkan untuk membantu anggota kelompok tersebut tanpa perlu membuatnya merasa memiliki hutang budi kepada anggota kelompok yang menolongnya.

Selain dalam kelompok kecil, kesulitan finansial yang dialami oleh nelayan juga dapat diselesaikan melalui mekanisme kelompok yang lebih formal, yaitu melalui koperasi. Meskipun pada kenyataannya koperasi nelayan seringkali dikuasai oleh sekelompok juragan atau kekuatan ekonomi informal, namun sikap untuk saling tolong menolong juga masih dapat ditemui.

Peran pemerintah memang diperlukan untuk mengatasi persoalan kemiskinan di kawasan pesisir. Akan tetapi, pemerintah tidak dapat hadir seketika (sebagaimana yang dilakukan oleh anggota kelompok) apabila terjadi kondisi kedaruratan seperti yang telah dijelaskan. Dengan demikian, kita semakin sadar bahwa modal sosial juga memainkan perannya sebagai jarring pengaman sosial melalui kelompok-kelompok yang terbentuk di dalam masyarakat nelayan.

Selain beraktivitas melakukan penangkapan ikan di laut, sebagian anggota kelompok nelayan juga akan melakukan aktivitas ekonomi lainnya. Misalnya mereka akan membuka suatu usaha kecil-kecilan. Dalam kondisi seperti ini, mereka akan memanfaatkan anggota kelompok mereka sebagai pembeli pada peringkat awal memulai dan merintis usaha. Selain bertindak sebagai konsumen, mereka juga akan mempromosikan usaha anggota kelompok mereka ke jejaring yang lebih luas.

e. Norma (*Norms*)

Parameter berikutnya yang memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan adalah kepatuhan terhadap norma yang berlaku di dalam jaringan dan kelompok sosial dimana nelayan tersebut berasal atau beraktivitas sehari-hari. Kepatuhan terhadap norma ini tidak hanya dijalankan oleh kepala keluarga sebagai anggota kelompok, akan tetapi juga ditaati oleh seluruh anggota keluarga yang berada di bawah naungan kepala keluarga nelayan tersebut. Seringkali, pemahaman terhadap norma ini akan berbenturan dengan 1) lahirnya norma baru yang mengatur suatu permasalahan secara lebih formal (misalnya terait persoalan hitang piutang yang telah berlangsung lama); 2) suatu kondisi yang tidak bersesuaian dengan norma yang berlaku secara umum (misalnya faktor sentiment gender yang menempatkan perempuan selalu lebih rendah) dan juga karena 3). Akses terhadap pendidikan yang semakin murah dan mudah dijangkau oleh masyarakat miskin, sebagaimana yang banyak ditemukan di wilayah pesisir.

Seringkali, persoalan hutang pituang berlangsung secara kronis dan sulit untuk diurai. Dalam situasi seperti ini, norma tentang perlunya mendengar petuah-petuah tokoh masyarakat mungkin tidak serta merta menyelesaikan persoalan hutang-pituang tersebut. Apabila hal ini tidak diselesaikan dan tidak memberikan rasa puas bagi salah satu pihak, maka patut untuk diduga bahwa norma sosial yang mengatur tentang hubungan seperti ini akan merujuk kepada norma hukum yang berlaku secara formal. Dengan demikian, keertan hubungan sosial mungkin saja mengalami gangguan, akan tetapi hal ini dimaksudkan untuk memberikan pelajaran kepada anggota kelompok lainnya, bahwa norma positif (hukum) tetap berdiri di atas norma sosial yang diakui secara turun temurun.

Selain itu, kita semua telah memahami bahwa konteks masyarakat nelayan senantiasa dipahami sebagai entitas sosial dengan latar belakang tradisi yang kuat. Selain itu, aktifitas menangkap ikan sedari dulu telah melekat sebagai aktifitas yang dijalankan oleh kaum lelaki, sementara kaum perempuan lebih banyak menunggu di rumah dan mengatur rumah tangga. Persoalan mencari nafkah adalah urusan kaum laki-laki. Tidak semua orang menyadari bahwa setiap hasil tangkapan yang telah dijual, alur tata kelola keuangannya akan diatur oleh ibu-ibu istri nelayan. Artinya, kedudukan perempuan sebagai manajer keuangan keluarga juga harus dipahami sebagai kedudukan yang sangat penting, meskipun nampaknya sedikit bersinggungan dengan tradisi masyarakat pesisir yang sangat berorientasi sebagai kegiatan kaum lelaki.

Kontradiksi variabel norma juga dapat ditelusuri melalui fenomena semakin mudahnya akses pendidikan dasar kepada anak-anak generasi kedua atau generasi ketiga dari masyarakat nelayan. Sebagian besar dari mereka telah mengecap pendidikan formal yang secara otomatis akan membuat mereka tidak lagi bekerja membantu orang tua menangkap ikan, akan tetapi akan mengikuti pendidikan di bangku sekolah. Perubahan ini akan menuntun kepada terbentuknya sebuah norma yang baru dimana

nelayan tidak lagi menjadikan anak usia sekolah sebagai pekerja atau buruh dalam aktifitas menangkap ikan.

Meskipun terkesan menghadikan kondisi yang kontradiktif, namun hal ini perlahan-lahan disadari akan membawa dampak yang lebih positif. Misalnya, kelompok nelayan akan mengganggu pendidikan sebagai kunci utama bagi mewujudkan masa depan yang lebih baik. Dalam hal aktifitas perikanan, pendidikan diharapkan mampu mereduksi aktifitas illegal fishing yang masih marak ditemukan di masyarakat pesisir.

5.5 Kesimpulan

Mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat pesisir adalah sebuah tuntutan yang selalu dibebankan kepada pemerintah, termasuk di negara maju sekalipun. Padahal, modal sosial yang notabene tumbuh secara alami di tengah-tengah masyarakat adalah modal utama yang dapat dioptimalkan kedudukannya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks ini, kesejahteraan tidak hanya berkenaan dengan dimensi ekonomi dan pemenuhan kebutuhan dasar. Kesejahteraan juga berkenaan dengan adanya jaminan sosial yang disebdiakan oleh jaringan yang sudah terbentuk secara alami. Kesejahteraan juga dapat diartikan sebagai terbukanya pemikiran masyarakat tradisional ini untuk mengutamakan pendidikan bagi generasi pelanjut mereka. Mereka boleh khawatir tidak ada yang meneruskan aktifitas perikanan tradisional mereka, tapi dengan pendidikan, perikanan dapat dikembangkan menuju pembangunan perikanan yang berkelanjutan.

BAB 6

MODAL SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

6.1 Sentimen Gender dalam Hubungan Sosial: Sebuah pengantar

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang mengalami pasang surut pembangunan sosial, ekonomi dan demokratisasi. Pembangunan ekonomi ditandai dengan semakin pesatnya pertumbuhan dan optimisme yang dirasakan oleh sebagian besar pelaku ekonomi global. Secara sosial, pemerataan pembangunan juga telah menjangkau kawasan dengan kontur geografis yang relative terpinggir. Namun perkembangan yang paling dirasakan adalah bonus demografi yang didominasi oleh kelompok usia produktif dan berasal dari kelompok perempuan. Dalam berbagai studi pada masyarakat tradisional pertanian dan perikanan, kaum perempuan bertindak sebagai manajer keuangan keluarga yang mengatur sirkulasi keuangan yang secara jumlah tidaklah seberapa, namun dapat menghidupi keluarga.

Coleman (1988:19), sebagaimana dikutip oleh Rangkuty (2018) menyatakan bahwa pada prinsipnya modal sosial memiliki karakteristik dua ciri utama, yaitu merupakan penghubung yang bersifat fleksibel yang mempertautkan setiap strata dalam struktur sosial dan juga berfungsi sebagai fasilitator yang menghubungkan setiap komponen pada struktur dimaksud. Dalam hal ini, muara terakhir dari modal sosial adalah lahirnya kontrak sosial yang memuat adanya kewajiban dari setiap anggota kelompok, informasi yang saling terhubung, aturan, hubungan kerja formal dan perkumpulan sosial. Coleman berpandangan bahwa nilai-nilai dasar yang kemudian dirumuskan sebagai modal sosial dapat dikembangkan sebagai aset bersama dalam mencapai tujuan.

6.2 Pengembangan modal sosial untuk pemberdayaan perempuan

Bagi sebagian orang yang telah memiliki pemahaman tentang pentingnya hubungan sosial dalam sebuah komunitas, mereka akan cenderung untuk memelihara hubungan sosial tersebut. Nilai-nilai yang telah mereka pertahankan sebagai norma yang mengatur mereka berkembang atau mengalami konfigurasi baru. Kelompok perempuan dikenali memiliki *social cohesiveness* yang merekatkan secara afektif, lebih kuat dibanding dengan kelompok laki-laki. Dengan kondisi seperti ini, modal sosial tentunya sangat berpotensi untuk dikembangkan pada kelompok-kelompok kerja yang berbasis kepada gender perempuan. Timbulnya rasa saling percaya, keinginan untuk senantiasa guyub dan empati yang terbangun dalam komunitas akan mendorong semakin kuatnya jalinan sosial di antara mereka.

Penjelasan berikut ini dimaksudkan untuk menunjukkan metode yang dapat dilakukan untuk mengembangkan modal sosial di kelompok perempuan. Diharapkan tidak ada lagi stigma mengenai gender ‘kelas dua’ yang dilekatkan pada kelompok perempuan. Mereka juga mampu menunjukkan keberdayaan diri mereka dalam bentuk yang lebih proporsional.

6.2.1 Membangun Kerja Sama dalam Kelompok

Sejumlah kajian dan penelitian yang pernah dilakukan berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, hampir semuanya menunjukkan pentingnya kedudukan kolektifitas dalam bekerja dan kebersamaan dalam menyusun program pemberdayaan. Dengan melakukan pendekatan secara berkelompok, biaya operasional tentunya akan dapat ditekan dengan manfaat yang dirasakan akan lebih meluas dan menjangkau anggota kelompok lainnya. Pada dasarnya, kegiatan yang bersifat kelompok ini menekankan adanya kerjasama. Mereka akan bergerak dan bekerja guna mewujudkan tujuan bersama yang mereka tetapkan sebelumnya. Komitmen untuk bekerjasama diartikan sebagai komitmen untuk mewujudkan tujuan bersama. Cooley dalam Rangkuty (2018) melalui penelitiannya menggambarkan hubungan sosial yang diartikulasi dalam kehidupan sehari-hari. Ia

menjelaskan bahwa inisiatif kerja sama timbul pertama kalinya ketika sekumpulan orang mulai menyadari akan adanya kesamaan kepentingan. Kemudian, kepentingan ini didukung oleh pengetahuan yang cukup dan memungkinkan untuk dilakukan jalinan kerja sama. Selanjutnya, mereka akan saling mengidentifikasi potensi yang dimiliki oleh calon mitra kerjasamanya. Hal ini pada akhirnya akan menyadarkan bahwa kerjasama yang akan mereka jalin akan membawa mereka kepada terwujudnya tujuan bersama (Rangkuty, 2018).

Dalam perpektif teori modal sosial sebagaimana yang diuraikan pada bahagian sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa kerjasama yang terjadi dalam suatu kelompok (dalam hal ini kelompok perempuan) adalah bentuk hubungan timbal balik (*reciprocity*) antar individu yang tergabung dalam suatu kelompok. Mereka akan bergerak menurut fungsinya masing-masing guna meraih tujuan bersama.

Dalam kondisi tersebut, maka diperlukan hadirnya jaringan kerjasama (*network*) yang berfungsi sebagai saluran kerjasama yang mempercepat terwujudnya tujuan bersama serta mempererat afeksi di antara anggota kelompok. Jaringan merupakan jembatan yang menghubungkan satu pencapaian dari satu anggota dengan pencapaian individual anggota lainnya. Mereka yang awal mulanya terhubung secara formal akan menjadi hubungan yang tumbuh secara tidak formal namun tidak mengurangi substansi kerjasama mereka.

Dalam penelitian Rangkuty (2018) diketahui bahwa keinginan untuk bekerja sama dapat terlihat dari kegiatan yang dijalankan oleh anggota kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Mereka bekerja dan melibatkan diri secara aktif pada kegiatan-kegiatan yang menjadi program kerja kelompok tersebut. Dengan kerjasama yang mereka jalankan dapat berjalan dengan baik, maka hal tersebut akan menjadi inspirasi bagi anggota masyarakat lainnya. Ini pertanda bahwa kerjasama dari sebuah kelompok sosial kecil akan memberikan pengaruh dan dampak yang lebih luas apabila dilakukan dengan baik dan terus memunculkan energy dan aura yang positif kepada masyarakat di sekitar mereka. Partisipasi mereka tidak hanya berkenaan dengan kehadiran secara

fisik, akan tetapi partisipasi mereka menjadi inspirasi bagi menguatnya modal sosial yang mereka tanamkan.

Sikap yang proaktif mungkin saja terdorong oleh motivasi personal: untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau keluarga, atau setidaknya-tidaknya sebagai wadah aktualisasi diri dalam lingkungan sekitar. Lebih dari itu, partisipasi aktif anggota masyarakat juga didorong oleh hubungan kekerabatan yang berasal dari satu atau dua generasi di atas mereka. Tidak jarang mereka akan membicarakan segala kemungkinan, termasuk mempertautkan hubungan kekerabatan mereka dalam satu jalinan pernikahan dalam satu jaringan kekerabatan.

Hubungan yang kuat dan saling memberikan pengaruh satu sama lain diyakini dapat menjadi pembuka peluang kepada anggota untuk bertindak proaktif, sehingga pada akhirnya akan membangun energy positif bagi anggota masyarakat. Secara lebih terinci, Johnson dan Jhonson (1998) menguraikan komponen-komponen yang melekat pada ikatan kerjasama dalam suatu kelompok sosial. Adapun komponen-komponen dimaksud adalah sebagai berikut:

- interdependensi yang saling memberi keuntungan dan saling memberi pengaruh positif untuk mencapai tujuan;
- interaksi secara langsung yang dapat men-*deliver* makna yang disampaikan dalam konteks komunikasi non-verbal, sehingga meningkatkan kesuksesan antara anggota kelompok;
- prinsip akuntabilitas yang sikap tanggung jawab yang diperankan oleh masing-masing anggota;
- komunikasi interpersonal yang dikuasai dengan baik dan dikembangkan dalam kelompok-kelompok kecil (2-3 anggota kelompok); dan
- kerjasama tim yang solid dalam mencapai tujuan.

Kerjasama dalam kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat merupakan rangkaian yang saling menopang satu sama lain. Tujuan kelompok tidak akan dapat dihasilkan tanpa adanya kerjasama, begitupun halnya dengan pemberdayaan kelompok yang tidak dapat diwujudkan tanpa didukung jaringan kerjasama yang bekerja dengan efektif. Hal ini dimaksudkna agar setiap

anggota kelompok sedapat mungkin memhamai kedudukan dan fungsinya masing-masing untuk dapat bekerjasama dengan baik. Inisiator awal dalam program pemberdayaan perempuan biasanya berasal dari kelompok-kelompok kecil yang memberikan inspirasi kepada anggota di sekitarnya, sehingga secara akumulatif akan bekerja secara efektif dalam kelompok yang lebih besar.

Untuk tujuan tersebut di atas, diperlukan adanya budaya yang lebih demokratis dalam kelompok. Apabila dalam suatu kondisi tertentu ditemukan adalah kedudukan yang lebih tinggi antara salah satu anggota terhadap anggota yang lainnya, maka kondisi ini dipandang sebagai sikap untuk tetap saling menghargai secara hirarki sosial. Namun, dalam hal memberikan pandangan dan pendapat kepada pencapaian tujuan bersama, maka hirarki tersebut sebaiknya dikesampingkan untuk sementara.

Meskipun terkesan bahwa terdapat sekat baru dalam sebuah kelompok, namun hal tersebut adalah kondisi yang alami dan tidak dapat dihindari. Yang perlu dikaukan adalah menumbuhkan sikap toleransi untuk dapat menerima keadaan masing-masing. Budaya kerja yang lebih demokratis diyakini akan menumbuhkan sikap saling peduli dan akan turut memperkuat empati di antara anggota kelompok. Budaya demokratis juga akan memunculkan kreatifitas-kreatifitas yang dapat dimanfaatkan oleh anggota sebagai media aktualisasi diri. Budaya demokratis dalam berorganisasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat sangat penting untuk mendorong setiap anggota dalam menyampaikan ide-ide kreatif mereka dalam memberdayakan kelompok sosial, khususnya kelompok perempuan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa norma dalam modal sosial juga tercermin dari sikap anggota kelompok yang lebih demokratis, lebih terbuka dan dapat menerima perbedaan anggota yang lainnya dalam kelompok sosial tersebut.

Hal yang sama juga didapati dalam penelitian Rangkuty (2018), dimana diketahui bahwa budaya demokratis akan menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaan, peduli terhadap sesama anggota, sikap yang terbuka terhadap pandangan orang lain serta sikap untuk senantiasa mengembangkan diri dalam bentuk kreatifitas-kreatifitas baru.

Rangkuty (2018) juga menjelaskan bahwa terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan oleh kelompok sosial SPP untuk meningkatkan efektifitas jejaring modal sosial dalam kelompok perempuan. Pertama, adanya peran yang krusial dari tokoh yang bertugas sebagai pengatur komunikasi, baik komunikasi antara anggota (internal) maupun komunikasi dengan pihak luar (eksternal). Kedudukan pemain kunci disini akan mempertegas, apakah modal sosial dapat memberikan dampak yang signifikan atau hanya bersifat rutinitas sehari-hari. Kedua, adanya upaya secara sistematis dalam membangun jaringan kerja sama dalam memperkuat program-program yang dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat. Kondisi ini memerlukan modal sosial yang secara langsung maupun tidak langsung akan terhubung dengan jaringan sosial dan akan memberikan penguatan bagi masyarakat.

Soetomo (2011) mengetengahkan sebuah pandangan yang sedikit berbeda. Ia menyatakan bahwa dinamika pemberdayaan masyarakat juga terkadang berada dalam kondisi yang sangat dinamis, namun seringkali juga ia berada dalam kondisi yang cenderung vakum. Apabila fasilitasi yang dilakukan dirasakan memberikan manfaat yang signifikan, maka para kelompok-kelompok penerima manfaat juga akan menunjukkan antusiasme. Namun sebaliknya, apabila fasilitasi mulai mengendur, maka pihak penerima manfaat juga tidak lagi menunjukkan semangatnya.

6.2.2 Intensitas Komunikasi dan Informasi

Tidak dapat dipungkiri bahwa keahlian dalam berkomunikasi adalah suatu keahlian yang wajib dikuasai oleh fasilitator. Kemampuan berkomunikasi semacam ini akan melengkapi kecakapan teknis dan penguasaan metode dalam melakukan pendampingan kepada kelompok penerima manfaat/ Empati dan antusiasme merupakan sikap yang senantiasa harus ditampilkan oleh fasilitator. Dalam pandangan penerima manfaat, seringkali fasilitator dianggap sebagai orang yang telah memahami banyak hal terkait pekerjaan teknis yang ia jalankan. Sehingga, hal ini akan memunculkan sikap rendah diri (meskipun belum tentu

hal tersebut benar adanya). Fasilitator dapat memanfaatkan keseganan penerima manfaat untuk mengenalkan pola-pola pemberdayaan yang baik kepada masyarakat.

Bahkan, seorang fasilitator pemberdayaan perempuan diharapkan dapat terjun langsung dan tinggal di desa atau lokasi binaan dalam waktu satu pekan atau lebih. Proses ini akan meleburkan keseganan dari pihak masyarakat, sekaligus memberikan kesempatan kepada fasilitator untuk dapat secara seksama memahami karakteristik sosial yang ada di wilayah binaan mereka. Diharapkan fasilitator dapat membaaur dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Dalam kondisi bahwa fasilitator adalah orang yang terlatih, namun dalam konteks pemberdayaan perempuan, fasilitator wajib memahami pola artikulasi modal sosial yang diperankan oleh suatu kelompok. Fasilitator harus memahami bagaimana alur distribusi kewenangan dan alur komunikasi yang bersifat perintah dari tokoh, atau pun sifatnya hanya arahan. Apabila fasilitator gagal dalam mengidentifikasi bentuk jaringan sosial yang dijalankan oleh masyarakat di kelompok binaan, maka fasilitator akan menghadapi kesulitan yang sangat besar dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat.

Selain faktor-faktor tersebut, kemampuan penguasaan metode lapangan juga harus diidentifikasi sejak awal. Seorang fasilitator perlu memahami sumber informasi-informasi yang ia dapatkan. Dalam pengalaman penulis di beberapa kali melakukan penelitian di masyarakat pesisir, penulis banyak mendapati orang-orang yang secara sengaja melakukan pendekatan tertentu kepada aparat pemerintah setempat (lurah dan / atau perangkat kelurahan) serta kepala desa (atau perangkat desa).

Usulan yang dirumuskan dalam kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat biasanya didominasi oleh usulan yang dibawah oleh kelompok-kelompok dominan. Mereka biasanya mengemukakan argumentasi mengenai persoalan yang mereka hadapi yang seolah-olah merupakan persoalan bersama. Sementara itu, anggota kelompok lain (yang jumlahnya bisa saja sangat dominan dan cukup banyak) cenderung untuk tidak memberikan komentar secara terbuka.

Apabila dilakukan pengambilan keputusan dengan cara seperti hanya merujuk kepada aspirasi tokoh masyarakat, maka pembangunan yang dihasilkan mungkin tidak dapat menyelesaikan masalah yang sesungguhnya. Keputusan menjadi elitis dan memberikan penegasan dan pengakuan terhadap kekuatan-kekuatan kelompok tertentu, sekaligus menjadikan keputusan tersebut menjadi tidak inklusif lagi. Sementara itu, suara kelompok perempuan akan sedikit dibatasi. Hal ini menunjukkan bahwa inferioritas kelompok perempuan mungkin akan ditemukan.

Kelompok perempuan dalam masyarakat tradisional memegang peranan penting, khususnya dalam urusan keuangan keluarga. Dalam pembahasan berikut, penulis lebih mengarahkan pembahasannya kepada hirarki sosial di masyarakat nelayan yang cenderung memberi ruang kepada kelompok laki-laki, mengingat aktivitas seperti ini merupakan aktifitas yang didominasi oleh kelompok laki-laki.

Sebagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan di masyarakat nelayan, identifikasi persoalan yang dihadapi oleh masyarakat tersebut memang harus dipastikan telah mencerminkan kondisi masalah yang dialami oleh masyarakat, terutama mereka yang tidak memiliki akses yang kuat terhadap kekuasaan. Lemahnya proses identifikasi masalah yang bermuara kepada tidak jelasnya sumber masalah merupakan salah satu penyebab mengapa persoalan kemiskinan tidak dapat diselesaikan. Program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan program yang disusun dari pertimbangan-pertimbangan yang tidak akurat dan tidak mengakar kepada sumber masalah.

Disinilah diperlukan keberpihakan fasilitator untuk membuka ruang diskusi sekaligus membuka peluang yang sama kepada setiap strata sosial untuk betul-betul didapatkan identifikasi masalah yang sedang dialami oleh masyarakat calon penerima manfaat (*beneficiaries*). Meskipun pada kenyataannya penjangkaran aspirasi masyarakat diketahui telah dilakukan secara demokratis, namun fakta lainnya yang harus kita lihat adalah bahwa persoalan kemiskinan dan ketidakberdayaan masyarakat juga masih terus terjadi.

Pendekatan yang dilakukan selama ini mungkin saja sudah dibangun dengan pendekatan dua-arah. Namun juga masih kita temukan dimana komunikasi menjadi pola komunikasi yang satu arah dimana posisi pemerintah atau fasilitator masih sangat dominan. Program-program tersebut belum menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan (biasanya karena alasan efisiensi). Ekses lainnya yang ditimbulkan adalah tidak adanya ruang untuk mengklarifikasi apabila terdapat perbedaan persepsi. Jika pola yang dibangun hanya bersifat satu arah, maka program pemberdayaan akan berjalan sesuai tafsiran masing-masing masyarakat. Dapat dipastikan hasilnya akan sangat seragam dan baya yang ditimbulkan juga akan cukup besar (tidak efisien).

Rangkuty (2016) menjelaskan bahwa realitas program pemerintah masih dibangun dengan pendekatan top-down secara lebih dominan disbanding dengan pendekatan bottom up dimana seharusnya pendekatan ini lebih dilakukan secara dominan. Nilai-nilai modal sosial cenderung, partisipasi menjadi tidak dinamis. Sepatutnya, program pemberdayaan masyarakat dapat berfungsi sebagai inspirasi bagi lahirnya partisipasi dan pemberdayaan secara lebih optimal, dengan berasaskan kepada potensi lokal, termasuk modal sosial yang sudah dipertahankan oleh masyarakat, khususnya masyarakat pesisir.

6.2.3 Menjaga Kohesi Sosial dan Inklusi Kelompok

Konsep kohesi sosial merupakan konsep yang wajib dipahami bagi mereka yang bergelut di bidang pemberdayaan masyarakat. Konsep ini berkaitan dengan sikap dan perilaku seseorang atau sekelompok orang untuk merasa menjadi bagian dari orang lain, berkenan menerima kehadiran dan keberadaan seseorang atau suatu paham yang dibawah orang lain. Kohesi sosial menentukan derajat kerapatan suatu modal sosial dalam sebuah komunitas.

Kohesi sosial bertumbuh bersama dengan sikap pergaulan yang inklusif. Kohesi akan terus bertahan seiring semakin akrabnya pergaulan. Akan tetapi, persoalan mungkin terjadi apabila kohesi sosial ini bergerak secara vertical: adanya

penerimaan terhadap seseorang yang berasal dari strata sosial yang berbeda, baik itu mereka yang lebih kaya, maupun kepada mereka yang tidak memiliki kemampuan finansial.

Apabila seseorang akan memasuki kawasan pemukiman masyarakat nelayan tradisional, maka dianjurkan kepada yang bersangkutan untuk dapat menyesuaikan diri. Dimulai dengan cara berpakaian yang bersesuaian dengan kondisi pergaulan masyarakat. Jika diperlukan, seseorang dapat mengenakan pakaian sebagaimana yang umum digunakan. Maka, penerimaan masyarakat terhadap pendatang ini akan menimbulkan respon positif.

Demikian pula sebaliknya. Apabila terdapat sekumpulan juragan dalam komunitas nelayan, maka nelayan kecil yang bergaul dengan para juragan akan berusaha beradaptasi dengan sikap dan pola pikir para juragan. Dengan demikian, mereka akan dengan sikap terbuka menerima dan memperlakukan si nelayan tadi.

Sikap yang seperti ini pada dasarnya adalah sikap yang dilakukan oleh kelompok dominan kepada kelompok yang minoritas, untuk tujuan:

1. menumbuhkan rasa percaya diri kepada mereka yang dianggap kurang mampu
2. menumbuhkan sikap empati kepada mereka yang masuk ke komunitas yang kurang mampu.

Sistem sosial yang kohesif seperti ini, program pemberdayaan masyarakat akan sangat mudah diimplementasikan. Diperlukan pemahaman yang kuat terhadap system sosial yang dianut oleh masyarakat, calon penerima manfaat dari program pemberdayaan. Dalam hal ini, modal sosial data dipastikan akan menjadi instrument penting (beserta segenal variabel) dalam mensukseskan setiap program pemberdayaan masyarakat. Kita perlu menyadari bahwa ketersediaan dana yang memadai seringkali dipandang sebagai masalah utama yang hadapi oleh pemerintah maupun masyarakat. Namun hal tersebut akan dapat diatasi dengan mudah apabila program tersebut memanfaatkan jejaring modal sosial.

Seorang fasilitator harus mampu melakukan pemetaan terhadap potensi dan ancaman yang didapatkan selama di lapangan. Apabila pemetaan ini tidak dapat memotret kondisi real yang terdapat di dalam masyarakat, maka program pemberdayaan akan sulit diwujudkan dengan baik. Kondisi sosial berkenaan dengan strata sosial yang saling terhubung secara alami dan menjangkau kepada aspek yang bersifat personal (keluarga atau kerabat). Olehnya itu, bersikap empati adalah modal penting dalam pemberdayaan masyarakat.

6.3. Kesimpulan

Secara keseluruhan, penanggulangan kemiskinan di kawasan pesisir akan sangat efektif apabila memanfaatkan modal sosial yang dianut oleh masyarakat tersebut. Masyarakat pesisir tergolong kepada masyarakat yang masih dipengaruhi secara signifikan oleh nilai-nilai budaya dan leluhur. Mereka belajar tentang bagaimana menagap ikan di laut dari para leluhurnya. Pengetahuan dan ilmu tradisi yang mereka jalankan adalah nilai-nilai (norma) yang nantinya akan menyusun terbentuknya modal sosial yang kohesif pemanfaatan modal sosial dalam penanggulangan kemiskinan di daerah ini sudah mulai dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat secara umum, bersifat *sustainable*, dan kolektif. Meski kelompok yang dominan berada di lingkungan internal permukiman dan beranggotakan masyarakat permukiman itu sendiri, namun akses terhadap sumber daya dari luar yang semestinya terbatas ternyata bisa diatasi dengan adanya keterbukaan antar warga masyarakat. Keterbukaan ini mengakibatkan informasi baru dari luar dengan cepat terserap dan masyarakat di tingkat bawah tak lagi gagap teknologi.

Kecenderungan untuk berhubungan dengan orang-orang dengan kemampuan ekonomi setara memang masih tinggi, namun hal ini tidak menyebabkan masyarakat sulit memperoleh bantuan bila terkena musibah mendadak. Sehingga ketika di antara warganya terkena musibah mendadak dan memerlukan bantuan orang lain, mereka senantiasa siap membantu mengurangi beban tersebut secara bersama-sama. Modal sosial setempat pun dapat

dimanfaatkan dengan maksimal untuk menunjang kegiatan-kegiatan yang lebih produktif.

BAB 7

PEMBANGUNAN MODAL SOSIAL MENUJU MASYARAKAT YANG LEBIH BERDAYA

7.1. Latar Belakang

Dengan karakteristik hubungan sosial yang masih sangat kohesif, maka wajar saja apabila jejaring yang terbangun melibatkan sebuah kompleksitas yang tidak sederhana dan cukup mendalam. Kelompok-kelompok penguasa atau mereka yang memiliki kepentingan politik dan kekuasaan serta akses terhadap sumber daya yang besar kerap kali memanfaatkan jejaring sosial seperti ini untuk kepentingan merebut kekuasaan dan mempertahankannya.

Dari berbagai uraian yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, modal sosial dianggap sebagai salah satu solusi untuk keluar dari kemiskinan. Selain itu, modal sosial juga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan yang lebih besar. Tidak dapat dipungkiri bahwa kekuatan modal sosial yang kita miliki saat ini merupakan salah satu variabel penting dan sangat berpengaruh yang memperkokoh proses demokratisasi yang telah berhasil kita bangun dalam beberapa dekade terakhir. Masyarakat menjadi semakin mandiri dalam mengorganisir diri mereka sendiri. Mereka tidak lagi perlu menakuti intimidasi dari kelompok-kelompok besar yang sewenang-wenang menggunakan kekuasaannya. Hal ini dapat pula berarti bahwa apabila proses demokratisasi tersebut terbangun di atas jejaring sosial yang independen dan berfokus kepada kemandirian masyarakat, maka pembangunan yang berkeadilan akan dapat diwujudkan.

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya bahwa faktor nilai dan norma adalah faktor yang sangat

fundamental yang membentuk corak modal sosial dalam sebuah masyarakat. Hal tersebut memungkinkan mereka yang menjadi bagian dari kelompok tersebut dapat bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Hal tersebut berarti bahwa kepercayaan merupakan kunci utama dalam mewujudkan modal sosial. Kepercayaan adalah instrument penting yang membentuk jejaring sosial yang secara akumulasi akan bergerak menuju pencapaian cita-cita bersama dalam masyarakat. Norma-norma yang mengikat komunitas tersebut meliputi kejujuran, komitmen atas tanggung jawab masing-masing serta hubungan resiprositas yang menciptakan perasaan senasib dan sepenanggungan.

Jika kita mencermati secara sekilas, kita dapat membayangkan wujudnya sebuah jejaring yang kompleks (demokratisasi) yang dimulai oleh adanya sikap saling percaya dalam sebuah kelompok sosial. Nilai-nilai yang saling mendukung satu sama lain berasal dari sebuah unit sosial bernama keluarga. Nilai tersebut tumbuh sebagai nilai positif yang saling terkait dengan nilai positif lainnya di luar dari keluarga, namun masih dalam lingkungan atau kelompok kecil, misalnya dalam organisasi Rukun Tetangga atau Rukun warga. Demikian pula sebaliknya, norma-norma positif yang berasal dari lingkungan akan dibawa masuk ke rumah oleh individu-individu tersebut, sehingga terwujud hubungan yang timbal-balik (*reciprocity*) antara anggota keluarga, keluarga serta kelompok kecil dalam lingkungan di sekitar rumah.

Apabila kondisi seperti ini terwujud secara konsisten dalam waktu yang lama, maka upaya mewujudkan pemberdayaan masyarakat pada level mikro akan sangat mudah dilakukan. Semua potensi sosial tersebut diawali oleh adanya kesadaran akan potensi modal sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat. Kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat yang digerakkan oleh institusi formal seperti pemerintah, hanya dapat berhasil apabila program tersebut mendapat dukungan dari masyarakat. Dukungan berupa adanya sikap saling percaya akan membentuk koordinasi secara

alamiah yang menghubungkan setiap individu dan akan bergerak sebagai gerakan bersama.

7.2 Kedudukan Jaringan Kerjasama dalam Pemberdayaan Masyarakat

Sebagai sebuah konsep sosial yang cukup dinamis, modal sosial terus berkembang mengikuti gerak-gerak kelompok sosial yang menciptakan sebuah jaringan kerjasama antar kelompok. Upaya mewujudkan kesejahteraan, dalam hal ini pemenuhan kebutuhan sehari bagi setiap anggota kelompok akan bersinggungan dengan upaya yang sama yang dilakukan oleh anggota kelompok yang lainnya. Pada suatu saat tertentu, kebiasaan interaksi, kolaborasi dan kerjasama ini melahirkan kemampuan untuk memainkan peranan masing-masing, sehingga pencapaian tujuan dapat dilakukan dalam tempa yang relative lebih singkat dari sebelumnya. Di dalamnya juga akan secara otomatis menciptakan pola *reward and punishment*, walaupun hal ini tentunya sangat cair. Dengan pola seperti ini, kedudukan dan peran pemerintah sebagai pemantik (*trigger*) menjadi lebih ringan. Pada akhirnya akan terwujud semacam *self-governance* dimana pemerintah tidak lagi terlibat lebih jauh. Kolaborasi akan menciptakan demokratisasi menjadi semakin sehat, dan kesemuanya itu berasal dari sikap saling percaya dan ketaatan terhadap norma yang diberlakukan secara alamiah.

7.3 Kedudukan dan Urgensi Modal Sosial dalam Tatanan Kehidupan Bermasyarakat

a. Pemerintahan yang baik dimulai dari institusi masyarakat yang berdaya

Aset terbesar sebuah masyarakat yang stabil secara sosial adalah dimulai dari konsistensi mempertahankan modal sosial untuk tumbuh secara sehat. Tidak mungkin kita menemukan suatu masyarakat yang stabil secara politik dan aman secara sosial

apabila didalamnya tidak tercipta sikap saling percaya dan keinginan yang kuat untuk saling bekerjasama. Olehnya itu, tidaklah berlebihan apabila kita mengatakan bahwa modal sosial adalah asset terbesar sebuah masyarakat yang stabil. Norma yang mengikat dan mempersatukan mereka akan berfungsi sebagai penggerak dan regulator hubungan antar komponen dalam masyarakat. Kebiasaan tersebut akan bertahan dan berubah menjadi budaya lokal, melembaga seiring perjalanan peradaban masyarakat tersebut.

Dengan lahirnya masyarakat yang semakin mampu mengorganisir diri mereka sendiri, maka pemerintah tidak perlu berbuat banyak selain menjadi agar system seperti ini dapat bertahan lebih lama. Dalam perkembangannya, masyarakat seperti ini juga akan mampu memecahkan persoalannya sendiri tanpa perlu melibatkan institusi formal seperti polisi atau aparat pemerintah setempat. Tipikal masyarakat ini (bagi sebagian orang) disebut sebagai masyarakat sipil (*civil society*).

- b.** Peran masyarakat sipil dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Konsep *governance* yang selama ini dirujuk oleh berbagai institusi global seperti Bank Dunia adalah berkenaan dengan artikulasi kekuasaan yang digunakan dalam mengelola sumber daya yang dimiliki oleh sebuah negara untuk mewujudkan pembangunan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh semua anggota masyarakat serta bermuara pada terwujudnya masyarakat yang sejahtera. Indikator pencapaian kesejahteraan seperti ini dapat diketahui dengan mencermati sejauh mana sebuah negara mampu mengendalikan penduduknya, mengurangi kemiskinan serta menciptakan kondisi ekonomi yang stabil sehingga masyarakat memiliki banyak pilihan untuk mengembangkan dirinya sendiri.

Dalam mewujudkan cita-cita tersebut, pemerintah harus bekerjasama dengan masyarakat serta menempatkan masyarakat

sebagai stakeholder utama dalam pembangunan. Bangsa Indonesia telah merasakan bagaimana getirnya menjadi sebuah negara dimana birokrasi adalah alat penguasa. Birokrasi pada masa itu sangat kaku, otoriter dan peran pemerintah terkesan absolut, dimana pada saat yang bersamaan masyarakat tidak dapat menyampaikan aspirasinya kecuali mengikuti saran pemerintah. Hubungan antara pemerintah-masyarakat terwujud sebagai hubungan subordinat. Padahal, pemerintah bekerja seharusnya untuk kepentingan masyarakatnya.

Hal ini mengingatkan kepada kita bahwa pemerintah tidak dapat melakukan semua pekerjaannya sendiri. Ia harus menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai sumbu utama roda pemerintahan. Pengelolaan sumber daya juga mungkin saja melibatkan sektor swasta dan institusi sosial lainnya. Akan tetapi, kendali utama tetap dikendalikan oleh pemerintah dengan memperhatikan kebutuhan masyarakatnya.

Dengan demikian, tanggung jawab untuk menyelesaikan persoalan sosial ekonomi masyarakat adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat itu sendiri. Ketiga komponen ini diharapkan dapat terhubungan dan membentuk sebuah simbiosis yang mutualisme.

c. Kelembagaan lokal sebagai pembentuk modal sosial masyarakat pada level mikro

Definisi konsep 'lokal' dalam tulisan ini merujuk pada tatanan masyarakat berskala kecil. Konsep ini bisa diartikan sebagai masyarakat pada level RT, RW atau setinggi-tingginya pada level kecamatan. Dalam perpektif yang berbeda, konsep 'lokal' sering juga diartikan sebagai sifat yang tidak kasat mata. Misalnya berkaitan dengan sikap masyarakat yang masih menjunjung nilai-nilai yang berasal dari para leluhur mereka. Dalam kajian modal sosial, istilah 'lokal' lebih sering merujuk kepada kedua konsep tersebut di atas. Sehingga, apabila konsep lokal dilekatkan dengan konsep institusi (lembaga) dan melebur menjadi konsep lembaga

lokal, maka konsep tersebut merujuk kepada asosiasi komunitas setempat menerima legitimasi (baik secara formal maupun informal) untuk mengurus sebagian tugas pemerintahan umum dan pelayanan-pelayanan administratif yang sesungguhnya adalah masih merupakan tugas pemerintah. Dengan menerima kompensasi melaksanakan tugas dengan jumlah yang sangat kecil, peran institusi lokal ini menunjukkan bahwa ‘sikap saling percaya dan wujudnya rasa kekeluargaan adalah lebih utama dan selalu menjadi prioritas penting’ bagi mereka yang menganggap bahwa modal sosial adalah merekat kohesivitas masyarakat setempat serta senantiasa memberikan manfaat bagi pemerintah setempat.

Dengan demikian, institusi lokal pada dasarnya dapat membentuk suatu jaring pengaman sosial (*social safety net*). Dalam kondisi kebencanaan, institusi lokal akan bekerja di lini terdepan, mendahului pemerintah atau aparat berwenang, untuk mengambil tindakan mereduksi dampak yang lebih besar. Sebagai contoh, apabila terjadi kemalingan, maka pihak RT dan RW adalah institusi yang paling pertama mengambil langkah-langkah penanganan (misalnya, pihak RT akan berkoordinasi dengan aparat setempat). Ataupun jika tidak, pihak kepolisian akan mengkonfirmasi keadaan yang dialami oleh korban menurut perspektif ketua RT.

Kehadiran institusi lokal seperti ini bukanlah didasari atas kepentingan pribadi. Sehingga, kedudukan mereka akan sangat penting dalam pemerintahan lokal. Sikap saling percaya dan saling melindungi satu sama lain membuktikan bahwa institusi lokal telah mendudukan modal sosial sebagai pondasi utamanya.

d. Pembangunan dari dalam (*development from within*) sebagai wujud keberdayaan masyarakat

Wujud ideal dari modal sosial adalah hadirnya masyarakat yang secara mandiri dapat mengatur dirinya secara otonom. Modal sosial yang bekerja secara efektif akan mewujudkan masyarakat yang mampu menciptakan peluang-peluangnya sendiri, termasuk

menciptakan keberdayaannya sendiri. Urusan pemerintahan umum sebagaimana diketahui merupakan tanggung jawab institusi pemerintahan di level kelurahan dan kecamatan. Akan tetapi, dalam kondisi tertentu, suatu masyarakat tidak lagi memerlukan penanganan yang intensif dari pemerintah oleh karena kemandirian dan keberdayaan yang telah mereka ciptakan sendiri. Meskipun demikian, peran pemerintah setempat juga tetap dibutuhkan. Misalnya, apabila diperlukan penanganan yang lebih teknis (mis: pemadam kebakaran, ambulance dan utilitas umum), pihak pemerintah setempat juga harus menunjukkan perannya untuk mengkoordinasikan dengan permasalahan tersebut kepada lini teknis.

Apabila masyarakat telah sanggup menata kehidupannya secara mandiri, mampu merencanakan masa depannya dan mampu menyelesaikan permasalahannya (pada level elementer), maka peran pemerintah menjadi lebih ringan.

7.4. Kesimpulan

Tidak dapat kita pungkiri bahwa karaktersitik masyarakat Indonesia yang dibangun dari akar budaya leluhur merupakan pola dasar yang membentuk karakteristik modal sosial masyarakat kita. Kehadiran modal sosial tersebut sesungguhnya jauh mendahului konsep modal sosial yang dikenalkan oleh para ahli. Modal sosial masyarakat Indonesia bergerak tanpa dipandu oleh teori modal sosial. Ia terbentuk dari norma, sikap saling percaya dan hubungan timbal-balik yang sememangnya adalah ciri dan karakteristik bangsa ini.

Teori dan konsep modal sosial yang dikenalkan oleh para ilmuwan dari Barat tidaklah begitu sulit untuk diterjemahkan ke dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Ia bahkan tidak lebih dari sekedar kacamata tanpa lensa, hanya terdiri dari *frame* yang membatasi penglihatan, tetapi tidak membantu mengubah bentuk objek: dari kabur menjadi terang. Dengan teori modal sosial, semua cukup terang dan cukup mudah untuk ditafsirkan.

Pembangunan modal sosial dalam tatanan masyarakat di Indonesia lebih tepatnya digunakan untuk mereduksi dampak-dampak pembangunan. Dalam beberapa bab sebelumnya, kita telah membahas kedudukan dan urgensi untuk menggugah kembali modal sosial masyarakat kita di sektor pertanian dan perikanan. Modal sosial juga sangat penting untuk didalami lebih jauh dalam memaknai dinamika gender yang terus berkembang. Hal ini mengingat struktur sosial masyarakat tradisional Indonesia yang sangat paternalistic dan cenderung mendudukkan kelompok perempuan sebagai sub-ordinat dari kelompok dominan (penguasa dan hubungan antar-gender).

Terkait isu gender, fenomena yang kontradiktif justru kita temukan di masyarakat tradisional kita, terutama mereka yang bergantung pada sumber alam (agraris dan maritim). Kelompok perempuan adalah manajer keuangan keluarga yang berpikir lebih keras untuk 1) mengatur keuangan keluarga; 2) mengurus rumah tangga dan 3) sebagian bekerja mencari nafkah membantu kepala keluarga.

Sentimen gender akan terus berkembang. Hal ini bermakna bahwa dalam konteks pemberdayaan masyarakat, pembangunan modal sosial akan terus berkembang, seiring demokratisasi yang terbentuk secara tradisional dalam masyarakat akibat penetrasi budaya dari luar yang mengedepankan kedudukan yang setara serta akses kepada sumber daya yang semakin terbuka.

BAB 8

PEMBANGUNAN MODAL SOSIAL BERKARAKTER KEPAMONGPRAJAN

8.1. Pengertian Pamong Praja

Ketika kita mendengar perkataan ‘pamong praja’, pikiran kita mungkin langsung tertuju pada sosok polisi pamong praja yang dapat dengan mudah kita temukan di kantor-kantor pemerintahan, pusat-pusat keramaian rakyat (pasar, terminal), atau bahkan di tempat-tempat yang cenderung dianggap sebagai daerah rawan konflik sosial di kota-kota besar. Figus polisi pamong praja bukanlah cerminan Pamong praja dalam pengertian yang sesungguhnya.

Dari komposisi kata yang menyusunnya, pamong praja terdiri dari dua kata, yaitu kata ‘pamong’ dan kata ‘praja’. Rangkaian dua kata ini adalah satu kesatuan yang memiliki makna yang tersendiri. Asal usul kata ‘pamong praja’ adalah berasal dari bahasa Jawa (Sallata, 1983). *Pamong* berarti orang yang ”mengemong” (membina atau membimbing). Sedangkan *praja* berarti negara, rakyat, kawula, kediaman, kedudukan, negeri, atau daerah. Jadi, pamong praja berarti pembina dan pembimbing rakyat di suatu negara/daerah.

Beberapa pendapat lainnya juga telah dikemukakan oleh para ahli pemerintahan. Mereka memiliki penafsiran yang hampir sama, meskipun terdapat sedikit perbedaan, sebagaimana berikut ini:

1. Djenal Hoesen Koesoemahatmadja (1978:2) menjelaskan bahwa pamong praja adalah perangkat pemerintahan seperti gubernur, residen, bupati, patih, walikota, wedana, dan asisten wedana, yang ditugaskan oleh pemerintah pusat

sebagai wakil pemerintah pusat di suatu daerah pemerintahan, sebagaimana dimuat dalam penjelasan UU No.6/1959 tentang Penyerahan Tugas-Tugas Pemerintah Pusat Dalam Bidang Pemerintahan Umum, Perbantuan Pegawai Negeri Dan Penyerahan Keuangannya Kepada Pemerintah Daerah;

2. Bayu Suryaningrat (1980:7) menguraikan pandangannya tentang pamong praja sebagai pejabat pemerintah pusat yang ada di daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum. Dalam arti sempit, pejabat tersebut adalah kepala wilayah, sedangkan dalam arti luas termasuk dengan stafnya;
3. Soleh dan Trisantonno (2001:20) menjelaskan sosok pamong praja sebagai perangkat atau pejabat pemerintah yang ada di daerah yang tugasnya melaksanakan urusan pemerintahan umum/ pemerintahan pusat.

Dari beberapa pandangan tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pamong praja adalah aparatur pemerintah yang berfungsi sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum dan urusan pemerintahan lainnya berdasarkan azas dekonsentrasi. Fungsi-fungsi kepemimpinan pemerintahan umum adalah pertautan utama yang menambatkan konsep pamongpraja. Fungsi pemerintahan umum (sebagaimana yang diperankan oleh lurah dan camat) mengharuskan dimilikinya kompetensi sosial yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang dipimpinnya dalam suatu wilayah administratif.

8.2. Penting menguasai jaringan sosial bagi Pamong Praja

Sebagai konsep ideal seorang aparatur pemerintahan, penguasaan terhadap wilayah dan kemampuan menterjemahkan perintah atasan adalah kunci sukses seorang pamong praja. Mereka diharapkan menguasai bentuk-bentuk komunikasi informal yang kerap kali justru lebih efektif ketimbang komunikasi formal

sebagai sebuah struktur yang kaku. Kemampuan menjalankan perintah dari pimpinan kemudian dimaknai pula sebagai indikator kesuksesan seorang pamong praja. Hal tersebut berimplikasi kepada nilai-nilai loyalitas seorang bawahan terhadap perintah pimpinannya. Dengan mencermati kondisi di atas, seorang pamong praja harus dapat memetakan potensi jejaring di atasnya, serta mampu memetakan konflik yang mungkin berpotensi terjadi dalam organisasinya. Penguasaan dan pembacaan terhadap jaringan tersebut adalah mutlak dikuasai oleh seorang pamong praja.

Selain melaksanakan fungsi-fungsi delegatif, seorang pamong praja juga diharapkan memiliki kemampuan untuk menjalankan kewenangan-kewenangan atributif. Fungsi ini sangat lazim ditemukan dalam diri seorang kepala wilayah, baik itu Bupati/ Walikota, camat, lurah maupun kepala desa.

Dalam diri seorang camat, telah dilekatkan suatu kewenangan atributif. Dengan sendirinya, camat tidak selalu menunggu arahan dari atasannya, melainkan ia juga dapat menunjukkan kapasitasnya sebagai seorang pemimpin atau kepala wilayah. Dengan demikian, penguasaan jejaring sosial (sebagai salah satu instrument utama modal sosial) adalah hal yang mutlak untuk dikuasai. Seorang camat harus memahami pelapisan sosial yang terbentuk di wilayahnya, baik itu stratifikasi yang berasal dari garis kekeluargaan dan kekerabatan, maupun stratifikasi yang terbentuk secara formal, yaitu pembedaan-pembedaan yang disebabkan oleh kedudukan formal di tempat kerja.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pemerintahan daerah saat ini diwarnai oleh intervensi politik yang sangat kuat, khususnya pada masa-masa menjelang pemilihan kepala daerah. Pamong praja seringkali tidak dapat melepaskan dirinya dari kungkungan kepentingan politik dari atasannya (yang memang dipilih melalui sebuah proses politik), termasuk pula tekanan yang berasal dari anggota parlemen dari daerah yang ia pimpin. Dalam kondisi seperti ini, kepemimpinan pamong praja mengalami perubahan; dari praktek pemerintahan menjadi seni pemerintahan. Penguasaan terhadap kondisi sosial masyarakat adalah instrument penting

dalam memainkan pemerintahan sebagai sebuah seni: jika gagal memahami peta dan jaringan sosial, maka seorang pamong praja dapat dianggap tidak cakap sebagai kepala wilayah.

Salah satu fenomena lainnya dalam konteks kepamongprajaan yang kerap ditemukan di lapangan adalah tidak adanya kata 'tidak' apabila mendapat tugas dari pimpinan. Fenomena ini mengandung beberapa tafsiran. Yang pertama, seorang pamong praja harus senantiasa menunjukkan loyalitasnya terhadap organisasi, meskipun faktanya terdapat banyak pimpinan yang memanfaatkan organisasi untuk kepentingan pribadi. Akibatnya, tidak sedikit pamong praja yang terpaksa menanggung akibat dari 'loyalitas' yang salah seperti ini. Tafsiran kedua adalah, seorang pamong praja enggan menolak permintaan dari warganya, terutama bagi mereka yang sangat memerlukan pertolongan, bahkan dalam kondisi waktu dan situasi yang tidak lazim. Dalam kondisi sedemikian ini, seorang pamong praja akan bereaksi dengan segera. Dari dua fenomena di atas, penulis ingin mengetengahkan suatu pandangan bahwa 'penguasaan terhadap potensi sosial (jejaring sosial) adalah mutlak'. Seorang pamong praja sepatutnya memiliki sensitifitas apabila merasakan bahwa perintah atas mungkin saja dapat berakibat buruk. Dalam kondisi seperti ini, ia dapat mengkonfirmasi kepada orang-orang di sekelilingnya mengenai potensi-potensi masalah yang mungkin terjadi, sehingga ia terhindar dari akibat hukum.

Pada kondisi yang kedua, seorang pamong praja harus menguasai tokoh-tokoh penting di wilayahnya, ataupun orang-orang yang dianggap dapat membantunya dalam mengatasi masalah yang sifatnya urgen dari warga. Seorang camat harus memiliki jaringan yang kuat kepada tenaga kesehatan, pemadam kebakaran, aparat keamanan dan tokoh-tokoh kunci lainnya.

Dari kondisi sedemikian ini, dapat disimpulkan bahwa prasyarat utama yang wajib dikuasai oleh seorang calon pamongpraja adalah penguasaan terhadap jaringan sosial di wilayahnya. Jaringan sosial ini meliputi jaringan-jaringan yang dapat membantu untuk mengidentifikasi potensi positif serta

potensi ancaman (konflik) di wilayahnya dan disekitar kawasan wilayahnya.

8.3. Penting menguasai nilai-nilai sosial bagi Pamong Praja

Senada dengan uraian sebelumnya, seorang pamong praja juga dituntut memiliki sensitivitas sosial di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di lapangan. Kemampuan dalam memetakan potensi sosial biasanya bersumber dari penguasaan terhadap nilai-nilai sosial yang telah terbangun di masyarakat. Dalam sumpah dan janjinya, seorang pamong praja telah diambil sumpah dan menyatakan kesanggupannya untuk ditugaskan di manapun juga. Seorang kader pamong praja seringkali tidak memiliki pilihan untuk menentukan sendiri dimana dia akan ditugaskan, apakah ditugaskan di daerah rawan konflik, daerah rawan bencana alam, daerah yang terisolasi secara geografis serta daerah-daerah yang fasilitas umum yang sangat minim. Dalam konteks seperti ini, seorang pamong harus memahami nilai-nilai sosial yang dianut oleh masyarakat setempat.

Salah satu yang paling sering terjadi adalah ketika seorang pamong praja ditugaskan di daerah dimana masyarakat pada umumnya menganut agama yang berbeda dengan sang pamong praja. Seorang yang berasal dari Sulsel dan beragama islam mungkin saja ditempatkan di salah satu kabupaten di Bali yang lingkungannya adalah masyarakat hindu yang religius. Nyaris tidak ada pilihan lain kecuali beradaptasi dengan adat dan kebiasaan masyarakat dimana dia bertugas.

Contoh lainnya adalah apabila seseorang ditugaskan di daerah yang terisolasi secara geografis, misalnya di daerah pegunungan atau di pulau-pulau kecil yang berpisah jauh dari pulau induk. Masyarakat setempat tentunya sudah memiliki kemampuan untuk bertahan hidup di daerah tersebut. Apa yang harus dilakukan oleh seorang pamong adalah berusaha untuk dapat menyesuaikan diri. Pamong harus mampu memahami nilai-nilai sosial di wilayah tersebut, tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh ia lakukan.

Pemahaman terhadap nilai sosial mengandung makna bahwa seorang pamong harus menaruh rasa hormat (respect) dan mengembangkan sikap saling percaya, bagi sebagai individu kepada individu lainnya, maupun sebagai wakil pemerintah kepada warganya.

8.4. Peranan Pamong Praja dalam Pembangunan, Kemasyarakatan, Pemerintahan, dan Ketatanegaraan

Bung Karno pernah mengemukakan pandangannya bahwa arti pamong praja lebih luas dari sekedar pengasuh dan pemimpin. Pamong praja adalah orang “*yang mengemong rakyat,*” seperti orang tua yang mengemong anaknya. Ia bertindak seperti apa yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantoro, menuntun di depan, membangun karsa di tengah dan mendorong dari belakang. Dari pandangan ini, seorang pamong berperan selayaknya orang tua yang mengasuh anaknya. Mengasuh dalam pengertian memberikan perhatian yang lebih dari sekedar wakil pemerintah di wilayah. Mengasuh dengan tetap memberikan ruang kreasi dan senantiasa hadir memotivasi dan menginspirasi warga untuk senantianya lebih kreatif dan inovatif.

Dalam prakteknya, pamong praja akan bekerja dalam sebuah struktur yang formal. Dalam struktur pemerintahan yang demikian, pamong praja berperan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, serta menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Peranan pamong praja dalam pekerjaan ini terasa banyak sekali. Pengalaman pribadi penulis sebagai aparatur pemerintah yang pernah ditugaskan dikelurahan dan kecamatan menunjukkan bahwa kecerdasan sosial, kepekaan sosial jauh lebih berpengaruh dibanding intelektualitas yang diperoleh dari bangku sekolah formal. Kemampuan mengatasi masalah dilapangan lebih didorong oleh penguasaan jaringan sosial yang telah terbangun

Dalam kaitannya dengan kemasyarakatan, pengalaman praktik menunjukkan bahwa pamong praja sering diperankan sebagai “sesepuh” masyarakat. Pamong praja dianggap bagian dari tubuh masyarakat. Bahkan pamong praja yang sudah pensiunpun

banyak yang masih diperankan hampir sama dengan yang masih aktif. Mereka dijadikan tempat bertanya, berkonsultasi, bahkan dimintai pertolongan atau pendapat berkenaan dengan kepentingannya masing-masing, terutama yang berkaitan dengan politik, pemerintahan, kemasyarakatan, dan pembangunan.

Berkenaan dengan kenegaraan, pamong praja telah menunjukkan peranannya sebagai “penguat ikatan negara kesatuan” di tiap-tiap daerah penugasannya dari sejak awal kemerdekaan RI sampai sekarang. Mereka telah menunjukkan bahwa pemerintah pusat hadir bersama-sama pemerintah bawahannya beserta instansi vertikal yang dikoordinasikannya untuk “menggalang persatuan dan kesatuan bangsa, memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan menjaga ketenteraman dan ketertiban.”

Pada masa awal kemerdekaan, dengan UU No.1 tahun 1945 ditetapkan bahwa pemerintahan di daerah diselenggarakan oleh Kepala Daerah bersama Komite Nasional Daerah. Sejak itu, pamong praja bersama bawahannya dan para pejuang lainnya berjuang untuk menegakkan kemerdekaan RI.

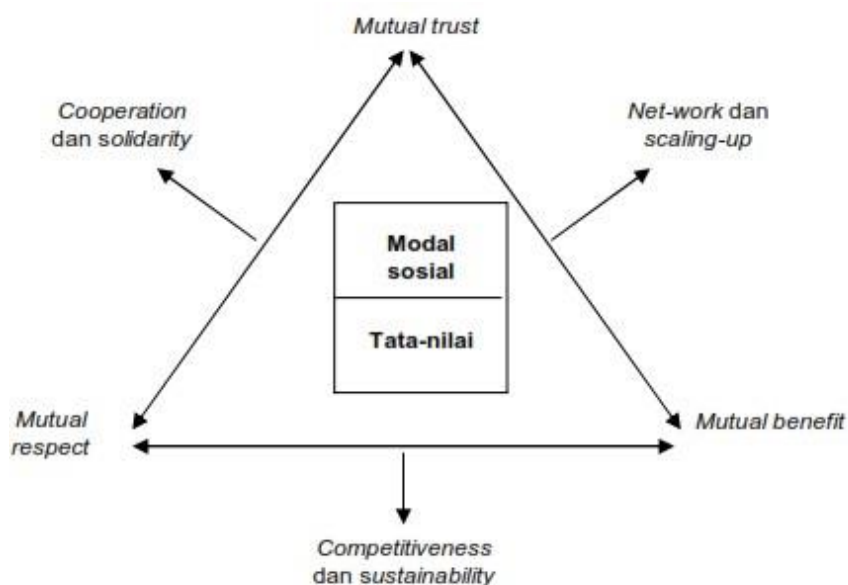
Pada masa selanjutnya, pamong praja memperjuangkan agar negara Indonesia *tidak berbentuk federal*, melainkan tetap *berbentuk negara kesatuan*. Karena itu, korp ini sangat menentang kehadiran UU No. 1/1957 yang berbau federalisme yang diupayakan Belanda karena ingin tetap menguasai Indonesia.

Itulah mungkin latar belakangnya mengapa The Liang Gie (1967: 173) berpendapat bahwa dalam rangka dekonsentrasi, pamong praja memiliki 3 peranan, yaitu :

- 1) sebagai instansi penengah (arbitrer) di antara kepentingan yang saling bertentangan dan bermusuhan;
- 2) sebagai instansi penghubung di antara lingkungan hukum tata negara yang berlainan; dan
- 3) sebagai pemelihara dan penegak ketenteraman dan keamanan umum yang dalam hal ini berhubungan erat dengan pihak kepolisian negara.

8.5 Modal sosial dan Kepamongpraajaan sebagai simbiosis

Menurut Sumardjo (2010: 2) modal sosial adalah hubungan yang sifatnya *mutual*, kepercayaan, kelembagaan, nilai dan norma sosial lainnya yang berperan penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hubungan tersebut dapat bersifat formal maupun informal. Hubungan formal dalam masyarakat misalnya yang terjadi melalui organisasi masyarakat, kelompok keagamaan, koperasi, partai politik dan sebagainya, sedangkan hubungan sosial yang informal misalnya interaksi sosial antara masyarakat dalam satu lingkungan. Hal yang sangat menentukan dalam penguatan modal sosial adalah intensitas interaksi antara warga masyarakat atau dengan pihak terkait, yang dapat berperan menjadi ruang publik yang partisipatif dan efektif.



Gambar 2. Tata-nilai sebagai Inti, Pembentuk dan Penguat Modal Sosial

Modal sosial menurut Lin (1999: 3-4) merupakan investasi

dalam hubungan sosial yang diharapkan dapat memberikan timbal balik. Definisi yang bersifat umum ini memiliki beberapa elemen di dalamnya. Pertama memfasilitasi aliran informasi. Kedua, ikatan sosial tersebut dapat mempengaruhi agen yang memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan. Ketiga, sumber daya dalam ikatan sosial akan mendukung kredibilitas individu atau organisasi dalam memperoleh akses terhadap sumber daya melalui jaringan atau modal sosialnya. Keempat, relasi sosial akan membangun sebuah identitas dan adanya pengakuan. Modal sosial umumnya mengetengahkan bahasan terhadap tiga dimensi (*trust*, *cooperation* dan *network*) tanpa memperhatikan tata-nilai di belakangnya yang dapat dilihat pada Gambar di atas.

Jika pengembangan modal sosial hanya dilandaskan pada tiga dimensi tersebut diperkirakan akan menghasilkan penjelasan yang rancu atau kontradiktif. Dimensi kerja sama atau *cooperation*, misalnya, tidak akan terwujud jika dalam masyarakat (kecil ataupun besar) tidak dapat dibangun kaidah kolektivitas yang dilandaskan pada hubungan *mutual respect*, dan pengembangan jaringan kerja atau *network* secara progresif. Jaringan kerja tidak akan berkembang jika di dalamnya tidak dibangun kolektivitas tanpa dilandaskan pada kaidah hubungan *mutual benefit*. Seyogyanya pengembangan hubungan *mutual trust*, *mutual respect* dan *mutual benefit* dalam sistem sosial adalah rangkaian lingkaran luar dari modal sosial. Lingkaran dalam atau inti modal sosial adalah tata-nilai yang hidup di masyarakat tersebut.

8.6. Penutup

Dinamika pemerintahan terus mengalami pasang surut yang fluktuatif, seiring perkembangan zaman. Fungsi-fungsi pemerintahan mengalami spesifikasi dan differensiasi. Meski demikian, penyelenggaraan pemerintahan umum tetap tidak dapat dihilangkan di negara ini. Kultur sosial yang sangat kental akan terus mewarnai hubungan sosial antara aparat pemerintah dengan masyarakatnya, semodern apapun pemerintahan itu telah

berubah. Kedudukan seorang pamong praja masih terus diperlukan oleh negara ini guna memastikan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial yang didistribusikan kepada seluruh warga, tanpa melihat sekat-sekat yang nampak secara kasat mata (wilayah-wilayah terpencil, pegunungan, pulau-pulau kecil dan daerah rawan bencana) dan sekat yang tidak terlihat (perbedaan suku, agama, ras, dan golongan).

Pamong praja adalah bentuk ideal aparatur negara yang menjadi menyambung cita-cita bersama bangsa Indonesia. Segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat dapat kemudian diteruskan dan dipahami kepada seluruh masyarakat Indonesia, demikian pula sebaliknya, aspirasi masyarakat akan pertama kali disampaikan kepada kepala wilayah (lurah, kades dan camat). Sehingga, kondisi seperti ini sangat memerlukan adanya penguasaan terhadap modal sosial bagi sosok pamong praja.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Samah, Asnarukhadi dan Fariborz Aref. 2009. *Empowerment as an Approach for Community Development in Malaysia*. World Rural Observations 2009;1.2;63-68.
- Adi, Isbandi R. 2007. *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: Dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Jakarta: FISIP UI Press.
- Alfitri. 2011. *Community Development.: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ancok, D. 2003. *Modal Sosial dan Kualitas Masyarakat*. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Psikologi Universita Gadjah Mada pada tanggal 3 Mei 2003.
- Ancok, D. 2003. "Modal Sosial". *Jurnal Psikologika*, vol 8, no. 15.
- Andreas dan Savitri 2016. *Peranan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Modal Sosial dalam meningkatkan Kesejahteraan di Kabupaten Meranti*. Unimal Press: Lhokseumawe.
- Bourdieu, P. 1983: *Ökonomisches Kapital, kulturelles Kapital, soziales Kapital*. In: Kreckel (1983): 183-198.
- Bourdieu, P. 1984: *Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft*. Frankfurt/Main: Suhrkamp.
- Bourdieu, P. 1986: *The Forms of Capital*. In: Richardson
- Bourdieu, Pierre and Loïc J. D. Wacquant. 1992. *An Invitation to Reflexive Sociology*. Chicago: University of Chicago Press.

- Bryant, C, White. L, 1987. *Manajemen Pembangunan untuk Negara Berkembang*, LP3ES, Jakarta.
- Burchardt, H.-J. 2003: Pierre Bourdieu und das Elend der Globalisierung. In: *Leviathan* (4): 505-518.
- Burt, R.S. 1982: *Toward a Structural Theory of Action: Network Models of Social Structure, Perception, and Action*. New York: Academic Press.
- Burt, R.S. 1992: *Structural Holes: The Social Structure of Competition*. Cambridge, Massachusetts, and London: Harvard University Press.
- Burt, R.S. 2001: Structural Holes vs. Network Closure as Social Capital. In: Lin et al. (2001a): 3156.
- Burt, R. S. 2002. "The Social Capital of Structural Holes." Pp. 148–90 in *The New Economic Sociology: Developments in an Emerging Field*, edited by M. F. Guillén, R. Collins, P. England, and M. Meyer. New York: Russell Sage.
- Cohen, D. dan Prusak L. 2001. *In Good Company*. Boston: Harvard Business School Press.
- Coleman, J.S. 1988: Social Capital in the Creation of Human Capital. In: *American Journal of Sociology* 94: S95-S120.
- Coleman, J.S. 1990: *Foundations of Social Theory*. Cambridge, MA: Belknap Press.
- Coleman, J.S. 1995: *Grundlagen der Sozialtheorie. Band 1: Handlungen und Handlungssysteme*. München: Oldenbourg.

- Dasgupta, Partha and Ismail Serageldin. 1999. *Social Capital: a Multifaceted Perspective*. Washington D.C: The World Bank.
- Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- Devi, L.V. Ratna. 2007. *Ikatan Solidariats, Keberdayaan Usaha, Dan Ketahanan Usaha Kelompok Etnis Pedagang Tekstil Pasar Klewer Surakarta*. Tesis : Pascasarjana. UNS.
- Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum. Penguatan Modal Sosial: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (Pnpm) Mandiri - Perkotaan
- Dwiningrum, S. I. A. 2014: *Modal Sosial Dalam Pengembangan Pendidikan (Perspektif Teori dan Praktik)*. Yogyakarta: UNY Press.
- Field, J. and Schuller, T. 2000 'Networks, Norms and Trust: Explaining Patterns of Lifelong Learning in Scotland and Northern Ireland', in F. Coffield (ed.), *Differing Visions of the Learning Society: research findings 2*, Policy Press, Bristol.
- Field, J. 2003. *Modal Sosial*. Bantul: Kreasi Wacana.
- Field, J. 2005 *Social Capital and Lifelong Learning*, Policy Press, Bristol.
- Fukuyama, F. 1995: *Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity*. New York: The Free Press.
- Fukuyama F. 2000. *An Institutional Framework For Japanes Crisis Management*. *Journal of contingencies and crisis management* 8.1.:3-14.

- Fukuyama, F. 2000. *Social Capital, Civil Society, and Development*. Third World Quarterly, 22 (1):7-200
- Fukuyama, F. 2002. *The Great Disruption: Hakikat Manusia dan Rekonstitusi Tatanan Sosial*. Yogyakarta: Qalam.
- Freire, P. 1992. *Pedagogy of The Oppressed*. Harmondsworth : Penguin Books, Inc.
- Geertz, C. 1986. *Mojokuto: Dinamika Sosial Sebuah Kota di Jawa*. (Terjemahan Grafiti Pers). PT. Tempirint. Jakarta.
- Gie, The Liang, 1968, *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah Di Indonesia Jilid I*, Jakarta: Gunung Agung.
- Granovetter, M. 1985: Economic action, social structure, and embeddedness. In: American Journal of Sociology 91: 481-510.
- Grootaet, C. 1999. *Social Capital, Household Welfare and Poverty in Indonesia*. Local Level Institutions Working Paper No. 6 World Bank
- Hanani, Nuhfil. 2003. *Strategi Pembangunan Pertanian: Sebuah Pemikiran Baru*. Lappera Pustaka Utama. Bantul-Yogyakarta.
- Hanifan, L. J. The Rural School Community Center. *The Annals of the American Academy of Political and Social Science* , Sep., 1916, Vol. 67, New Possibilities in Education (Sep., 1916), pp. 130-138.
- Hauberer, J. 2011. *Social Capital Theory*. VS Research.

- Haunschild, A. 2004: Contingent Work: The Problem of Disembeddedness and Economic Reembeddedness. In: Management Revue 15(1): 74-88.
- Hermawanti dan Rinandri 2003, *Penguatan dan Pengembangan Modal Sosial masyarakat Adat*, Institut for Research and Empowermen Yokyakarta.
- Higgins, M.C. 2001: Changing Careers: The Effects of Social Context. In: Journal of Organizational Behavior 22(6): 595-618.
- Inayah. 2012. *Peranan Modal Sosial dalam Pembangunan*. Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora, Vol. 12, (No 1).(diakses dari http://www.polines.ac.id/ragam/index_files/ jurnal ragam)
- Ketaren, A. 2015. Modal Sosial Petani Dalam Pertanian Berkelanjutan Dalam Mendukung Ketahanan Pangan Daerah: Studi Modal Sosial Petani di Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Lhokseumawe: Unimal Press
- Krätke, S. 2001: Institutionelle Ordnung und soziales Kapital der Wirtschaftsregionen: zur Bedeutung von Raumbindung im Kontext der Globalisierung. In: Geographische Zeitschrift 89(2/3): 144-164.
- Kriesi, H. 2007: Grundlagen, Konzepte, Modelle. Sozialkapital. Eine Einführung. In Franzen, A.; Freitag, M. (2007): 23-46
- Krishna, Anirudh. 2000. "Creating and Harnessing Social Capital." Pp. 71-93 in *Social Capital: A Multifaceted Perspective*, edited by P. Dasgupta and I. Serageldin. Washington, DC: World Bank.

- Kusnadi. 2002. *Polemik Kemiskinan Nelayan*. Jogjakarta: Pustaka Joga Mandiri
- Lawang, R.M.Z, 2005. *Kapital Sosial: Dalam Perspektif Sosiologik Suatu Pengantar*. Jakarta: FISIP UI Press.
- Lin, Nan. 2001. *Social Capital: A Theory of Social Structure and Action*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- Loury, G. 1977: A dynamic theory of racial income differences. In: Wallace, Le Mund (1977): 153-188.
- Loury, G. 1987: Why should we care about group inequality? In: *Social Philosophy and Policy* 5: 249-271.
- Marx, K. 1995: *Capital: A New Abridgement*. Oxford: Oxford University Press.
- Mawardi, M.J. 2007. Peranan Social Capital Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Komunitas 2, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*,
- Narayan, D dan Pritchett, L. 1999. *Cent and Sociability: Household Income and Social Capital in Tanzania*. *Economics Development and Culture Chang* 47 (4, July) 871-79.
- Narayan, Deepa, and Michael F. Cassidy. 2001, "A Dimensional Approach to Measuring Social Capital: Development and Validation of Social Capital Inventory". *Current Sociology* 49, pp, 59- 102
- Panther, S. (Eds.) 2002: *Ökonomik und Sozialwissenschaft. Ansichten eines in Bewegung geratenden Verhältnisses*. Marburg: Metropolis Verlag.

- Pearse, Andrew dan Michael Stiefel. 1979. *Inequality Into Participation: A Research Approach*, Geneva, UNRISD.
- Permadi, Danang Cahya. 2002. *Analisis Pengaruh Modal Sosial Organisasi dan Modal Intelektual Organisasi terhadap Keunggulan Organisasi*. Tesis Magister Manajemen IPB.
- Putnam, R.D. 1993: *Making Democracy Work – Civic Traditions in Modern Italy*. New Jersey: Princeton University Press.
- Putnam, R.D. 1995: *Tuning In, Tuning Out: The Strange Disappearance of Social Capital in America*. In: *PS: Political Science and Politics* 28: 664-683.
- Putnam, R.D. 1995: *Bowling Alone: American's Declining Social Capital*. In: *Journal of Democracy* 6 (1):65-78.
- Putnam, R.D. 1996: *Who Killed Civic America?* In: *Prospect (March)*: 66-72.
- Putnam, R.D. 2000: *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. New York: Simon Schuster.
- Putnam, Robert D. 2000. *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. New York: Simon & Schuster.
- Putnam, R.D. 2007: *E Pluribus Unum: Diversity and Community in the Twenty-first Century*. The 2006 Johan Skytte Prize Lecture. In: *Scandinavian Political Studies* 30(2): 137-174.
- Putnam, R.D.; Goss, K. A. 2001: *Einleitung*. In: Putnam (2001): 15-43.
- Rangkyu, R. P. 2018. *Modal Sosial dan Pemberdayaan Perempuan*, (Kajian Modal Sosial dalam Pemberdayaan

Perempuan Melalui PNPM Mandiri Pedesaan). Unimal Press: Lhokseumawe

Reagans, R.; McEvily, B. 2003: Network Structure and Knowledge Transfer: The Effects of Cohesion and Range. In: *Administrative Science Quarterly* 48: 240-267.

Remenyi. 2000. "Is There a State of the Art in Microfinance," dalam Remenyi (Ed.) *Microfinance and Poverty Alleviation: Case Studies from Asia and the Pacific*. London: Routledge.

Rose, Kalima. 1992. *Where Women are Leaders: The SEWA*

Saefuddin, dkk. 2003. *Menuju Masyarakat Mandiri (Pengembangan Model Sistem Keterjaminan Sosial)*, Jakarta, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama.

Saheb, Y. S dan Zuber, A. 2013. Peranan Modal Sosial bagi Petani Miskin untuk Mempertahankan Kelangsungan Hidup Rumah Tangga di Pedesaan Ngawi (studi kasus Desa Randusongo Kecamatan Gerih Kab. Ngawi, Jawa Timur. *Jurnal Analisa Sosiologi*. Vol 2 (1): 17-34.

Sakata, S. 2002. *What is Social Capital? In: Social Capital and International Cooperation*. Tokyo: Japan International Cooperation Agency in Japanese.

Sallata, B.L., 1983, *Peningkatan Dan Pemantapan Tugas-Tugas Pamong Praja Dalam Rangka*

Sayogyo. 1999. *Memahami dan Menanggulangi Kemiskinan di Indonesia*. (Prof Sajogyo 70 Tahun). Kerja sama Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor, Ikatan Sosiologi Indonesia (ISI) Cabang Bogor, dan PT Grasindo.

- Schwingel, M. 1995: Bourdieu zur Einführung. Hamburg: Juventus.
- Schuller, T.; Baron, S.; Field, J. 2000: Social Capital: A Review and Critique. In: Schuller et al. (2000a): 1-38.
- Sen, Amartya. 1999. Development as Freedom. New York: Anchor Book.
- Sobel, J. 2002: Can We Trust Social Capital? In: Journal of Economic Literature 40: 139-154.
- Soetomo. 2013. Pemberdayaan Masyarakat: Mungkinkah Muncul Antitesisnya?. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soleh, Chobib, dan Bambang Trisantono, 2001, *Pamong Praja Dalam Perspektif Sejarah*,
- Sturtevant, W.C. 1964. *Studies in ethnoscience dalam Transcultural Studies in Cognition*. A.K. Romney dan R.G.D.D Andrade (eds) American Antropologist Special Publication.
- Suharto. E. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakana Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Rafika Aditama.
- Suryaningrat, Bayu, 1980, *Pamong Praja Dan Kepala Wilayah*, Jakarta: Aksara Baru.
- Sutrisno. L. 1999. *Kemiskinan, Perempuan, dan Pemberdayaan*. Kanisius, Yogyakarta.
- Tjondronegoro, Sediono M.P. 1998. *Keeping-Keping Sosiologi dari Pedesaan dalam "Revolusi Hijau dan Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa*. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta.

- Totterdell, P.; Wall, T.; Holman, D.; Diamond, H.; Epitropaki, O. (2004): Affect Networks: A Structural Analysis of the Relationship Between Work Ties and Job-Related Affect. In: *Journal of Applied Psychology* 89(5): 854-867.
- Uphoff, Norman. 1986. *Local Institutional Development: An Analytical Sourcebook with Cases*. Kumarian Press. Rural Development Committee. Cornell University.
- Usman, S. 1995. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wuysang, Rendy. 2014. Modal Sosial Kelompok Tani Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Suatu Studi Dalam Pengembangan Usaha Kelompok Tani Di Desa Tincep Kecamatan Sonder. *Journal "Acta Diurna" Volume III. No.3*.
- Yunus, Muhammad. 2007. *Bank Kaum Miskin*. Depok: Marjin Kiri.

BIODATA PENULIS

SUDARMONO, S.STP., M.Si., Ph.D.



Saat ini, penulis bertugas sebagai dosen tetap pada Fak. Politik Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Ia menamatkan pendidikan terakhir di Univ. Kebangsaan Malaysia (2014) pada bidang Development Science. Beberapa mata kuliah yang diampu oleh penulis, diantaranya Pembangunan Modal Sosial, Teori

Pembangunan, Pembangunan Ekonomi Regional serta beberapa mata kuliah berkeaan dengan isu pembangunan. Ia juga telah menyunting beberapa buku, diantaranya *Pembangunan Ekonomi Inklusif (2021)*. Penulis juga telah mengikuti beberapa kegiatan yang disponsori, diantara adalah *Local Democracy Academy (2019)* yang disponsori oleh ICLD (Swedia).

Research interests:

- Coastal community
- Food security
- Climate change
- Poverty



- SUDARMONO, S.STP, M.SI, PH.D -



**BUKU LITERATUR
IPDN TAHUN 2021**

ISBN 978-623-88204-1-2

